

**PERAN BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA
DALAM DIPLOMASI MARITIM INDONESIA UNTUK
MEWUJUDKAN VISI POROS MARITIM DUNIA TAHUN
2017-2021**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial
(S.Sos) dalam Bidang Hubungan Internasional**



Oleh :

KURNIA FINTA KARISMA

NIM. 192218084

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

DESEMBER 2022

PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Kurnia Finta Karisma

NIM : I92218084

Program Studi : Hubungan Internasional

Judul Skripsi : Upaya Diplomasi Maritim Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dalam Mewujudkan Visi Poros Maritim Dunia Tahun 2017-2021

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan mana pun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
2. Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
3. Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 22 November 2022



Kurnia Finta Karisma

NIM: I92218084

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melaksanakan proses bimbingan yang mencakup koreksi dan arahan terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Kurnia Finta Karisma

NIM : I92218084

Program Studi : Hubungan Internasional

Yang berjudul: **“Upaya Diplomasi Maritim Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dalam Mewujudkan Visi Poros Maritim Dunia Tahun 2017-2021”**, saya berpendapat bahwa skripsi ini telah diperbaiki sehingga dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana ilmu sosial dalam bidang Hubungan Internasional.

Surabaya, 22 November 2022

Pembimbing



Ridha Amaliyah, S.IP, MBA

NUP. 201409001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Kurnia Finta Karisma dengan judul “Peran Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dalam Diplomasi Maritim Indonesia untuk Mewujudkan Visi Poros Maritim Dunia Tahun 2017-2021”, telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 09 Desember 2022.

TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I



Ridha Amaliyah, S.IP, MBA.
NUP. 201409001

Penguji II



Zakry Ismail, M.S.I.
NIP. 198212302011011007

Penguji III



Rizki Rahmadini Nurika, S.Hub.Int., M.A.
NIP. 199003252018012001

Penguji IV



Nur Luthfi Hidayatullah, S.IP., M.Hub.Int.
NIP. 199104092020121012

Surabaya, 05 Januari 2023

Mengesahkan,
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan



Dr. Abdul Chalik, M.Ag.
NIP. 197306272000031002

PERSETUJUAN PUBLIKASI



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Kurnia Finta Karisma
NIM : I92218084
Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Hubungan Internasional
E-mail address : kurniafintakarisma@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PERAN BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA

DALAM DIPLOMASI MARITIM INDONESIA UNTUK MEWUJUDKAN

VISI POROS MARITIM DUNIA TAHUN 2017-2021

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Januari 2023

Penulis

(Kurnia Finta Karisma)

ABSTRACT

Kurnia Finta Karisma, 2022. *Bakamla's Role to Realize the Vision of GMF by Conducting its Maritime Diplomacy in 2017-2021.* Undergraduate Thesis Department of International Relations Faculty of Social and Political Sciences State Islamic University of Sunan Ampel Surabaya.

Keywords: *Role, Indonesia Maritime Diplomacy, Bakamla RI, Global Maritime Fulcrum*

This research seeks to describe Bakamla's role as Indonesia's maritime security agency to realize the vision of GMF by conducting its maritime diplomacy in 2017–2021. As is well known, GMF has seven pillars of policy based on Presidential Decree 16 of 2017. Meanwhile, the method used is a qualitative-descriptive approach with data collection techniques such as interviews, documentation, and focus group discussion. The outcomes are cooperative and persuasive roles based on the conceptual framework of Le Miere's maritime diplomacy. For cooperative forms, consist of goodwill visits through port visits; training and joint exercise through holding MSDE forums and participating in educational programs plus training; and joint maritime security operations through joint exercises with other coast guards are all examples of cooperative forms. For persuasive forms, consist of showing the flag through the ACF's contribution, the presence of Bakamla RI with the Indonesian Navy in Natuna Waters, and participating in international forums such as HACGAM, IORA, and ARF.

ABSTRAK

Kurnia Finta Karisma, 2022. *Peran Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dalam Diplomasi Maritim Indonesia untuk Mewujudkan Visi Poros Maritim Dunia Tahun 2017-2021.* Skripsi Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya.

Kata Kunci: *Peran, Diplomasi Maritim Indonesia, Bakamla RI, Visi Poros Maritim Dunia*

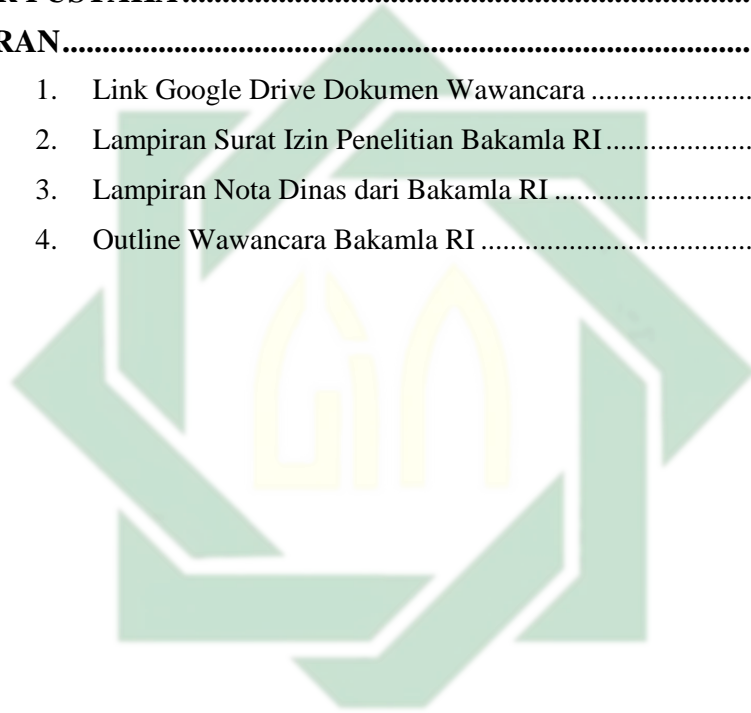
Penelitian ini berupaya untuk memaparkan bagaimana peran Bakamla RI dalam diplomasi maritim Indonesia untuk mewujudkan visi poros maritim dunia tahun 2017-2021. Sebagaimana yang diketahui poros maritim mempunyai 7 pilar kebijakan berdasarkan Perpres 16 Tahun 2017. Adapun, metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, hingga *focus group discussion*. Berdasarkan kerangka konseptual diplomasi maritim Le Miere, hasil penelitian menunjukkan adanya peran kooperatif dan persuasif. Apabila ditinjau dari segi kooperatif, meliputi: *goodwill visit* melalui aksi kunjungan pelabuhan; *training and joint exercise* melalui penyelenggaraan forum MSDE dan pelaksanaan program pendidikan hingga diklat; dan *joint maritime security operations* melalui latihan dan operasi bersama dengan *coast guard* lain. Sementara, ditinjau secara persuasif mencakup: *showing the flag* melalui kontribusi pembentukan ACF; kehadiran Bakamla RI bersama TNI AL di Perairan Natuna, dan turut serta ke dalam forum internasional seperti HACGAM, IORA, dan ARF.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Batasan Masalah	8
E. Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Akademis	9
2. Manfaat Praktis	9
F. Tinjauan Pustaka	9
G. Argumentasi Utama	19
H. Sistematika Pembahasan	19
BAB II KERANGKA BERPIKIR	22
A. Definisi Konseptual	22
1. Peran	22
2. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia.....	22
3. Poros Maritim Dunia	23
B. Kerangka Konseptual	31
1. Diplomasi Maritim.....	31
a) Kategori Kooperatif	32

b) Kategori Persuasif.....	35
c) Kategori Koersif.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	40
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	41
C. Subjek Penelitian dan Tingkat Analisa	42
D. Tahap-Tahap Penelitian	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	45
F. Teknik Analisa Data	49
G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	50
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISA DATA.....	51
A. Diplomasi Maritim Indonesia dalam Mewujudkan Visi Poros Maritim Dunia	51
a) Ditinjau secara Kooperatif.....	52
b) Ditinjau secara Persuasif.....	60
c) Ditinjau secara Koersif	64
B. Visi Poros Maritim Dunia melalui Perspektif Bakamla RI.....	65
C. Dinamika Bakamla RI dalam Tata Kelola Keamanan Maritim	72
D. Peran Bakamla RI dalam Diplomasi Maritim Indonesia untuk Mewujudkan Visi Poros Maritim Dunia Tahun 2017-2021 melalui Perspektif Le Miere.....	78
a) Ditinjau secara Kooperatif.....	78
1. <i>Humanitarian Assistance/Disaster Response</i>	78
2. <i>Goodwill Visit</i> melalui Aksi Kunjungan Pelabuhan	80
3. <i>Training and Joint Exercise</i> melalui.....	89
3.1. Penyelenggaraan Forum Maritime Security Dekstop Exercise (MSDE) bersama Australian Border Force	89
3.2. Pelaksanaan Pertukaran Personel sekaligus Program Pendidikan	97
4. <i>Joint Maritime Security Operations</i> melalui Latihan dan Operasi Bersama dengan <i>Coast Guard</i> lain	105
b) Ditinjau secara Persuasif.....	117
1. <i>Showing the Flag</i> melalui,.....	118
1.1. Kontribusi dalam Membentuk Asean Coast Guard Forum (ACF)	118
1.2. Kehadiran Bakamla RI dan TNI AL di Perairan Natuna.....	122
1.3. Turut Andil ke dalam Forum Internasional, diantaranya:.....	126
1.3.1. HACGAM/Heads of Asian Coast Guard Agencies Meeting	128
1.3.2. IORA/Indian Ocean Rim Association.....	131

1.3.3. ARF/Asean Regional Forum.....	134
c) Ditinjau secara Koersif.....	136
1. <i>Resembles to Gunboat Diplomacy</i>	137
BAB V PENUTUP.....	138
A. Kesimpulan.....	138
B. Saran.....	139
DAFTAR PUSTAKA	141
LAMPIRAN.....	152
1. Link Google Drive Dokumen Wawancara	152
2. Lampiran Surat Izin Penelitian Bakamla RI.....	152
3. Lampiran Nota Dinas dari Bakamla RI.....	153
4. Outline Wawancara Bakamla RI	154



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Jalan Kebijakan Kelautan Indonesia.....	27
Gambar 2. Bentuk Diplomasi Maritim Secara Kooperatif.....	33
Gambar 2.1. Bentuk Diplomasi Maritim Secara Persuasif.....	36
Gambar 2.2. Bentuk Diplomasi Maritim Secara Koersif	37
Gambar 3. Keterkaitan antar Aspek	68
Gambar 4. Peta Sebaran Relawan Penjaga Laut Nusantara	72
Gambar 4.1. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022	76
Gambar 5. Delegasi Bakamla RI dan Indian Coast Guard.....	84
Gambar 5.1. Diskusi Mendalam antara Bakamla RI dan Indian Coast Guard...	85
Gambar 5.2. Kunjungan Bakamla RI ke ROC dan MRCC.....	86
Gambar 5.3. Penyelenggaraan MSDE Ke-8.....	92
Gambar 5.4. Penyelenggaraan MSDE Ke-9.....	93
Gambar 5.5. Penyelenggaraan MSDE Ke-10.....	95
Gambar 6. 3rd Expert Group Meeting on Establishment of Asean Coast Guard Forum (EGF on ACF)	120
Gambar 6.1. Rapat Terbatas di Atas Kapal KRI Imam Bonjol 383.....	121
Gambar 6.2. Bakamla RI sebagai Delegasi Indonesia dalam IORA Maritime Safety and Security Working Group	131
Gambar 6.3. Bakamla RI bersama Kemenlu dan Pemerintah AS mengadakan Best Practice in Maritime Data Analysis to Strengthen Regional Maritime Security.....	134

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Laporan Kegiatan RAPALA Periode 2020-2021	70
Tabel 2.	Indikator <i>Confidence Building Measures</i> (CBMs) dalam Kerja Sama Maritim antara Bakamla RI-Indian Coast Guard.....	81
Tabel 2.1.	Kompilasi Pilar Kebijakan Kelautan Indonesia dalam <i>Goodwill Visit</i> melalui Aksi Kunjungan Pelabuhan.....	83
Tabel 2.2.	Indikator <i>Confidence Building Measures</i> (CBMs) dalam Kerja Sama Maritim antara Indonesia-Australia.....	90
Tabel 2.3.	Kompilasi Pilar Kebijakan Kelautan Indonesia dalam <i>Training and Joint Exercise</i> melalui Penyelenggaraan MSDE.....	91
Tabel 2.4.	Indikator <i>Confidence Building Measures</i> (CBMs) dalam Kerja Sama Maritim antara Bakamla RI-Japan Coast Guard.....	98
Tabel 2.5.	Kompilasi Pilar Kebijakan Kelautan Indonesia dalam <i>Training and Joint Exercise</i> melalui Pelaksanaan Pertukaran Personel sekaligus Program Pendidikan	99
Tabel 2.6.	Indikator <i>Confidence Building Measures</i> (CBMs) dalam Kerja Sama Maritim antara Bakamla RI-U.S. Coast Guard.....	106
Tabel 2.7.	Kompilasi Pilar Kebijakan Kelautan Indonesia dalam <i>Joint Maritime Security Operations</i> melalui Latihan dan Operasi Bersama dengan <i>Coast Guard</i> Lain	108
Tabel 2.8.	Rangkuman Aktivitas Latihan dan Operasi Bersama antara Bakamla RI dengan Beberapa Pihak Tahun 2018.....	111
Tabel 2.9.	Rangkuman Aktivitas Latihan dan Operasi Bersama antara Bakamla RI dengan Beberapa Pihak Tahun 2019.....	114
Tabel 2.10.	Rangkuman Aktivitas Latihan dan Operasi Bersama antara Bakamla RI dengan Beberapa Pihak Tahun 2020.....	115

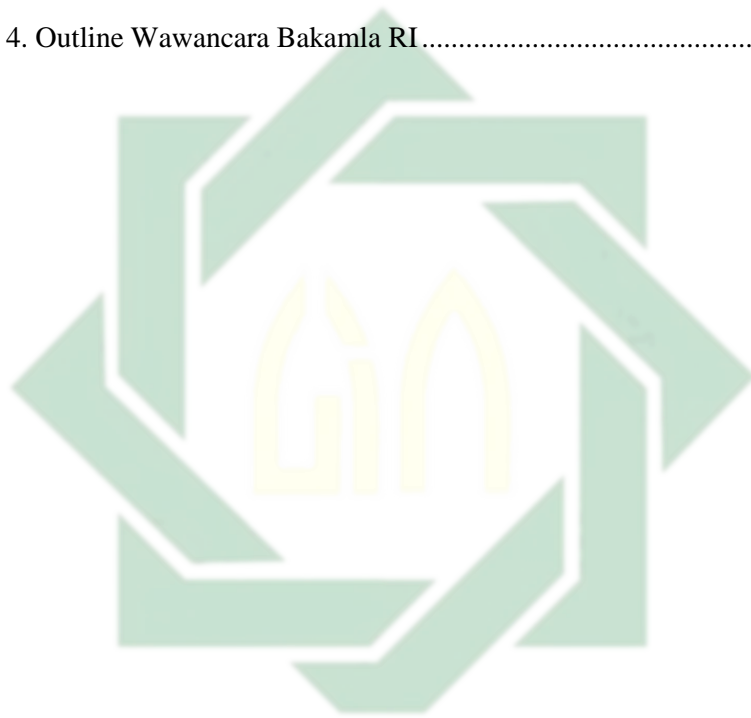
Tabel 2.11. Rangkuman Aktivitas Latihan dan Operasi Bersama antara Bakamla RI dengan Beberapa Pihak Tahun 2021	116
Tabel 3. Kompilasi Pilar Kebijakan Kelautan Indonesia dalam <i>Showing the Flag</i> melalui Kontribusi Membentuk Asean Coast Guard Forum (ACF).....	118
Tabel 3.1. Kompilasi Pilar Kebijakan Kelautan Indonesia dalam <i>Showing the Flag</i> melalui Kehadiran Bakamla RI dan TNI AL di Perairan Natuna	123
Tabel 3.2. Kompilasi Pilar Kebijakan Kelautan Indonesia dalam <i>Showing the Flag</i> melalui Keikutsertaan dalam Forum Internasional seperti HACGAM, IORA, ARF	127



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Link Google Drive Dokumen Wawancara	151
Lampiran 2. Surat Izin Penelitian Bakamla RI	151
Lampiran 3. Nota Dinas dari Bakamla RI.....	152
Lampiran 4. Outline Wawancara Bakamla RI.....	153



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Periode pertama pemerintahannya, Presiden Joko Widodo menggagas visi poros maritim dunia yang secara resmi diperkenalkan ketika perhelatan KTT Asia Timur Ke-9 Tahun 2014. Adapun visi tersebut mengandung lima pilar diantaranya: pertama, membangun kembali budaya maritim; kedua, komitmen dalam melindungi seraya mengorganisasikan sumber daya laut supaya menumbuhkan kedaulatan pangan melalui pengembangan industri perikanan oleh para nelayan sebagai prioritas; ketiga, mempromosikan pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim; keempat, menjalin kerja sama *via* diplomasi; kelima, mewujudkan ketahanan maritim³.

Makna kelima pilar di atas mendeskripsikan bahwasanya visi poros maritim dunia merupakan cita-cita bangsa selaku negara maritim yang sejahtera dan sanggup untuk berpartisipasi atas keamanan kawasan hingga internasional sesuai kepentingannya. Hakikat agenda tersebut tidak lain tidak bukan yakni mengenal kembali jati diri, mengingat wilayah Indonesia sebagian besar adalah perairan yang justru menyatukan beribu-ribu pulau dari sabang sampai merauke. Konektivitas ini, mengaktualkan domain maritim semakin penting; dimana laut menjadi media

³ Jurnal Penelitian Hukum De Jure and Muhar HR Junef Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Badan penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Jalan Rasuna, "Implementasi Poros Maritim Dalam Prespektif Kebijakan," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 3 (September 30, 2019): 303–22, <https://doi.org/10.30641/DEJURE.2019.V19.303-322>.

pergerakan barang, orang, bahkan suatu gagasan. Menurut pendapat Mahan dan Beresford⁴, “*Control of the sea, by maritime commerce and naval supremacy, means predominant influence in the world; because, however great the wealth product of the land, nothing facilitates the necessary exchanges as does the sea*”. Sederhananya, suatu negara dapat memiliki pengaruh dominan dalam panggung internasional ketika mempunyai kekuatan laut yang baik; sebab keunggulan yang berasal dari laut adalah vital bagi kemakmuran, pertumbuhan, dan keamanan nasional. Lantas, mengenai kriteria untuk mencapai *Sea Power* meliputi: posisi geografis, *physical conformation* atau bentuk fisik sebuah negara, luas wilayah, jumlah populasi, karakter bangsa, serta karakter pemerintahannya⁵. Oleh sebab itu, Indonesia termasuk sangat berpotensi.

Secara geografis, karakteristik NKRI yang diapit oleh dua benua dan dua samudera sekaligus memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia tentu sangat menguntungkan. Fakta geografis ini, tidak hanya menguntungkan bagi perdagangan; tetapi juga dalam mata pencaharian masyarakat disekitarnya. Terlebih lagi, keberadaan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI I, II, maupun III) sebagai jalur aktivitas pelayaran internasional. Akibatnya, jalur tersebut dapat dilintasi oleh berbagai kapal dari satu wilayah ZEE atau laut lepas ke wilayah lainnya dengan syarat wajib patuh terhadap prinsip-prinsip *Innocent Passage* yang

⁴ Captain Lord, Charles Beresford, and Royal Navy, “North American Review, Nov 1894, Vol 159” 159 (1894): 1–33, [http://german-family-name.com/pdf/Possibilities of an Anglo-American Reunion 2.pdf](http://german-family-name.com/pdf/Possibilities%20of%20an%20Anglo-American%20Reunion.pdf).

⁵ Bertram Shrine Jr., “School of Naval Command and Staff: Mahan in The Nuclear Age” 19, no. 2 (1966), <https://digital-commons.usnwc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=6903&context=nwc-review>.

tertuang dalam UNCLOS 1982 dan hukum nasional⁶. Keunikan konformasi fisik itu, mengakibatkan setiap ada pergerakan jenis kapal di atas/di bawah permukaan dan semua *choke points* membutuhkan pemantauan/kontrol.

Selain keutamaan secara geografis, potensi bahari juga terletak pada sumber daya hayati dan non-hayati. Berdasarkan data yang ditemukan, area pesisir apalagi laut mengandung minyak serta gas bumi sebesar 70% di 60 titik; dengan rincian 11,3 miliar barel untuk minyak sedangkan 101,7 triliun kaki kubik untuk gas⁷. Sementara, aspek biodiversitas/keanekaragaman hayati bisa mencapai 6,5 juta ton per tahun untuk perikanan; belum lagi komoditi unggulan seperti tuna, kerapu, udang, dll⁸. Maka, dengan sejumlah keistimewaan yang dimiliki Indonesia meliputi nilai strategis lokasi beserta kekayaan alamnya tentu menuai perhatian dan objek incaran oleh khalayak demi memenuhi kepentingan masing-masing.

Keistimewaan tersebut sekaligus menuai konsekuensi, dewasa ini perubahan lingkungan strategis di wilayah perairan telah menstimulasi atensi publik. Perhatian masyarakat nasional hingga internasional terhadap isu maritim ini, selaras dengan probabilitas pertikaian/konflik yang kian tinggi. Dimana fenomena ancaman sekarang lebih dinamis serta multidimensi. Sebagaimana, isu keamanan maritim yang merujuk ke persoalan tindak kejahatan transnasional,

⁶ Marsetio Marsetio, "Indonesian Sea Power and Regional Maritime Security Challenges," *Journal of Maritime Studies and National Integration* 1, no. 1 (July 23, 2017): 34–46, <https://doi.org/10.14710/JMSNI.V1I1.1369>.

⁷ Poltak Partogi Nainggolan, "Indonesia Dan Ancaman Keamanan Di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) Security Threats To Indonesia ' S Sea Lanes," *Kajian: Menjembatani Teori Dan Persoalan Masyarakat Dalam Peraturan Kebijakan* 20 (3) Sep (2015): 183–200, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/624>.

⁸ Nainggolan.

semisal perompakan, pembajakan, penyelundupan senjata, Berdasarkan data yang ditampilkan oleh The ICC International Maritime Bureau Piracy Reporting Centre (IMB-PRC) tahun 2019 menemukan sebanyak 162 kejadian dengan rincian 130 *vessels boarded* (pelaku berhasil mengakses kapal secara ilegal), 4 *vessels hijacked* (pelaku berhasil mengakses dan menguasai kapal dari nahkoda beserta kru), 11 *vessels fired* (pelaku berusaha mengakses kapal dengan menembakkan senjata), dan 17 *attempted attacks* (pelaku mencoba untuk menaiki kapal tetapi gagal karena kru tepat waktu dalam bertindak)⁹. Mengacu di periode tersebut selama Januari-Desember terdapat lima lokasi yang berkontribusi (57%) atas keseluruhan peristiwa kejahatan diantaranya: Indonesia (25), Selat Singapura (12), Malaysia (11), Peru (10), dan Nigeria (35). Hal itu, belum termasuk aksi pelanggaran dengan kasus berintensitas tinggi lainnya yakni *illegal fishing* serta penyelundupan narkoba. Walhasil, apabila tindakan di atas terus berlangsung akan berimplikasi pada kepentingan nasional seperti terhambatnya Indonesia sebagai poros maritim.

Sebagai poros maritim, Indonesia belum sepenuhnya memmanifestasikan “*good order at sea*”¹⁰. Oleh karenanya, dalam rangka menangani sumber konflik di laut dengan meminimalisir segala bentuk pelanggaran ataupun tindak pidana di laut yang berkesinambungan; Indonesia melalui matra laut nya berkontribusi atas pencegahan, pengendalian atas persoalan tersebut. Akan tetapi, disatu sisi kondisi

⁹ The ICC Maritime Bureau International, “ICC INTERNATIONAL MARITIME BUREAU PIRACY AND ARMED ROBBERY AGAINST SHIPS” (London, 2019), https://www.icc-ccs.org/reports/2019_Annual_Piracy_Report.pdf.

¹⁰ Good order at sea diartikan sebagai sebuah tatanan laut yang baik, yang dapat memastikan keamanan dan keselamatan pelayaran sehingga negara dapat mencapai kepentingan sekaligus mengembangkan sumber daya kelautan mereka berdasarkan prinsip hukum internasional yang disepakati.

tata kelola keamanan untuk saat ini masih terjadi tumpang tindih kewenangan; dimana terdapat enam lembaga kewenangan laut (K/L) dengan armada patroli seperti TNI AL, Polri, KKP, KPLP, Bea Cukai, Bakamla RI. Hal itu kemudian, mengakibatkan adanya pemeriksaan berulang oleh kapal patroli yang berbeda; terjadinya kekosongan seraya penumpukan kapal patroli di salah satu wilayah; serta ambiguitas penanggung jawab kama maritim¹¹. Pada saat yang bersamaan, meskipun sistem kama berjalan sesuai masing-masing sektor kementerian terkait; namun tidak bisa mengabaikan urgensi sinergitas dan koordinasi antar kewenangan yang menjadi suatu keharusan.

Dari keenam sektor lembaga, secara militeristik kekuatan utama negara berada pada TNI AL. Seperti yang telah diamanatkan UU No. 34 Tahun 2004 memuat tentang fungsi pertahanan sebagai peran militer, fungsi penegakan hukum sebagai peran polisionil, dan penjaga keamanan di wilayah yurisdiksi berdasarkan ketentuan hukum nasional dan internasional, sampai melaksanakan diplomasi angkatan laut dalam kerangka pelaksanaan kebijakan politik luar negeri sebagai peran diplomasi. Akan tetapi, bagaimanapun postur pertahanan dan keamanan nasional tidak hanya mengandalkan secara militer saja namun komponen cadangan yang bersifat sipil juga diperlukan. Sebagaimana diketahui, Pasal 59 Ayat 3 UU Nomor 32 Tahun 2014 menyatakan bahwasanya pembentukan Bakamla RI didasari oleh dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan sekaligus yurisdiksi terutama menjalankan patroli keamanan dan keselamatan. Lebih lanjut, peraturan

¹¹ Nono Sampono, "Urgensi Penguatan Penegakan Hukum Dalam Undang-Undang Kelautan," in *Penataan Sistem Keamanan Laut Indonesia Melalui Revisi Terbatas UU No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan* (DPD RI - Universitas Pertahanan RI, 2022), 32.

tersebut dituangkan lagi dalam Perpres Nomor 178 Tahun 2014 terkait penetapan Bakamla RI.

Sinyal urgensi itu juga tersuratkan melalui dua pernyataan Bapak Joko Widodo selaku presiden ketika peringatan hari nusantara tahun 2014 di Kotabaru dan agenda rapat terbatas di atas KRI Imam Bonjol tahun 2016 di Perairan Natuna. Yang pertama beliau menuturkan “Telah dimulai era baru, efisien dengan komando tunggal yang didukung sistem peringatan dini dan unit penindakan hukum. Semua *stakeholder* keamanan laut, saya perintahkan mendukung aset awal kepada Bakamla berupa kapal, pesawat patroli dan personel”¹². Dan yang kedua, menyatakan “Saya minta kemampuan TNI dan Bakamla RI dalam menjaga laut itu harus ditingkatkan, baik dalam hal kelengkapan teknologi radar atau kesiapannya”¹³. Dalam kedua penuturan tersebut, menunjukkan adanya dorongan untuk mendukung pembentukan instansi yang kemudian ditegaskan kembali bahwa peran aktor dalam menjaga kemaritiman Indonesia tidak hanya memerlukan kemampuan dari TNI AL; akan tetapi diperlukan juga peran serta Bakamla RI.

Dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan keselamatan maritim seperti menanggulangi keberlangsungan insiden pelanggaran hukum; instansi berperan untuk melangsungkan sejumlah kerja sama bilateral maupun multilateral

¹² Admin, “MLED Dari 5 Negara Kunjungi Mabes Bakamla/Indonesian Coast Guard Headquarters | WEBSITE TENTARA NASIONAL INDONESIA,” July 2019, <https://tni.mil.id/view-154737-mled-dari-5-negara-kunjungi-mabes-bakamla-indonesian-coast-guard-headquarters.html>.

¹³ Nia Humas Seskab RI, “Rapat Di Natuna, Presiden Jokowi Minta Penjagaan Ditingkatkan - BBC News Indonesia,” June 2016, https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/06/160623_indonesian_jokowi_natuna_hasil.

melalui kerangka diplomasi maritim¹⁴. Salah satunya yakni Bakamla RI-Japan Coast Guard melalui penyelenggaraan latihan gabungan, pertemuan tahunan, hingga melaksanakan *information sharing*. Sementara, di level multilateral, Bakamla RI aktif terlibat di forum Heads of Asian Coast Guard Agencies Meeting (HACGAM) dan sebagainya.

Hal tersebut kemudian, menarik untuk diteliti karena menemukan dua hal yang bertolak belakang. Hal pertama yakni Indonesia sebagai negara maritim berpotensi untuk mencapai visi poros maritim dunia. Kedua, Indonesia masih belum mencapai kategori *good order at sea*; yang artinya terbebaskan dari segala bentuk ancaman atau gangguan di laut. Terlebih, dalam tata kelola maritim nya yang masih tumpang tindih; dimana enam lembaga otoritas di laut memiliki armada patroli dan salah satu diantaranya Bakamla RI.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: Bagaimana peran Bakamla RI dalam Diplomasi Maritim Indonesia untuk Mewujudkan Visi Poros Maritim Dunia Tahun 2017-2021?

¹⁴ Najamuddin Khairur Rijal, "Smart Maritime Diplomacy: Diplomasi Maritim Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia," *Jurnal Global & Strategis* 13, no. 1 (2019): 63, <https://doi.org/10.20473/jgs.13.1.2019.63-78>. Dalam jurnal menyebutkan bahwa, konsepsi diplomasi maritim ialah tata laksana politik luar negeri melalui domain maritim. Menurut Le Miere, penggunaan diplomasi tidak sebatas manajemen ketegangan/konflik terkait problematika maritim dengan instrumen hukum internasional; akan tetapi bisa juga memanfaatkan sumber daya/aset kelautan guna mengontrol hubungan antar negara.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Bakamla RI dalam diplomasi maritim Indonesia untuk mewujudkan visi poros maritim dunia tahun 2017-2021.

D. Batasan Masalah

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam paragraf terakhir pada sub latar belakang; bahwasanya penetapan rentang waktu antara 2017 hingga 2021 berdasarkan ketiga rasionalisasi meliputi: 1) terbitnya pedoman kebijakan kelautan Indonesia tahun 2017; 2) meskipun termin pertama pemerintahan yang beragendakan poros maritim telah berganti haluan menjadi ‘lima prioritas’; tidak serta merta visi PMD itu ditinggalkan begitu saja. Menurut peneliti, justru keistimewaan dari kebijakan ini bersinggungan langsung dengan potensi negara yang bersifat permanen¹⁵; 3) argumentasi sebelumnya, diperkuat atas kehadiran rencana strategis Bakamla RI sebagai salah satu instansi kewenangan laut (K/L) Tahun 2020-2024 yang mencantumkan beberapa ‘fokus pencapaian tugas’ mencakup poin keenam yakni tercapainya visi poros maritim dunia¹⁶.

E. Manfaat Penelitian

Diharapkan, penelitian ini memberikan manfaat diantaranya:

¹⁵ Potensi negara yang bersifat permanen dimaknai sebagai hakikat keunggulan Indonesia secara geografis maupun sumber dayanya

¹⁶ Bakamla RI, “Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor 7 Tahun Tentang Rencana Strategis Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Tahun 2020-2024” (2020), <https://bakamla.go.id/>.

1. Manfaat Akademis

- a. Penelitian ini dapat membagikan perspektif yang berbeda terkait peran diplomasi maritim Indonesia dalam mewujudkan visi poros maritim dunia oleh Bakamla RI. Sebagaimana yang kita ketahui, aktor dengan kewenangan di laut terdiri dari tujuh instansi.
- b. Penelitian ini dapat menambah wawasan tentang isu-isu ancaman keamanan yang multidimensi, diplomasi, serta partisipasi aktor terkait.
- c. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pengetahuan bagi yang berminat terhadap topik ini sehingga bisa menjadi referensi atau rujukan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih informasi mengenai peran Bakamla RI dalam diplomasi maritim Indonesia untuk mewujudkan visi poros maritim dunia.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka pertama berjudul “Menerjemahkan Visi Poros Maritim Global ke dalam Kerangka Diplomasi Pertahanan Maritim dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Era Jokowi” dari penulis yang bernama Evan A. Laksmana, Iis Gindarsah, dan Andrew W. Mantong¹⁷. Pada CSIS *working paper* ini mengulas

¹⁷ Evan A Laksmana, Iis Gindarsih, and Andrew W Mantong, “Menerjemahkan Visi Poros Maritim Global Ke Dalam Kerangka Diplomasi Pertahanan Maritim Dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia Di Era Jokowi,” *CSIS Working Paper Series*, WPSINT – 01/2018 (Jakarta, 2018), <https://www.csis.or.id/publications/menerjemahkan-visi-poros-maritim-global-ke-dalam-kerangka-diplomasi-pertahanan-maritim-dalam-kebijakan-luar-negeri-indonesia-di-era-jokowi>.

probabilitas tantangan dari implementasi visi poros maritim dunia yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo dengan maksud menghadirkan kekuatan berbasis maritim yang sejatinya Indonesia dapat memanfaatkan potensi tersebut sehingga berkontribusi atas pertumbuhan ekonomi; meskipun masih menimbulkan kekhawatiran terkait belum adanya pedoman spesifik atau ketiadaan *grand strategy*. Lantas, setiap instansi memiliki terjemahan masing-masing sesuai kebiasaan yang berlaku di dalam lingkungannya. Adapun persamaan dari penelitian yakni mengkaji tentang visi poros maritim dunia yang dicetuskan oleh kepala negara seraya dinamika lingkungan maritim semakin beraneka ragam. Sedangkan fokus penulis pada peran diplomasi maritim instansi Bakamla RI dalam mewujudkan PMD sesuai dengan tupoksi mereka.

Tinjauan pustaka kedua berjudul “Poros Maritim Dunia: Konsep, Strategi, dan Realitas” dari penulis yang bernama Probo Darono Yakti dan I Gede Wahyu Wicaksana¹⁸. Dalam buku tersebut mengkaji tentang kemaritiman yang erat kaitannya atas Indonesia sebagai negara bahari; mengingat sebagaimana konsep negara kepulauan dengan wilayah perairan dan yurisdiksi sampai mendapatkan pengakuan internasional melalui UNCLOS. Konsep itu kemudian menyalurkan hal esensial PMD sendiri. Disisi lain juga, membahas perubahan serta keberlanjutan strategi maritim dari era kemerdekaan; lalu ditelaah dengan menggunakan enam variabel meliputi latar belakang situasi, citra diri nasional, peran negara dalam strategi maritim, trajektori strategi maritim, tonggak strategi maritim, prioritas

¹⁸ Probo Darono Yakti I. Gede Wahyu Wicaksana, *Poros Maritim Dunia*, Cetakan Pe (Malang: InTrans Publishing, 2021).

strategi maritim. Maka, doktrin poros maritim secara konteks bisa dipandang lebih luas. Untuk persamaannya terletak pada ulasan lahirnya visi PMD; sementara untuk perbedaannya, peneliti tertuju pada peran diplomasi maritim instansi Bakamla RI yang terhubung ke *internal perspective* mereka mengenai poros maritim melalui kesesuaian wewenangnya.

Tinjauan pustaka ketiga berjudul “Diplomasi Poros Maritim: Keamanan Maritim dalam Perspektif Politik Luar Negeri” dari penulis yang bernama Fikry Cassidy, Partogi J.P Samosir, Debbi Oktarossa, Erry Wahyu Prasetyo, Faiz Ahmad Nugroho, Widya Fitri, Robertus Aji Putro¹⁹. Tim penulis Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan berusaha menyampaikan sebuah kajian implementasi poros maritim sebagai visi Indonesia dalam sudut pandang politik luar negeri. Dan Kemlu berikhtiar memadukan antara kebijakan polugri dan kelautan nasional melalui diplomasi maritim hingga pengaplikasiannya dengan tiga dimensi antara lain: dimensi kesejahteraan, kedaulatan, dan keamanan. Pada pembahasan ini, melalui dimensi keamanan agar terwujudnya kondisi yang stabil; mengingat rentannya wilayah perairan Indonesia terhadap keragaman ancaman dan bersifat lintas batas. Maka, diperlukannya suatu kerja sama secara bilateral, multilateral, ataupun regional untuk mengatasi persoalan potensi ancaman di laut. Adapun persamaan penelitian berada dalam poin ulasan diplomasi dan poros maritim;

¹⁹ Fikry Cassidy et al., “Diplomasi Poros Maritim: Keamanan Maritim Dalam Perspektif Politik Luar Negeri,” 2016, 120, <https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9LYWppYW4IMjBCUF-BLL1AzSyUyME9JLU1VTFRJTEFURVJBTC8xNF9EaXBsb21hc2lfUG9yb3NfTWfyaXRpbS5wZGY=>.

sedangkan pembedanya yakni peneliti akan lebih mengulik tentang peran diplomasi maritim instansi Bakamla RI dalam merealisasikan visi poros maritim dunia.

Tinjauan pustaka keempat berjudul “Diplomasi Maritim Indonesia terhadap HACGAM (Head of Asian Coast Guard Agency Meeting) dalam Mewujudkan Indonesia Poros Maritim Dunia pada Tahun 2016-2017” dari penulis yang bernama Maudy Dwi Ramadhanti bersama pembimbing Dr. Syafri Harto, M.Si²⁰. Beliau menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif melalui kerangka perspektif neorealis, teori diplomasi, konsep keamanan maritim. Adapun substansinya, memaparkan tentang keterkaitan tiga variabel yakni diplomasi maritim sebagai peran, HACGAM sebagai forum, dan poros maritim sebagai visi pemerintah di rezim Joko Widodo. Sebagaimana dari ketiga poin di atas, berakar pada dua latar belakang diantaranya: karakteristik geografis ataupun potensi bahari Indonesia, ditambahkan pula dinamika lingkungan yang semakin kompleks terutama ancaman maritim sehingga dibutuhkan keterlibatan aktor untuk mengatasi hal tersebut melalui instrumen diplomasi; baik secara bilateral maupun multilateral. Dan aktor yang berpartisipasi ialah Bakamla RI selaku badan penegak hukum di area perairan serta yurisdiksi (mengingat kehadiran variabel HACGAM). Yang menjadi persamaan dalam penelitian adalah mengkaji keterlibatan dua variabel (diplomasi maritim dan visi poros maritim dunia); sedangkan pembedanya yaitu peneliti menggali lebih dalam mengenai peran diplomasi maritim instansi Bakamla

²⁰ Maudy Dwi Ramadhanti, “Diplomasi Maritim Indonesia Terhadap Hacgam (Head Of Asian Coast Guard Agency Meeting) Dalam Mewujudkan Indonesia Poros Maritim Dunia Tahun 2016-2017,” *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (JOM FISIP Vol.6)* 6 (2017): 14, https://digilib.unri.ac.id/index.php?p=show_detail&id=80907&keywords=.

RI demi terwujudnya visi PMD sesuai dengan tupoksi mereka melalui teori diplomasi maritim Le Miere.

Tinjauan pustaka kelima berjudul “Diplomasi Pertahanan Militer Indonesia dalam Menghadapi Ancaman Keamanan Non Tradisional: Upaya Mewujudkan Visi Poros Maritim Dunia” dari penulis yang bernama Muhammad Samy dan Jayanti Aarnee Kusumadewi²¹. Beliau menggunakan pendekatan kualitatif melalui kerangka konsep diplomasi pertahanan maritim; yang kemudian dijabarkan hingga terkait implikasi dan bentuk diplomasi seraya menganalisa suatu kebijakan untuk mengatasi isu keamanan maritim. Dan hasil yang ditemukan dari latar belakang peningkatan implementasi kebijakan tersebut yakni adanya keterbatasan kapabilitas pertahanan Indonesia dalam menghadapi variasi ancaman baik tradisional maupun non tradisional. Disisi lain, pemaparan juga mencantumkan tabel keterangan mengenai beberapa upaya kerja sama regional dan multilateral di kawasan Asia terutama Asia Tenggara. Adapun persamaan kedua penelitian ini adalah membahas tentang ketiga variabel sebagai berikut: diplomasi, isu ancaman maritim, dan visi poros maritim dunia. Akan tetapi perbedaan terletak pada fokus penulis yang ingin mengangkat dari peran diplomasi maritim Bakamla RI sendiri dalam mengatasi persoalan maritim sesuai tupoksi mereka sehingga tercapainya visi PMD.

Tinjauan pustaka keenam berjudul “*Smart Maritime Diplomacy: Diplomasi Maritim Indonesia menuju Poros Maritim Dunia*” dari penulis yang bernama

²¹ Muhammad Samy and Jayanti Aarnee Kusumadewi, “Diplomasi Pertahanan Maritim Indonesia Dalam Menghadapi Ancaman Keamanan Non-Tradisional Upaya Mewujudkan Visi Poros Maritim Dunia,” *Jurnal Hubungan Internasional* 14, no. 1 (June 25, 2021): 45–62, <https://doi.org/10.20473/JHI.V14I1.25547>.

Najamuddin Khairur Rijal²². Dalam artikelnya, beliau menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui konteks diplomasi maritim untuk mengupas tentang bagaimana upaya Indonesia mempraktikkan diplomasi maritim; terlebih di kawasan Asia Tenggara serta ASEAN guna meraih visi PMD. Adapun uraian argumentasi peneliti bahwasanya Indonesia menerapkan *smart maritime diplomacy* yang merupakan bentuk dari penggabungan antara *soft diplomacy* seperti kerja sama, serta persuasi dan *hard diplomacy* atau aksi koersif. Perihal julukan *smart* tersebut adalah istilah pinjaman dari kalimat *smart power* oleh Joseph Nye. Selanjutnya, penjabaran makna di atas diawali dengan mendeskripsikan gagasan poros maritim dan konsep diplomasi maritim sekaligus menjelaskan urgensi pelaksanaannya. Lalu, di bagian akhir terdapat detail mengenai tiga formasi cara diplomasi maritim Indonesia sampai pendekatan *smart maritime diplomacy*. Yang menjadi persamaan penelitian yakni membahas kedua variabel (diplomasi maritim dan poros maritim); sementara perbedaannya peneliti akan berfokus pada peran instansi Bakamla RI sendiri dalam mengaplikasikan diplomasi maritim selaras dengan tupoksi.

Tinjauan pustaka ketujuh berjudul “*Enhancing Safety and Security in Indonesian Waters: Cooperations Within Diplomacy Framework*” dari penulis yang bernama Kresno Buntoro²³. Jurnal Pertahanan ini memaparkan tentang kondisi lingkungan kemaritiman Indonesia yang memiliki sejumlah tantangan keamanan sehingga diperlukannya upaya-upaya dalam rangka melindungi

²² Najamuddin Khairur Rijal, “Smart Maritime Diplomacy: Diplomasi Maritim Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia,” *Global Strategis* 13, no. 1 (April 8, 2019): 63–78, <https://doi.org/10.20473/JGS.13.1.2019.63-78>.

²³ Kresno Buntoro, “Enhancing Safety and Security in Indonesian Waters: Cooperations Within Diplomacy Framework,” *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 4, no. 2 (August 6, 2018): 53–70, <https://doi.org/10.33172/JPBH.V4I2.331>.

keamanan dan keselamatan perairan. Seperti kita ketahui sebelumnya, wilayah daratan maupun bahari Indonesia sangat potensial atau istimewa; dimana alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) secara berkesinambungan merupakan jalur utama dari berbagai aktivitas terutama perdagangan. Dengan begitu, intensitas kegiatan tersebut pula memunculkan beberapa perkara seperti kejahatan lintas batas, tindak ilegal, dll. Akibatnya, pemerintah merumuskan kerangka kerja sama internasional sebagai salah satu bentuk kebijakan pertahanan untuk menghadapi permasalahan sekaligus mengamankan *national interest*. Untuk aktor yang menjalankan peran ini salah satunya ialah TNI AL; sebagaimana kapasitasnya meliputi: peran militer, konstabulari, serta diplomasi. Lalu, keikutsertaannya terhadap kerja sama keamanan maritim dapat dilihat dari implementasi keberadaan latihan bersama, pertukaran informasi, menjalin informasi terintegrasi, dan sebagainya. Adapun persamaan pembahasan terletak di kerangka keamanan maritim; sementara segi perbedaannya pada keterlibatan aktor. Peneliti akan berfokus mengangkat instansi Bakamla RI dalam menerapkan peran diplomasi maritim sesuai tupoksinya demi meraih visi poros maritim dunia.

Tinjauan pustaka kedelapan berjudul “Strategi Bakamla RI dalam Penanganan Kejahatan Perampokan Bersenjata di Kawasan Alur Laut Kepulauan Indonesia Tahun 2017-2020” dari penulis yang bernama Cicilia Safaatul Colline²⁴. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui kerangka konseptualisasi guna menjabarkan tiga variabel diantaranya strategi, perampokan

²⁴ Cicilia Safaatul Colline, “Strategi Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Dalam Penanganan Kejahatan Perampokan Bersenjata Di Kawasan Alur Laut Kepulauan Indonesia Tahun 2017-2020,” 2021, 116, [http://digilib.uinsby.ac.id/52122/2/Cicilia Safaatul Colline_I72217033.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/52122/2/Cicilia%20Safaatul%20Colline_I72217033.pdf).

bersenjata, dan ALKI. Adapun substansinya memaparkan terkait beberapa strategi Bakamla RI dalam menanggulangi tindak kejahatan perampokan bersenjata di kawasan Alur Laut Kepulauan Indonesia. Strategi tersebut meliputi penguatan personil instansi, kerja sama dalam rangka pengamanan maritim, peningkatan sarana prasarana sebagai penyokong aktivitas, dan pembentukan relawan penjaga laut nusantara. Untuk kedua penelitian persamaannya terletak pada lembaga yang bertindak sebagai unit analisis atau variabel independen. Sedangkan, perbedaannya terletak pada variabel ‘diplomasi maritim’; dimana peneliti akan memfokuskan peran diplomasi maritim instansi dalam kerangka keamanan maritim.

Tinjauan pustaka kesembilan berjudul “Diplomasi Maritim Indonesia-Australia di Era Pandemi Covid-19: Studi Kasus Kerja Sama Bakamla-Australian Border Force” dari penulis yang bernama Angga Reza Prabowo²⁵. Pada Bappenas Working Papers ini memaparkan terkait implementasi kerja sama maritim antara Indonesia dengan Australia yang dilaksanakan oleh Bakamla RI ketika selama pandemi. Seperti yang diketahui, kolaborasi antara keduanya dilandasi 2 nota kesepahaman yakni Joint Declaration on Maritime Cooperation dan Plan of Action. Adapun, hasilnya menunjukkan bahwa terjadi penurunan intensitas penyelenggaraan kegiatan walaupun kedua instansi bisa menyesuaikan metode aktivitas diplomasi maritimnya. Yang menjadi persamaan penelitian yaitu membahas dua variabel (diplomasi maritim dan Bakamla RI) guna meraih poros maritim dunia melalui konsep Le Miere dari aspek kooperatif saja. Sedangkan

²⁵ Angga Reza Prabowo, “Diplomasi Maritim Indonesia-Australia Di Era Pandemi Covid-19: Studi Kasus Kerjasama Bakamla-Australian Border Force,” *Bappenas Working Papers* 5, no. 2 (July 31, 2022): 176–95, <https://doi.org/10.47266/BWP.V5I2.169>.

perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang lebih umum tentang peran Bakamla RI dalam mewujudkan poros maritim dunia. Artinya, peneliti tidak hanya mengarahkan hubungan kerja sama dengan ABF; akan tetapi ditinjau dari segi aktivitas diplomasi maritimnya dengan beberapa *coast guard*. Terlebih lagi, akan diklasifikasikan secara kooperatif hingga koersif.

Tinjauan pustaka kesepuluh berjudul “*Policing the Waves: Maritime Paramilitaries in the Asia-Pacific*” dari penulis yang bernama Christian Le Miere²⁶. Artikel ini menelaah tentang pertumbuhan badan penegak hukum maritim atau yang bisa disebut juga paramiliter di kawasan Asia-Pasifik. Tren perkembangan ini ditunjukkan melalui tiga indikasi yang meliputi: *pertama*, adanya perkembangan dalam aspek ukuran maupun mandat pasukan paramiliter, misalnya di Jepang, Tiongkok, Korea Selatan; *kedua*, adanya peleburan *maritime constabulary* menjadi satu kesatuan dalam badan paramiliter, contohnya di Taiwan dan Malaysia; *ketiga*, adanya pembentukan paramiliter baru yang independen walaupun terdapat angkatan laut sebagai peran utama keamanan maritim, seperti di Filipina, Thailand, Vietnam, dan Indonesia. Kemajuan ini menjadi sebuah urgensi kekuatan dalam penegakan hukum, keselamatan, ketertiban, bahkan pemeliharaan keamanan. Mengingat lembaga tersebut dapat dipergunakan untuk mempererat hubungan antar negara terlebih membangun sebuah kepercayaan. Adapun artikel Le Miere menjadi salah satu faktor penguat peneliti merasionalisasikan subjek penelitian yakni Bakamla RI sebagai badan paramiliter yang sedang melakukan penguatan regulasi

²⁶ Christian Le Mière, “Policing The Waves: Maritime Paramilitaries in The Asia-Pacific,” *Survival* 53, no. 1 (2011): 133–46, <https://doi.org/10.1080/00396338.2011.555607>.

menuju perbaikan tata kelola keamanan maritim Indonesia. Dengan begitu, visi poros maritim dunia dunia akan segera terealisasi.

Tinjauan pustaka kesebelas berjudul “*The Growing Importance of Coast Guards*” dari penulis yang bernama Andreas Osthagen²⁷. Sub bab dalam buku tersebut, mengkaji mengenai urgensi aspek maritim dalam politik, keterbatasan dan peluang kerja sama antar negara di bidang kemaritiman, hingga peran *coast guard* (penjaga pantai). Apabila meninjau eksistensi penjaga pantai arktik seperti *Icelandic, Russian, Canadian, Norwegian, Danish* terbukti adanya peran penjaga pantai itu sendiri sebagai instansi pemerintahan. Terlebih, aktivitas maritim akan lebih jauh meningkat yang sekaligus menciptakan peluang perselisihan maupun tantangan. Misalnya: pentingnya peran penjaga pantai Norwegia yang dicirikan dengan ‘kapal bercat abu-abu’ ketika melaksanakan tugasnya di ZEE dan FPZ di sekitar Svalbard dalam mengelola hak berdaulat serta menjaga ketegangan. Seperti yang diketahui Norwegia dengan Rusia saling berbagi perbatasan laut; dimana letak Laut Barents telah menjadi pusat hubungan kedua negara ini. Pada akhirnya, dapat dipahami bahwa domain maritim yang semula dianggap tidak menarik kemudian menjadi menarik dan perlu dilindungi karena beberapa faktor diantaranya adanya keterkaitan simbolis dari aspek maritim. Artinya, ketika rezim internasional menetapkan ketentuan hukum UNCLOS yang memberikan hak berdaulat pada negara pantai yakni ZEE sejauh 200 mil; memunculkan anggapan ruang maritim menjadi hak yang perlu dilindungi. Adapun, kaitannya dalam penelitian ini

²⁷ Andreas Østhagen, *Coast Guards and Ocean Politics in the Arctic, Coast Guards and Ocean Politics in the Arctic* (Springer Nature Singapore Pte Ltd, 2019), <https://doi.org/10.1007/978-981-15-0754-0>.

menguatkan peneliti bahwasanya *coast guard* di masa saat ini berperan penting dalam bidang kemaritiman seraya terdapat potensi (penggunaan ruang laut guna mencapai poros maritim dunia atau bisa disebut sebagai melindungi kepentingan Indonesia) dan ancaman keamanan (tradisional maupun non tradisional) di dalamnya.

G. Argumentasi Utama

Peneliti berargumen bahwasanya, dalam rangka mewujudkan visi poros maritim dunia Bakamla RI melaksanakan peran diplomasi maritim secara kooperatif maupun persuasif melalui mengadakan latihan dan operasi bersama, melaksanakan kunjungan pelabuhan, mengikuti program pendidikan, hingga turut andil ke dalam berbagai forum internasional seperti ARF, IORA, dan lain sebagainya.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian yang berjudul “Peran Bakamla RI dalam Diplomasi Maritim Indonesia untuk Mewujudkan Visi Poros Maritim Dunia Tahun 2017-2021” akan tersajikan kedalam lima bab. Dimana, pada setiap sub-bab tersusun secara sistematis agar dapat memaparkan uraian dengan jelas sesuai dengan temuan peneliti. Dan berikut merupakan sistematikanya:

Bab pertama adalah bagian awal penelitian yang mencantumkan ulasan terkait pendahuluan; dimana tahapan ini terdiri dari: A) Latar Belakang, B) Rumusan Masalah, C) Tujuan Penelitian, D) Batasan Masalah, E) Manfaat Penelitian, F) Tinjauan Pustaka, G) Argumentasi Utama, H) Sistematika Pembahasan. Adapun di dalam latar belakang masalah memuat tentang fakta-fakta

terkait isu yang akan diteliti. Kemudian, peneliti akan menuliskan sebuah rumusan masalah yang mengandung persoalan dari pengkajian ini. Selanjutnya, terdapat tujuan dan manfaat penelitian yang menjelaskan mengenai capaian sasaran seraya memaparkan manfaatnya secara akademis ataupun praktis. Lalu, pada batasan masalah dipaparkan mengenai pertimbangan dalam penentuan rentang waktu penelitian. Setelah itu, ada tinjauan pustaka yang berisi beberapa rujukan lampau yang menyokong gambaran tema. Berikutnya, yakni argumentasi utama sebagai argumen peneliti. Terakhir, adalah sistematika pembahasan yang menggambarkan runtutan atas susunan penelitian.

Bab dua merupakan kerangka berpikir yang memuat pemaparan definisi konseptual dari peran, Bakamla RI, dan Poros Maritim Dunia hingga kerangka konseptual diplomasi maritim yang digagas oleh Le Miere.

Bab tiga adalah paparan mengenai metode penelitian yang terdiri dari beberapa bagian meliputi: A) Pendekatan dan Jenis Penelitian, B) Lokasi dan Waktu Penelitian, C) Subjek Penelitian dan Tingkat Analisa, D) Tahap-Tahap Penelitian, E) Teknik Pengumpulan Data, F) Teknik Analisa Data, G) Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.

Bab empat merupakan penyajian dan analisis data; dimana tahapan ini mengandung pemaparan data berupa informasi primer ataupun sekunder dengan sajian yang dapat berbentuk seperti tabel, gambar, dan sebagainya. Disamping itu juga, terdapat kajian Peran Badan Keamanan Laut RI dalam Diplomasi Maritim Indonesia untuk Mewujudkan Visi Poros Maritim Dunia Tahun 2017-2021. Pemaparan tersebut diulas menggunakan kerangka diplomasi maritim Le Miere.

Bab lima adalah tahapan akhir dari penelitian yang memuat kesimpulan serta saran dari peneliti. Adapun kesimpulan ialah temuan penelitian yang dinarasikan secara singkat; sedangkan saran yaitu pendapat peneliti yang berkenaan atas temuannya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

KERANGKA BERPIKIR

A. Definisi Konseptual

1. Peran

Dalam perkembangannya, konsep peran mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan pada beberapa bidang. Menurut Goss, Mason, and McEachern, peran didefinisikan sebagai sebuah harapan yang melekat dalam diri individu yang menempati kedudukan sosial tertentu²⁸. Sementara, Laurence Ross menyatakan bahwa peran ialah status; dan dinamisasi status atau bisa disebut juga status subjektif²⁹. Artinya status/kedudukan mempunyai peran tertentu yang harus dilaksanakan berdasarkan aturan/norma berlaku.

Kedudukan tersebut sama halnya dengan sebagaimana Bakamla RI selaku badan yang berwenang di laut dengan tupoksi menjalankan patroli keamanan sekaligus keselamatan di wilayah perairan maupun yurisdiksi Indonesia. Peran instansi yang menjadi koordinator di laut atau dapat diartikan selaku pintu utama distribusi informasi kondisi keamanan nasional membentuk peran aktor ini relevan atas terwujudnya visi poros maritim dunia.

2. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia

Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) ialah salah satu instansi kewenangan laut yang eksistensinya telah ada sejak lama. Secara

²⁸ David Berry, *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada), accessed December 23, 2022, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=33651#>.

²⁹ Phil Astrid S.Susanto, *Pengantar Sosiologi Dan Perubahan Sosial* (binacipta, 1983).

historiografi, institusi terbentuk semenjak tahun 1972 melalui Surat Keputusan Bersama oleh Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, Menteri Kehakiman, Menteri Pertahanan dan Keamanan, serta Jaksa Agung. Kemudian, secara resmi berdiri Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) melalui penetapan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005. Dalam perkembangannya, Bakorkamla bertransformasi menjadi Bakamla RI tahun 2014 berdasarkan pengesahan UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Perpres Nomor 178 Tahun 2014. Peresmian ini menjadi bagian dari serangkaian upaya Ir. H. Joko Widodo selaku Presiden RI dalam mengimplementasikan orientasinya yaitu kebijakan “Poros Maritim Dunia”. Keputusan pemerintah untuk meregenerasi instansi menandakan adanya perhatian dan tekad yang tertuju pada kondisi kemaritiman Indonesia dari segi keamanan bahkan tata kelolanya.

Sejalan dengan hal tersebut, itikad pemerintah sebagai poros maritim dunia relevan dengan tupoksi sekaligus visi Bakamla RI. Seperti yang diketahui, tugas instansi adalah menjalankan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan serta yurisdiksi Indonesia. Sementara, visinya juga berkaitan dengan pengejawantahan jati diri Indonesia sebagai penjaga poros maritim. Artinya, fisibilitas/keterlaksanaan ini sesuai realita atau dapat disebut rasional. Sebagaimana, pengambilan kebijakan itu rasional; dalam artian masuk akal ketika memang bersinggungan dengan tujuan.

3. Poros Maritim Dunia

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan terbesar di dunia yang diapit oleh dua benua dan dua samudera sehingga secara geostrategi maupun geoekonomi memberikan keuntungan bagi negara. Terutama, mencakup keberadaan Selat Lombok, Selat Sunda, dan Selat Malaka sebagai jalur transit perdagangan yang menghasilkan nilai USD 435 miliar setiap tahun³⁰. Begitu pun, luas wilayah perairan mencapai 3.544.743,9 km² yang merepresentasikan bahwa potensi biota laut beserta sumber energinya sangat melimpah. Dengan begitu, aset berharga di atas merupakan jati diri kita sebagai bangsa maritim dimana perlu adanya pengoptimalan dan pemanfaatan untuk kepentingan nasional baik secara ekonomi, sosial, politik, hingga budaya, keamanan, dan pertahanan.

Berangkat dari upaya pemerintahan dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki Indonesia; Presiden Joko Widodo mencetuskan adanya Poros Maritim Dunia (PMD). Tepatnya, visi ini diperkenalkan secara resmi ketika KTT Asia Timur Ke-9 Tahun 2014 di Naypyidaw, Myanmar. Langkah strategis tersebut menandakan bahwasanya diharapkan dengan terselenggaranya acara sebagai salah satu forum prestisius bersama mitra strategis mampu memberikan dampak yang besar untuk implementasi poros maritim. Adapun, gagasan pada termin pertama pemerintahan ‘nawacita’ tertuang dalam visi tercapainya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, melalui misi sebagai berikut³¹:

³⁰ Bakamla RI, “Road Map Reformasi Birokrasi Badan Keamanan Laut Republik Indonesia 2020-2024” (2020), <https://bakamla.go.id/>.

³¹ Arie Sudaryanto, “Visi Misi Program Aksi Ir. H. Joko Widodo-Drs. H.M. Jusuf Kalla Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014,” n.d., https://www.academia.edu/8325321/VISI_MISI_PROGRAM_AKSI.

- 1) Mencapai keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi melalui pengamanan sumber daya maritim, sekaligus merefleksikan pribadi Indonesia sebagai negara kepulauan.
- 2) Menjadi masyarakat yang berkeimbangan, maju, serta demokratis dengan berasaskan negara hukum.
- 3) Menjalankan politik luar negeri bebas-aktif dan menguatkan jati diri sebagai bangsa maritim.
- 4) Menjadikan masyarakat Indonesia yang mempunyai kualitas hidup sejahtera, maju, dan tinggi.
- 5) Mempunyai bangsa yang berdaya saing.
- 6) Mencapai Indonesia sebagai negara maritim yang kuat, maju, mandiri, dan berlandaskan kepentingan nasional.
- 7) Membangun masyarakat dengan pribadi yang berbudaya.

Ketujuh misi di atas, diantaranya pada poin pertama, kedua, ketiga, dan keenam yang merujuk dalam meningkatkan potensi kemaritiman Indonesia.

Tidak sampai disitu saja, keseriusan dalam pemantapan gagasan dilakukan oleh pemerintah dengan menyusun Kebijakan Kelautan Indonesia. Kebijakan yang tertuang pada Buku Putih adalah pedoman bagi pihak yang bersangkutan guna pelaksanaan pembangunan kelautan. Garis haluan tersebut juga tercantumkan kedalam RPJMN/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode 2015-2019; yang mana termasuk tahapan ketiga dari RPJPN/Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 melalui UU No. 17 Tahun

2007³². Lantas, rancangan RPJMN menjadi suatu kaidah dalam memelihara orientasi pembangunan nasional yang telah ditentukan oleh UUD 45 serta RPJPN.

Berikutnya, dari RPJMN diturunkan lagi ke dalam tataran pedoman kebijakan kelautan yang telah ditetapkan dalam Perpres No. 16 Tahun 2017. Sebagaimana tercantum pada pasal 1 ayat 1 mengenai bahwa penyusunan kebijakan diproyeksikan untuk penerapan poros maritim. Kemudian, di pasal 1 ayat 2 mengungkapkan Indonesia sebagai negara maritim menetapkan Poros Maritim Dunia merupakan visi negara. Sedangkan pada pasal 2 tertera sebenarnya kebijakan kelautan Indonesia tertuang ke dalam dua dokumen yakni Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia dan Dokumen Nasional Kebijakan Kelautan Indonesia. Dalam



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³² Indriati Arie, “Kebijakan Kelautan Indonesia Dan Diplomasi Maritim” 41 (2019): 32, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24843/KP.2019.v41.i03.p0>.

kebijakan kelautan disebutkan terkait ketujuh pilar visi poros maritim dunia, berikut adalah rinciannya³³.



Gambar 1. Peta Jalan Kebijakan Kelautan Indonesia

Sumber: Kebijakan Kelautan Indonesia

Tujuh pilar di atas meliputi: yang pertama terkait dengan pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan sumber daya manusia. Dalam mengelola sumber daya laut mempunyai tujuan untuk memanfaatkan potensi tersebut secara berkelanjutan dan optimal melalui prinsip ekonomi biru. Tujuan itu diimplementasikan dalam beberapa program utama yang telah disebutkan di pedoman kebijakan kelautan indonesia, diantaranya penguatan sistem data/informasi kelautan hingga

³³ Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman RI, “Kebijakan Kelautan Indonesia,” *Maritim.Go.Id*, 2017, 70, https://maritim.go.id/konten/unggah/2017/07/Kebijakan_Kelautan_Indonesia_-_Indo_vers.pdf.

mengembangkan pariwisata bahari, dan sebagainya. Sedangkan tujuan dari mengembangkan sumber daya manusia yakni mencetak SDM bidang kelautan yang mempunyai etika, profesional, hingga memprioritaskan kepentingan nasional dalam membangun bahari secara optimal sekaligus terpadu. Tujuan ini diterapkan dalam beberapa program utama yang telah disebutkan pada pedoman kebijakan kelautan Indonesia, diantaranya meningkatkan riset maupun teknologi sistem informasi kelautan, meningkatkan pendidikan hingga menyadarkan masyarakat kebaharian melalui jalur atau jenjang pendidikan dan lain sebagainya.

Yang kedua, pertahanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut yang memiliki tujuan untuk melindungi, menegakkan, hingga mempertahankan NKRI dari ancaman sekaligus tantangan keamanan di laut. Tujuan tersebut, diimplementasikan dalam beberapa program utama, diantaranya meningkatkan kemampuan ataupun kinerja pertahanan dan keamanan, mengoptimalkan sistem komando dan komunikasi, hingga membangun postur pertahanan dan keamanan yang proposional berdasarkan luas perairan sekaligus yurisdiksi Indonesia dan lainnya.

Yang ketiga, tata kelola dan kelembagaan laut yang bertujuan untuk membentuk tata kelautan nasional efektif, terintegrasi, serta efisien. Kemudian, tujuan itu diterapkan dalam beberapa program utama yang meliputi diantaranya membangun sistem tata kelola keamanan, menata sistem hukum nasional bidang kelautan, hingga mengimplementasikan hukum internasional sesuai kepentingan negara dan lain-lain.

Yang keempat, ekonomi dan infrastruktur kelautan serta peningkatan kesejahteraan. Adapun ekonomi kelautan ditujukan untuk mewujudkan domain laut menjadi dasar pembangunan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan. Kemudian, tujuan tersebut diturunkan menjadi beberapa program utama diantaranya membangun kawasan ekonomi kelautan di wilayah pesisir, mengembangkan kerja sama dengan mitra strategis, hingga mengoptimalkan ketersediaan fasilitas bagi pelaku usaha maritim terutama nelayan. Sedangkan, untuk infrastruktur kelautan diproyeksikan pada peningkatan konektivitas. Peningkatan ini, dibungkus dalam beberapa program utama seperti mengembangkan konektivitas transportasi di laut, hingga meningkatkan kerja sama investasi untuk membangun infrastruktur maritim maupun pelabuhan. Sementara itu, dari segi peningkatan kesejahteraan mempunyai tujuan untuk memberikan manfaat pembangunan kelautan terhadap masyarakat pesisir. Dari tujuan tersebut dilaksanakan ke dalam beberapa program misalnya meningkatkan kapasitas sekaligus membangun kebutuhan sarpras dalam pengembangan usaha bagi para nelayan, petambak garam sampai pembudi daya ikan, dan sebagainya.

Yang kelima, pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut. Pengelolaan itu diarahkan untuk melindungi, memanfaatkan, hingga mengembangkan potensi sumber daya dan lingkungan laut. Dari tujuan tersebut, diimplementasikan melalui beberapa program utama diantaranya mempercepat penyelesaian zonasi kawasan pesisir dan penetapan tata ruang laut, hingga menciptakan sinergitas antarsektor laut. Sementara, dalam perlindungan lingkungan laut ditujukan untuk melestarikan sumber daya hingga mencegah adanya

pencemaran/kerusakan lingkungan. Tujuan ini, direalisasikan ke dalam beberapa program utama meliputi peningkatan kerja sama bilateral maupun regional bidang pengelolaan laut, hingga mencegah, menanggulangi, dan memulihkan efek pencemaran lingkungan.

Yang keenam, budaya bahari yang difokuskan untuk memberikan wawasan kebaharian kepada masyarakat guna membangun kelautan nasional. Orientasi kelautan ini, diaplikasikan dalam beberapa program utama diantaranya meningkatkan pemahaman budaya bahari hingga meningkatkan kesadaran masyarakat melalui jalur pendidikan, dan sebagainya.

Yang ketujuh, diplomasi maritim yang diarahkan untuk mengoptimalkan potensi kelautan Indonesia demi terpenuhinya kepentingan nasional berdasarkan ketentuan nasional maupun internasional. Tujuan tersebut, dimanifestasikan melalui peningkatan peran aktif kerja sama bidang kelautan, peningkatan kepemimpinan dalam kerja sama kemaritiman baik di tingkat bilateral, regional, maupun multilateral, dan lain-lain.

Dapat diketahui bahwa, ketujuh pilar yang menjadi bagian dari arah kebijakan poros maritim ini berkaitan dengan prinsip bebas aktif Indonesia. Keterkaitan tersebut dimaknai sebagaimana Indonesia akan menentukan posisinya sendiri terhadap segala permasalahan tanpa tekanan maupun pengaruh dari luar dan turut berperan aktif dalam membangun serta memelihara perdamaian.

B. Kerangka Konseptual

1. Diplomasi Maritim

Dalam bukunya, SL. Roy menerangkan bahwa diplomasi ialah sebuah seni mengedepankan kepentingan negara dalam hubungannya dengan negara lain. Menurut Kautilya, tujuan utama diplomasi adalah menjamin keuntungan negaranya sendiri secara maksimum, dimana kepentingan utamanya yaitu pemeliharaan keamanan. Untuk menjamin keuntungan maupun mengamankan kepentingan nasional sebuah negara, maka diperlukan ‘praktik diplomasi’. Di era kontemporer, praktik ini pun mengalami perkembangan karena berbagai fenomena keamanan yang semakin luas dan mendalam (*broadening and deepening security*)³⁴. Akibatnya, bermunculan isu-isu baru seperti pada aspek kesehatan, hak asasi manusia, teknologi informasi, lingkungan, ekonomi, keuangan, keamanan, hingga kejahatan lintas batas negara.

Pada aspek keamanan maritim yang bersinggungan langsung dengan visi poros maritim dunia sebagai kepentingan nasional Indonesia. Persoalan tersebut dapat dikaji dengan kacamata ‘diplomasi maritim’. Diplomasi maritim merupakan bentuk pelaksanaan polugri melalui domain kemaritiman. Seperti halnya yang dipaparkan oleh Le Miere,³⁵

“Maritime Diplomacy is therefore the management of international relations through maritime domain. This doesn’t mean the use of diplomacy to manage maritime tensions, through the codification of

³⁴ Rizki Rahmadini Nurika, “Future of Diplomacy, Presentasi Perkuliahan,” n.d.

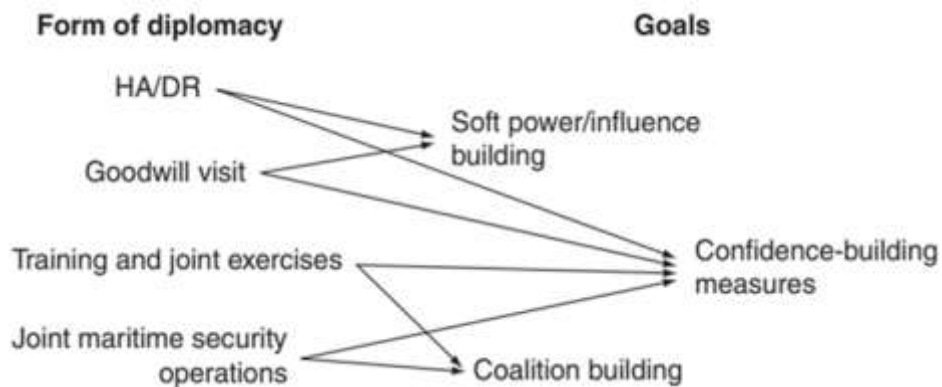
³⁵ Christian Le Mièrè, *Maritime Diplomacy in the 21st Century*, *Maritime Diplomacy in the 21st Century* (Routledge Taylor and Francis Group, 2014), <https://doi.org/10.4324/9780203555590>.

international law, for instance, but the use of maritime assets to manage the relations themselves”

Jadi, penggunaan diplomasi tidak hanya sebatas manajemen ketegangan/konflik terkait problematika maritim dengan instrumen hukum internasional; melainkan bisa juga memanfaatkan sumber daya/aset kelautan untuk mengontrol hubungan antar negara. Berkaitan dengan itu, Le Miere mengklasifikasikan diplomasi maritim ke dalam tiga kategori meliputi: kooperatif, persuasif, dan koersif.

a) Kategori Kooperatif

Diplomasi maritim kooperatif diartikan sebagai bentuk diplomasi yang dapat dilakukan oleh beberapa aktor dengan mengedepankan unsur kerja sama. Disebutkan bahwa, aktor tersebut mencakup Angkatan Laut/Naval, Penjaga Pantai/Coastguards, Lembaga Penegak Hukum di Laut/Maritime Constabulary Agencies. Dalam konteks ini, penyelenggaraan diplomasinya melalui agenda bantuan kemanusiaan/tanggap bencana (*humanitarian assistance/disaster response*); kunjungan yang membawa niat baik seperti kunjungan pelabuhan, kunjungan personal (*goodwill visit*); pelatihan dan latihan bersama seperti program pendidikan, lokakarya, pertukaran personel (*training and joint exercise*); hingga operasi bersama keamanan maritim (*joint maritime security operations*).



Gambar 2. Bentuk Diplomasi Maritim Secara Kooperatif

Sumber: *Le Miere Maritime Diplomacy*

Keempat bentuk di atas memiliki tiga kemungkinan tujuan, dan semuanya tergantung pada aktivitas itu sendiri; lebih cenderung kearah mana. Agar lebih dapat dipahami, berikut adalah contohnya: ketika Indonesia mengalami musibah tsunami tahun 2004, negara Amerika, Singapura, dan Australia meresponnya dengan memberikan bantuan (tanggap bencana) melalui tindakan operasi bantuan terpadu (*Operation Unified Assistance*). Bantuan ini disambut dengan baik oleh pemerintah Indonesia hingga mereka dianggap sebagai penyelamat. Jika mengingat kembali pada 5 tahun sebelumnya; hubungan Indonesia Australia tidak begitu baik karena permasalahan timor timur. Terdapat pasukan intervensi yang dipimpin Australia berupaya untuk mengakhiri kekuasaan Indonesia atas bekas jajahan Portugis³⁶. Hal tersebut menjadi pengingat bahwa tindakan operasi bantuan memberikan pengaruh positif. Pada dasarnya, operasi semacam ini merupakan upaya untuk memenangkan hati dan pikirannya. Aksi mereka menyerupai teori *soft power* yang disebutkan Joseph Nye; beliau menjelaskan bahwa *soft power* ialah

³⁶ Le Mière.

“getting others to want the outcome that you want’ and ‘rest on the ability to shape the preferences of others”³⁷. Apabila *soft power* mempunyai kemampuan membentuk preferensi pihak lain, maka hal itu bergantung pada ‘*intangible assets*’ seperti kepribadian yang menarik, kebudayaan, nilai dan institusi politik, dan sebagainya.

Sedangkan, untuk pelatihan/*training* sekaligus latihan dan operasi bersama mengarah pada membangun kepercayaan (CBMs) sehingga memperkuat ikatan antar pihak. Menurut Holst pengertian *Confidence Building Measures* (CBMs)³⁸, “*Confidence building measures (CBMs) may be defined as arrangements designed to enhance such assurance of mind and belief in trustworthiness of states and the facts they create.*” Jadi, CBMs adalah sebuah pengaturan yang dirancang untuk meningkatkan rasa saling percaya. Pengaturan yang dirancang ini dapat mengarah pada kerja sama/perjanjian berupa nota kesepahaman. Maka, untuk mengamati aktivitas-aktivitas tersebut memerlukan pengkajian melalui penerapan CBMs dalam perjanjian mereka. Menurut Holst, Landau & Landau kerangka konsep CBMs mengandung 4 substansi, diantaranya: pertama, membangun komunikasi/*demonstrate a willingness to talk*; kedua, mendengarkan/*demonstrate a willingness to listen*; ketiga, meraih kepentingan bersama/*demonstrate a willingness to meet the other’s needs*; keempat, menumbuhkan hubungan kerja sama/*demonstrate a willingness to improve the*

³⁷ Jr. Nye, *Soft Power: The Means to Success in World Politics* (PublicAffairs Books, 2005).

³⁸ Johan Jørgen Holst, “Confidence Building Measures a Conceptual Framework,” *Survival: Global Politics and Strategy* 25, no. 1 (1983): 2–15, <https://doi.org/10.1080/00396338308442072>.

*relationship*³⁹. Sementara, untuk menjabarkan substansinya, diperlukan beberapa indikator: (1) Deklarasi informasi; (2) Prosedur komunikasi; (3) Observasi; (4) Stabilisasi⁴⁰. Yang pertama, yaitu sepakat untuk saling bertukar informasi dalam menyelenggarakan aktivitas militer. Perlu diingat kata militer disini, bukan sebatas dimaknai ke ranah militernya; akan tetapi bisa merujuk pada operasi penegakan hukum di laut; sebab konsep CBMs telah menyentuh diskursus keamanan. Yang kedua, yakni jalur komunikasi yang disepakati antar pihak untuk bertukar informasi. Yang ketiga, ialah aktivitas pengamatan mengenai kegiatan yang disepakati. Yang keempat, merujuk pada upaya yang disepakati oleh antar pihak dalam menjaga keamanan dan ketahanan kawasan; dimana indikator ini berperan untuk mengurangi kecenderungan terhadap ancaman yang dialami. Lantas, dengan bantuan indikator di atas dapat membantu dalam mengidentifikasi tujuan penyelenggaraan kegiatan sebagai membangun rasa percaya.

b) Kategori Persuasif

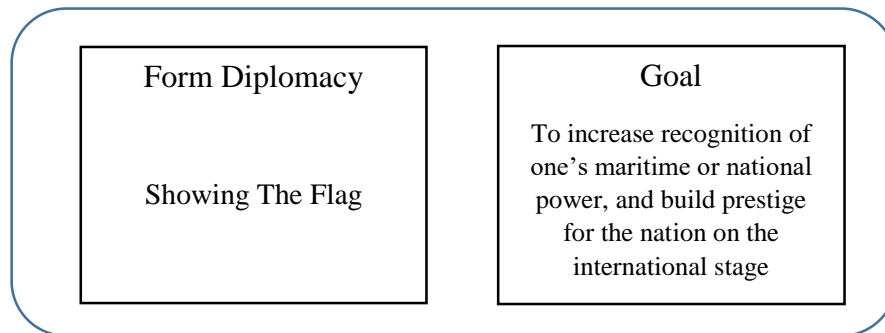
Diplomasi persuasif dimaknai sebagai bentuk diplomasi yang memiliki tujuan meningkatkan pengakuan negara lain terhadap *maritime/national power*; sekaligus menciptakan marwahnya di kancah internasional. Sederhananya, digambarkan seperti adanya perjalanan armada/*flotilla*⁴¹. Dimana, memiliki pola

³⁹ Daryl Landau and Sy Landau, "Confidence Building Measures in Mediation," *Mediation Quarterly* 15, no. 2 (1997): 97–103, <https://doi.org/10.1002/crq.3900150204>.

⁴⁰ Yoshua Parulian, Hari Utomo, and Yusnaldi Yusnaldi, "Analisis Confidence Building Measures (CBMs) Terhadap Kerja Sama Bilateral Pertahanan Antara Indonesia Dengan Singapura," *Jurnal Keamanan Maritim Program Studi Keamanan Maritim Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan RI*, 2019, <https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/KM/article/view/382>.

⁴¹ Menurut Cambridge Dictionary, Flotilla dimaknai sebagai perjalanan armada yang terdiri dari sekelompok boats maupun ships

kesamaan dengan apa yang disebut dengan istilah “*Showing The Flag*”. Oleh



Gambar 2.1. Bentuk Diplomasi Maritim Secara Persuasif

Sumber: Diolah oleh Peneliti Berdasarkan Le Miere

karenanya, ketika sebuah negara melaksanakan aktivitas ini tentu akan menggunakan kekuatan maritimnya dalam rangka memberikan sinyal atas kemampuan maupun eksistensi mereka, tanpa memengaruhi kebijakan negara lainnya. Misalnya: Angkatan Laut Iran mengadakan pelayaran menggunakan armada kecil melalui terusan Suez pada tahun 2011. Adapun tujuannya yakni menunjukkan kehadiran Iran di Laut Mediterania; seperti yang disampaikan oleh Ayatollah Ali Khamenei⁴², “*The world should know that the presence of Iranian warships in the Suez Canal has taken place ... through the deep guidance of the Supreme Leader*”. Artinya, pernyataan tersebut menegaskan bahwa masyarakat internasional harus mengetahui eksistensi Iran melalui pelayaran kapal perang mereka yang melewati terusan Suez.

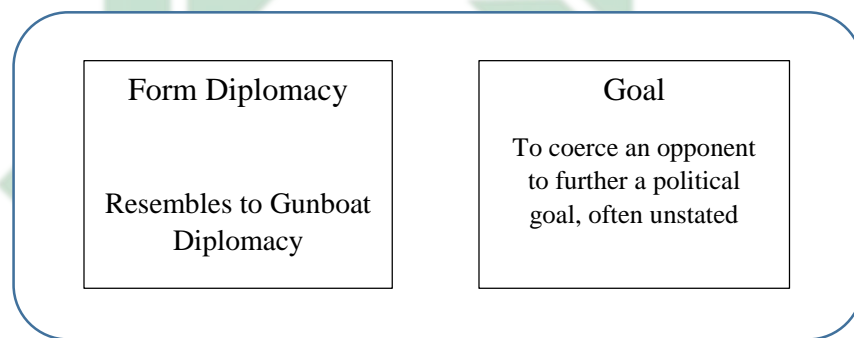
Perlu dicatat juga, perjalanan armada yang menjadi bentuk diplomasi persuasif tentu mengeluarkan biaya mahal untuk pelayarannya termasuk skuadron bahkan kapalnya sendiri. Oleh sebab itu, kegiatan persuasif ini seringkali dapat

⁴² Le Mièrè, *Marit. Dipl. 21st Century*.

diaplikasikan pada kegiatan lainnya⁴³. Maka, tidak menutup kemungkinan bahwa jenis persuasif bisa direfleksikan dengan penyelenggaraan aktivitas lainnya selain perjalanan armada; yang terpenting menitikberatkan pada eksistensi mereka di panggung internasional tanpa memengaruhi kebijakan negara lain.

c) Kategori Koersif

Diplomasi maritim secara koersif menyerupai diplomasi kapal perang/*gunboat diplomacy*⁴⁴. Menurut James Cable, definisi *Gunboat Diplomacy*



Gambar 2.2. Bentuk Diplomasi Maritim Secara Koersif

Sumber: Diolah oleh Peneliti Berdasarkan Le Miere

“Is the use or threat of limited naval force, otherwise than as an act of war, in order to secure advantage, or to avert loss, either in the furtherance of an international dispute or else against foreign nationals within the territory or the jurisdiction of their own state”⁴⁵.

Definisi tersebut mengandung dua poin penting yakni “*threat*” dan “*territory*”.

Keduanya mengartikan bahwa aksi diplomasi kapal perang erat kaitannya melalui

⁴³ Le Mière.

⁴⁴ Prabowo, “Diplomasi Maritim Indonesia-Australia Di Era Pandemi Covid-19: Studi Kasus Kerjasama Bakamla-Australian Border Force.”

⁴⁵ Raymond G. O’Connor, “Gunboat Diplomacy: Political Applications of Limited Naval Force.,” *Http://Dx.Doi.Org/10.1177/000271627240300115* 403, no. 1 (September 8, 2016): 163–64, <https://doi.org/10.1177/000271627240300115>.

ancaman yang menggunakan kekuatan angkatan laut dengan melanggar wilayah pihak sasaran/negara di masa damai (bukan dalam kondisi perang maupun krisis) demi mencapai kepentingannya. Sedangkan lebih spesifiknya, diplomasi koersif menerangkan⁴⁶, “*The overt display, demonstration, threat or use of limited sea-based force by a state or non-state actor designed to coerce an opponent to further a political goal, often unstated, by compellence or deterrence.*” Artinya, menyatakan bahwa diplomasi koersif terkait dengan mengadakan sebuah aksi pertunjukkan, demonstrasi, ancaman, maupun penggunaan kekuatan berbasis laut terbatas (makna terbatas merujuk pada penggunaan kemampuan sesuai porsinya) aktor negara maupun non negara yang diarahkan untuk memaksa lawan mencapai tujuan politik. Sederhananya, digambarkan seperti adanya perjalanan kapal⁴⁷. Menurut Le Miere frasa kekuatan berbasis laut sengaja dibuat luas, karena tidak hanya kemampuan kapal angkatan laut; tetapi juga kemampuan pesawat terbang, amfibi, maupun kapal paramiliter maritim. Agar dapat lebih dipahami, salah satu contohnya yakni pada tahun 1958 US Navy destroyer mengadakan pelayaran tanpa melepaskan tembakan melalui Selat Makassar sebagai respon atas Deklarasi Djuanda Indonesia di tahun sebelumnya yang mengajukan klaim kedaulatan selat-selat strategis⁴⁸. Dengan demikian, dapat diketahui bersama mengenai ketiga kategori diplomasi maritim menurut Le Miere. Intinya, pengkategorian ini kembali pada kondisi keberlangsungan dari aktivitas itu sendiri. Sebab, bisa jadi awalnya

⁴⁶ Le Mière, *Marit. Dipl. 21st Century*.

⁴⁷ Menurut Cambridge Dictionary, *sailing* dimaknai sebagai aktivitas yang menggunakan kapal layar

⁴⁸ Toh Boon Kwan, “Brinkmanship and Deterrence Success during The Anglo-Indonesian Sunda Straits Crisis, 1964–1966,” *Journal of Southeast Asian Studies* 36, no. 3 (October 2005): 399–417, <https://doi.org/10.1017/S0022463405000226>.

tergolong kooperatif, tetapi kemudian berubah kategorinya menjadi koersif, misalnya: latihan bersama secara berkala tergolong bentuk kooperatif, akan tetapi dapat berubah kategori menjadi koersif ketika kegiatan tersebut dengan sengaja dilaksanakan di lokasi sengketa atau menggunakan kemampuan yang menargetkan pihak ketiga.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

METODE PENELITIAN

Setelah menjelaskan kerangka berpikir dalam Bab II, selanjutnya di Bab ini peneliti akan menerangkan terkait metode penelitian dalam rangka mendapatkan informasi/data untuk dilakukan proses analisa. Di bagian ini pula, peneliti menjelaskan terkait rancangan penelitian guna menjawab rumusan masalah. Adapun sub bagian terdiri dari: jenis dan pendekatan penelitian; lokasi dan waktu; tingkat analisa data; tahapan penelitian; teknik pengumpulan data; hingga teknik analisis data.

Secara garis besar, peneliti menggunakan penelitian kualitatif-deskriptif atas dasar pertimbangan fokus untuk memaparkan/menggambarkan sebuah peran Bakamla RI dalam diplomasi maritim Indonesia untuk mewujudkan visi poros maritim dunia. Sementara itu untuk memperoleh informasi/data, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui kepustakaan, wawancara, hingga data online. Kemudian, peneliti menggunakan teknik analisa data Miles and Huberman yang dilaksanakan dengan tahapan reduksi data, penyajian data, hingga verifikasi data.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif-deksriptif. Menurut Sukmadinata, penelitian deskriptif adalah bentuk penelitian yang diarahkan untuk

mendeskripsikan berbagai fenomena baik alamiah maupun buatan⁴⁹. Fenomena tersebut berupa aktivitas, objek yang dibentuk, hubungan, perubahan, karakteristik, kesamaan hingga perbedaan antar fenomena. Pendekatan kualitatif-deskriptif ialah penelitian yang meneliti studi kasus secara mendalam melalui pendeskripsian serta menginterpretasikan suatu masalah. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha menerangkan isu yang diangkat dengan penyajian fakta-fakta berdasarkan gambaran objektif dari peneliti. Fakta yang tersaji tersebut akan diterapkan sesuai penggunaan konsepnya.

Sehubungan dengan itu, penelitian terkait peran Bakamla RI dalam diplomasi maritim Indonesia untuk mewujudkan visi poros maritim dunia tahun 2017-2021 akan dideskripsikan mengenai berbagai perannya yang telah dilaksanakan demi meraih tujuan tersebut. Kemudian, dianalisa melalui konsep diplomasi maritim Le Miere untuk membantu peneliti dalam menjawab rumusan masalah.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi pada instansi Bakamla RI melalui interaksi jarak jauh bersama personelnnya untuk mendapatkan data primer. Sementara untuk mendapatkan data sekunder, peneliti mengerjakan di beberapa tempat yang ada di Surabaya seperti Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya dan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Timur. Untuk waktu penelitian sendiri dilakukan selama

⁴⁹ Sukmadinata, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Rosdakarya, 2011), https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=+Sukmadinata.+Metode+Penelitian+Kualitatif.+&btnG=.

delapan bulan terhitung sejak seminar proposal skripsi yang diadakan pada tanggal 25 April 2022.

C. Subjek Penelitian dan Tingkat Analisa

Penelitian ini menempatkan Bakamla RI sebagai subjek penelitian. Dalam bukunya Muhammad Idrus menyatakan bahwa subjek penelitian merupakan individu, benda, atau organisme yang dijadikan sebagai sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian⁵⁰. Maka, subjek penelitian memiliki peran strategis karena dalam subjek tersebut itulah data tentang variabel yang penelitian akan diamati.

Sementara, untuk tingkat analisisnya yakni level negara/*state*. Artinya, penelitian dengan tingkat analisa negara akan menerangkan terkait perilaku negara yang dipengaruhi faktor internal negara tersebut. Pada tingkatan ini, penekanannya yakni bagaimana faktor-faktor internal negara memengaruhi perilaku negara di kancah global. Salah satu faktor yang berperan itu yakni kelembagaannya, dan peneliti berfokus pada lembaga internal yang ada di dalam negara Indonesia yakni Bakamla RI sebagai instansi kewenangan laut.

D. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian, terdapat beberapa tahapan yang diperlukan agar lebih fokus dan terarah atas pengkajian fenomena. Sehingga, pembaca akan lebih mudah untuk memahaminya. Maka, penelitian ini merujuk pada panduan dari

⁵⁰ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial : Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif Edisi Kedua*, ed. Yayat Sri Hayati, Edisi Kedu (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009), <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=12814>.

Suryana “Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif”⁵¹. Berikut adalah tahapan-tahapannya,

1) Pemilihan Tema, dan Persoalan Penelitian

Awal mulanya, peneliti tertarik pada kajian keamanan maritim. Ketertarikan ini bertambah besar ketika menyadari bahwa mengapa visi poros maritim dunia muncul; faktor apa yang melatar belakangnya. Sedangkan, insiden pelanggaran di laut masih berlangsung, terdapat tumpang tindih kewenangan di laut, dan sebagainya. Meskipun, di lain sisi Indonesia juga memiliki potensi dari segi geografis maupun sumber daya alamnya. Kelebihan dan kekurangan itu mendorong peneliti untuk menelaah lebih jauh penyebab kemunculan visi tersebut. Setelah beberapa saat, mulai memahami motifnya sekaligus menemukan literatur terkait. Oleh karena itu, fokus penelitian bukan kepada ‘mengapa muncul visi poros maritim dunia’; melainkan, ‘bagaimana peran untuk mewujudkan visinya’. Setelah memantapkan unsur yang ingin dikaji, dilanjutkan dengan pertimbangan untuk menentukan aktornya.

Dalam menentukan aktor yang dianggap sesuai, peneliti mengarah pada Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI). Terpilihnya instansi ini didasari atas beberapa penilaian yang meliputi: 1) Menyoroti atas penuturan Bapak Joko Widodo selaku Presiden yang menegaskan tentang keberadaan Bakamla RI, 2) Penegasan tersebut bertepatan dengan momentum munculnya Visi Poros Maritim Dunia Tahun 2014, 3) Kedudukan Bakamla RI yang bertanggung jawab

⁵¹ Amanca Pamalina, “Analisis Kebijakan Luar Negeri Arab Saudi Dalam Merespon Perang Harga Minyak Terhadap Rusia Pada Tahun 2020” (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021).

kepada Presiden melalui Kemenko Polhukam sebagaimana dalam Pasal 1 PP Nomor 178 Tahun 2014, 4) Instansi menjadi salah satu badan penegak hukum yang semakin menguatkan kehadirannya melalui regulasi terbaru dalam PP Nomor 13 Tahun 2022, 4) Kehadiran tersebut sejalan dengan literatur yang menyebutkan bahwa terdapat tren perkembangan instansi paramiliter di Asia-Pasifik sehingga dapat dirasionalisasikan bahwa instansi dinilai cocok berdasarkan situasi yang berkembang. Keempat pertimbangan itu menguatkan peneliti untuk memilih Bakamla RI menjadi aktor dalam mewujudkan visi poros maritim dunia.

2) Studi Literatur

Peneliti melakukan pendalaman literatur dari berbagai sumber agar menguatkan pemahaman terhadap fenomena yang dikaji. Dengan begitu, akan membantu peneliti dalam menyusun skripsi melalui pengumpulan data baik melalui media cetak seperti buku, jurnal, artikel, maupun media online seperti youtube, instagram, twitter yang terkait dengan topik.

3) Identifikasi Rumusan Masalah

Setelah membaca literatur yang berkaitan dengan topik, dan mempertimbangkannya dari sudut pandang yang dianggap tepat, semakin menguatkan peneliti untuk menelaah topik ini sehingga dapat merumuskan permasalahan yakni “Bagaimana Peran Bakamla RI dalam Diplomasi Maritim Indonesia untuk Mewujudkan Visi Poros Maritim Dunia Tahun 2017-2021?”

4) Menyusun Kerangka Pemikiran

Ketika merumuskan kerangka berpikir, peneliti menggunakan kerangka konseptual diplomasi maritim dari Le Miere. Hal ini ditujukan untuk dapat

menggambarkan atas peran yang dilakukan oleh Bakamla RI dalam mencapai poros maritim dunia.

5) Penetapan Hipotesa

Hipotesa adalah dugaan sementara peneliti yang akan dibuktikan dengan kebenaran di lapangan sekaligus dapat diuji.

6) Mengumpulkan dan Mengolah Data

Untuk menyusun ini, tentu saja proses pengumpulan dan mengolah data sangat penting agar dapat menunjang penelitian. Lebih lanjut, peneliti mengumpulkan data baik primer maupun sekunder melalui beberapa teknik seperti wawancara, dokumentasi, hingga focus group discussion. Kemudian, data-data tersebut diolah untuk diklasifikasikan sesuai sub topik dalam Bab IV.

7) Melakukan Analisa Data

Dalam tahapan ini, peneliti menggunakan bantuan kerangka konseptual diplomasi maritim Le Miere untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

8) Membuat Kesimpulan dan Laporan Penelitian

Dalam penelitian, kedua tahapan ini merupakan proses terakhir untuk selanjutnya bisa diambil kesimpulannya dari pembahasan. Selanjutnya, peneliti menuangkannya ke bentuk laporan agar bermanfaat untuk kepentingan terkait.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, hingga *focus group discussion*.

1) Wawancara

Dalam rangka menjawab rumusan masalah penelitian, peneliti memperoleh data primer melalui wawancara dengan 6 narasumber. Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui sesi tanya jawab dengan berbagai informan terkait fokus penelitian berupa pertanyaan yang diajukan⁵². Menurut Moleong, wawancara ialah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak; *interviewer* dan *interviewee*. Adapun prosedur wawancara yakni *snowball sampling*; yang mana informan pertama memberikan rujukan kepada orang lain untuk turut serta memberikan informasi kepada peneliti. Maka, terpilihnya narasumber berdasarkan kapabilitas masing-masing.

Informan pertama adalah Bapak Mayor Bakamla Riandi Yudha G., S.IP., M.Han selaku Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda. Beliau merupakan salah satu personel Bakamla RI yang mendampingi peneliti ketika magang. Sehubungan dengan itu, beliau membantu merujuk kan beberapa informan sesuai kapabilitas para personel dengan sub topik dalam pertanyaan peneliti. Misalnya, pertanyaan mengenai Pembentukan Relawan Penjaga Laut Nusantara (RAPALA) yang dapat terjawab oleh beliau. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dikirimkan melalui whatsapp dokumen pada tanggal 22 September 2022 pukul 10.15. Dan, menerima jawaban pada 23 September 2022 pukul 07.54.

Informan kedua adalah Ibu Mayor Bakamla Kustriyani, S.T., M.Eng.Sc selaku Analis Kebijakan Ahli Muda Direktorat Kerja Sama. Beliau dapat memberikan informasi terkait sub topik yang meliputi: Maritime Security Dekstop

⁵² Khusairi Ramadhan, "Strategi Gastrodiplomasi Indonesia Di Perancis Tahun 2018-2019," *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel* (2020).

Exercise (MSDE), Asean Coast Guard Forum (ACF), Indian Ocean Rim Association (IORA), Asean Regional Forum (ARF), Kehadiran Bakamla RI dan TNI AL di Perairan Natuna. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dikirimkan melalui whatsapp dokumen pada tanggal 22 September 2022 pukul 10.15. Dan, menerima jawaban pada 27-29 September 2022 pukul 15.09 dan 13.27.

Informan ketiga adalah Bapak Lettu Bakamla Agis Anshari Faila, S.E. selaku Analis SDM Aparatur Ahli Muda. Beliau dapat memberikan informasi terkait sub topik Pertukaran Personel sekaligus Program Pendidikan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dikirimkan melalui whatsapp dokumen pada tanggal 22 September 2022 pukul 10.15. Dan, menerima jawaban pada 28 September 2022 pukul 10.16.

Informan keempat adalah Bapak Mayor Bakamla Prabu Airlangga, S.Kom. selaku Kepala Seksi Operasi Keamanan Laut. Beliau dapat memberikan informasi terkait sub topik Pelaksanaan Port Visit ke Port Blair, India. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dikirimkan melalui whatsapp dokumen pada tanggal 22 September 2022 pukul 10.15. Dan, menerima jawaban pada 29 September 2022 pukul 15.03.

Informan kelima adalah Bapak Mayor Bakamla Muhamad Azhari, S.H., M.H. selaku Analis Hukum Ahli Muda. Beliau dapat memberikan informasi terkait sub topik Penguatan Regulasi Instansi. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dikirimkan melalui whatsapp dokumen pada tanggal 22 September 2022 pukul 10.15. Dan, menerima jawaban pada pukul 15.42

Informan keenam adalah Bapak Mayor Bakamla Angga Heriyana, S.T. selaku Kepala Seksi Perencanaan Latihan Operasi Laut. Beliau dapat memberikan informasi terkait sub topik Mengadakan Latihan dan Operasi Bersama dengan Coast Guard Lain. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dikirimkan melalui whatsapp dokumen pada tanggal 22 September 2022 pukul 10.15. Dan, menerima jawaban pada 30 September 2022 pukul 15.38

2) Dokumentasi

Selain wawancara, peneliti juga mengumpulkan data melalui teknik dokumentasi. Menurut Hamidi, teknik dokumentasi merupakan metode yang menghasilkan sebuah informasi dari organisasi, instansi, ataupun perseorangan. Lebih lanjut, Sugiyono menyatakan bahwa dokumentasi dapat berupa gambar, tulisan, atau karya monumental⁵³. Jadi, peneliti menggunakan teknik ini untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dari berbagai sumber media online ataupun cetak.

3) Focus Group Discussion

Selain dokumentasi dan wawancara, peneliti juga memperoleh data melalui FGD. Menurut Hollander, Duggleby, dan Lehoux et al FGD ialah metode untuk mendapatkan informasi melalui interaksi dari sekelompok individu tersebut yang saling memengaruhi⁵⁴. Diskusi kelompok terfokus yang diselenggarakan oleh DPD RI dan Universitas Pertahanan RI ini berjudul Urgensi Penguatan Penegakan

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=uUIIujUAAAAJ&citation_for_view=uUIIujUAAAAJ:9yKSN-GCB0IC.

⁵⁴ Yati Afiyanti, "Lembar Metodologi Focus Group Discussion (Diskusi Kelompok Terfokus) Sebagai Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif," n.d.

Hukum dalam Undang-Undang Kelautan. Penguatan regulasi tersebut, erat kaitannya dengan menata tata kelola keamanan laut; yang menjadi bagian sub pembahasan penelitian.

F. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data adalah serangkaian proses dalam menyusun data secara sistematis agar dapat menjawab rumusan masalah. Adapun, peneliti merujuk pada model interaktif oleh Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman, analisa data kualitatif dilaksanakan secara interaktif dan kontinu di setiap tahapan penelitian hingga tuntas⁵⁵. Berikut merupakan tahapannya,

1) Reduksi Data/*Data Reduction*

Dalam sesi ini, peneliti memilah; menyederhanakan; sampai mengabstrakkan data awal yang diperoleh. Proses penyeleksian menjadi penting karena dapat memperoleh data yang sebenarnya dibutuhkan.

2) Penyajian Data/*Data Display*

Tahapan ini, peneliti melakukan penyajian data yang telah tereduksi melalui bentuk sajian uraian singkat, bagan, tabel, maupun yang lainnya. Dengan menampilkannya, akan memudahkan untuk memahami tentang persoalan terkait.

3) Verifikasi/*Verification*

⁵⁵ Endang Widi, *Teori Dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R & D* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=Fx0mEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA152&dq=teori+dan+praktik+penelitian+kuantitatif+kualitatif+prof+endang+widi+winarni&ots=XRI39z350N&sig=qYKso_ZzJIBBpteKvD3cySkXX64&redir_esc=y#v=onepage&q=teori dan praktik penelitian.

Pada tingkatan ini, perolehan data oleh peneliti dapat teruji realitas beserta kecocokannya dengan kebutuhan data sehingga mampu menjawab rumusan masalah sekaligus mampu untuk menarik kesimpulan.

G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk memeriksa keabsahan data, peneliti melakukan telaah lebih dalam kembali secara berkesinambungan terkait penentuan topiknya, periodenya, aktornya, peran dari aktornya, penerapan kerangka konseptual Le Miere yaitu diplomasi maritim, hingga mengklasifikasikan peran aktor tersebut. Pengamatan yang bertahap ini dilakukan semenjak peneliti mulai magang di Bakamla RI bulan November 2021. Selain melakukan pengamatan, peneliti juga berdiskusi dengan beberapa pihak terkait yang relevan akan keahlian dan pengetahuan, seperti dosen pembimbing, dosen universitas, dan mahasiswa lainnya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISA DATA

Setelah memaparkan terkait kerangka konseptual pada bagian Bab II, dan menjelaskan mengenai metode penelitian di Bab III. Bab ini, akan dijelaskan tentang berbagai data yang relevan dengan topik penelitian.

A. Diplomasi Maritim Indonesia dalam Mewujudkan Visi Poros Maritim Dunia

Secara historis, isu kemaritiman telah lama menjadi perhatian sekaligus perjuangan diplomasi Indonesia⁵⁶. Apabila ditelisik, perjuangan tersebut diawali ketika hadirnya pengakuan internasional atas konsepsi negara kepulauan Indonesia melalui Konvensi PBB tentang UNCLOS 1982 yang merupakan keberhasilan monumental dari diplomasi maritim. Oleh karenanya, diplomasi maritim menjadi bagian integral diplomasi Indonesia. Terlebih, di masa pemerintahan Joko Widodo yang memprioritaskan aspek maritim melalui sinyal penetapan visi Poros Maritim Dunia.

Dalam mencapai visi Poros Maritim Dunia, pemerintah menetapkan Perpres Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia sebagai pedoman untuk mempercepat implementasi PMD hingga menetapkan buku putih diplomasi maritim berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 128 Tahun 2019. Adapun menurut Kementerian Luar Negeri, kebijakan kelautan tersebut telah diintegrasikan dengan kebijakan politik luar negeri melalui diplomasi

⁵⁶ June K Hadiningrat, "Diplomasi Maritim: Meletakkan Fondasi Poros Maritim Dunia," *Jurnal Maritim Indonesia* | Juni 8, no. 1 (2020): 98–109.

maritim. Diplomasi maritim dapat dioperasionalkan melalui tiga dimensi yakni dimensi kedaulatan, keamanan, dan kesejahteraan⁵⁷. Melalui penelitian ini, akan membahas terkait diplomasi dalam dimensi keamanan; mengingat adanya keterkaitan antara aspek gagasan poros maritim dengan keamanan maritim. Seperti yang telah dijelaskan dalam bab latar belakang, bahwasanya kondisi keamanan maritim Indonesia sangat rentan. Sedangkan, untuk mencapai kebijakan poros maritim; membutuhkan stabilitas keamanan. Maka, pemerintah melakukan beberapa upaya diantaranya sebagai berikut;

a) Ditinjau secara Kooperatif

Menurut kacamata Le Miere, bentuk kooperatif dicirikan dengan mengedepankan unsur kerja sama. Urgensi kerja sama juga di justifikasi oleh pernyataan Sekretaris Jenderal PBB tahun 2008 yang menyatakan bahwa keamanan maritim merupakan tanggung jawab bersama sehingga dibutuhkan *collective security*⁵⁸. Pentingnya koordinasi atau interaksi satu sama lain juga disadari dan dilakukan Indonesia di tingkatan bilateral. Pada tingkatan bilateral, Indonesia menjalankan kerja sama berdasarkan kedekatan geopolitik sekaligus kesamaan kepentingan. Adapun, pertimbangan tersebut pada hakikatnya melalui proses mengidentifikasi kepentingan maritim hingga mencocokkannya dengan kebutuhan kerja sama maritim nasional oleh Perwakilan RI. Menurut BPPK Kemlu, mitra prioritas Indonesia meliputi Amerika Serikat, Jepang, Australia, India, Korea

⁵⁷ Cassidy et al., "Diplomasi Poros Maritim: Keamanan Maritim Dalam Perspektif Politik Luar Negeri."

⁵⁸ Christian Bueger, "What Is Maritime Security?," *Forthcoming in Marine Policy, Cardiff University*, 2015, <http://bueger.info/wp-content/uploads/2014/12/Bueger-2014-What-is-Maritime-Security-final.pdf>.

Selatan, Tiongkok, Inggris, Norwegia⁵⁹. Berikut adalah hasil penelusuran oleh peneliti dalam mendeskripsikan proses diplomasi maritim Indonesia dengan 8 mitra kerja samanya;

Pertama, jalinan kerja sama dengan Amerika Serikat dalam bidang kemaritiman masih terus berkembang. Hal ini ditandai dengan adanya kesamaan kepentingan yaitu mempromosikan pembangunan berkelanjutan pada sektor kelautan dan melindungi lautan. Dari kepentingan yang sama, mendorong adanya bentuk komunikasi strategis yang digambarkan melalui kunjungan yang dilakukan oleh Joko Widodo tahun 2015 untuk mengintensifkan kemitraan komprehensif keduanya, sekaligus mendalami atas bidang ekonomi dan pertahanan. Terlebih lagi, dalam 5 aspek yang disoroti salah satunya yakni keamanan-pertahanan, dan isu kemaritiman⁶⁰. Perhatian yang dicurahkan terhadap isu keamanan maritim melahirkan pernyataan bersama sekaligus nota kesepahaman yang memuat tentang keamanan maritim, ekonomi maritim, sumber daya kelautan, konservasi, dan pengelolaan perikanan, navigasi dan keselamatan, ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan, hingga program lain yang disepakati bersama. Tentu saja, hal ini akan dikembangkan kepada instansi terkait dan pelaksanaannya dimonitor oleh *focal point*⁶¹. Berdasarkan Plan of Action on Maritime Cooperation 2016-2020, kedua negara akan melaksanakan 7 hal yakni: keamanan maritim, dialog hukum laut dan

⁵⁹ Cassidy et al., "Diplomasi Poros Maritim: Keamanan Maritim Dalam Perspektif Politik Luar Negeri."

⁶⁰ Prashanth Parameswaran, "Exclusive: US, Indonesia to Strengthen Partnership During Jokowi Visit – The Diplomat," 2015, <https://thediplomat.com/2015/10/exclusive-what-to-expect-in-us-indonesia-relations-during-jokowis-visit/>.

⁶¹ "Memorandum of Understanding on Maritime Cooperation between Government of the Republic of Indonesia and Government of the United States of America," accessed January 1, 2023, <https://treaty.kemlu.go.id/apisearch/pdf?filename=USA-2015-0345.pdf>.

kebijakan maritim, ekonomi maritim, konservasi dan pengelolaan sumber daya kelautan-perikanan, keselamatan dan navigasi maritim, ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan, dan program-program lainnya yang disepakati. Pada aspek keamanan maritim, dengan jelas mencantumkan bahwa Bakamla RI dan US Coast Guard akan meningkatkan kerja samanya untuk penegakan hukum di laut dan sebagainya⁶². Pada akhirnya di tahun 2017, rencana kerja kedua instansi telah resmi ditanda tangani.

Kedua, kemitraan antara Indonesia dengan Jepang dalam aspek keamanan maritim. Mengingat bahwasanya kedua negara memiliki kesamaan yang menegaskan bahwa kedudukan laut di bawah supremasi hukum sekaligus terbuka untuk semua individu; sebagaimana Jepang dengan konsepnya Free and Open Indo-Pacific sedangkan Indonesia dengan promosi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific⁶³. Dari kesamaan tersebut mendorong adanya interaksi strategis keduanya dalam sebuah wadah yakni Indonesia-Japan Maritime Forum (IJMF). Pembentukan forum ini merupakan inisiatif Indonesia yang bermula dari agenda kunjungan Joko Widodo ke Jepang dan Tiongkok pada bulan Maret 2015. Ketika beliau bertemu dengan Perdana Menteri Shinzo Abe terbentuklah kesepakatan dalam beberapa aspek diantaranya pertahanan, keamanan, hingga ekonomi dan industri⁶⁴. Lebih lanjut, terjadi pertemuan kembali dalam rangka kunjungan kerja oleh Menteri

⁶² “Exchange of Note between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United States of America (Diplomatic Note from USA No.001906 Dated 14 October 2016 and Diplomatik Note from Indonesia No.D/02915/10/2016/36 Dated 18 October 201” (n.d.), <https://treaty.kemlu.go.id/apisearch/pdf?filename=USA-2016-0352.pdf>.

⁶³ “Kemungkinan Seluas Lautan-Kanasugi Kenji, Duta Besar Jepang Untuk Indonesia,” accessed December 29, 2022, https://www.id.emb-japan.go.jp/about_id_amb_kompas2021_3.html.

⁶⁴ Humas, “Sekretariat Kabinet Republik Indonesia | Disambut Udara Dingin, Presiden Jokowi Tiba Di Tokyo Untuk Kunjungan Kenegaraan,” accessed January 3, 2023, <https://setkab.go.id/disambut-udara-dingin-presiden-jokowi-tiba-di-tokyo-untuk-kunjungan-kenegaraan/>.

Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dengan Menteri Luar Negeri Jepang Fumio Kishida pada bulan Desember 2016. Akhirnya, kedua negara menyepakati pembentukan forum IJMF dengan menandatangani *Memorandum of Cooperation to Establish Indonesia-Japan Maritime Forum*. Dengan begitu, terdapat aksi konkrit dalam membangun kerja sama kemaritiman keduanya untuk mewujudkan stabilitas keamanan di kawasan; terlebih lagi dari hubungan mitra tersebut menjadi permulaan dalam meningkatkan kerja sama antara Bakamla RI dan Japan Coast Guard. Peningkatan kerja sama ini ditandai dengan adanya pembentukan forum IJMF yang kemudian ditindak lanjuti melalui pertemuan kedua instansi untuk membahas *memorandum of cooperation* pada Bulan Maret 2019⁶⁵. Lebih lanjut, di bulan Juni secara resmi ditanda tangani kesepakatan tersebut.

Ketiga, kerja sama antara Indonesia dan Australia di lingkup maritim. Hubungan keduanya telah lama terjalin dan semakin ditingkatkan, terutama pada masa pemerintahan Joko Widodo yang memfokuskan kemaritiman. Merujuk pada kepentingan yang sama, sebagaimana penuturan Menteri Luar Negeri Julie Bishop bahwasanya Australia dan Indonesia merupakan mitra maritim alami yang berbagi salah satu batas maritim terpanjang di dunia; sekaligus mempunyai keamanan dan ekonomi maritim yang luas-saling melengkapi⁶⁶. Kesamaan ini lah yang

⁶⁵ Admin, "Bakamla RI - Japan Coast Guard Tingkatkan Kerja Sama Bilateral Keamanan Maritim | WEBSITE TENTARA NASIONAL INDONESIA," accessed January 3, 2023, <https://tni.mil.id/view-147872-bakamla-ri-japan-coast-guard-tingkatkan-kerja-sama-bilateral-keamanan-maritim.html>.

⁶⁶ Sakina Diah, "Indonesia-Australia Sepakati Kerja Sama Maritim," accessed January 4, 2023, <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/16/171711526/indonesia-australia-sepakati-kerja-sama-maritim>.

mendorong adanya interaksi strategis keduanya melalui pejabat tinggi negara hingga mengkoordinasikan suatu hal dalam rangka meningkatkan keamanan kawasan. Adapun interaksi strategis tersebut digambarkan melalui tiga pertemuan di tahun 2016. Pertemuan pertama, Dialog Indonesia-Australia Ketiga pada bulan Agustus di Yogyakarta; pertemuan kedua, Dialog 2+2 Keempat pada bulan Oktober di Bali; dan pertemuan ketiga, yakni kunjungan Presiden Joko Widodo ke Australia di bulan November sebagai pertanda dalam menguatkan kerja sama strategis antar dua negara⁶⁷. Adapun pertemuan itu, mendiskusikan langkah-langkah praktis untuk mendalami dan memperkuat kolaborasi maritim seperti halnya menyelenggarakan agenda patroli terkoordinasi di tahun 2016 antara Bakamla RI dan Australian Border Force (ABF). Tidak sampai disitu saja, di tahun 2017 Bakamla RI melakukan pertemuan dengan Komisioner ABF di Canberra untuk mendiskusikan terkait implementasi poin-poin kerja sama sekaligus prospek kerja sama lainnya ke depan⁶⁸. Interaksi keduanya semakin menguat pada bulan Maret tahun 2018 ketika rencana kerja/*plan of action* telah di tanda tangani.

Keempat, kemitraan antara Indonesia dan India pada lingkup kemaritiman. Mengingat hubungan strategis ini adalah sahabat lama di kawasan maupun global seperti yang dinyatakan oleh Ibu Retno Marsudi selaku Menteri Luar Negeri. Terlebih lagi, kedua negara mempunyai kesamaan kepentingan; dimana India dengan konsep *Security and Growth for All Region* (SAGAR) sementara Indonesia

⁶⁷ Kementerian Luar Negeri Indonesia, "Forum Regional Asean Arf | Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia," 2019, https://kemlu.go.id/portal/id/read/126/halaman_list_lainnya/forum-regional-asean-arf.

⁶⁸ Admin, "Bilateral Meeting Bakamla Dan ABF Di Australia | WEBSITE TENTARA NASIONAL INDONESIA," accessed January 5, 2023, <https://tni.mil.id/view-112124-bilateral-meeting-bakamla-dan-abf-di-australia.html>.

dengan Poros Maritim Dunia (PMD). Adapun SAGAR sendiri ialah artikulasi visi India untuk Indo-Pasifik⁶⁹, sederhananya adalah bagaimana India membangun *engagement* di kawasan tersebut. Dalam konsepnya, terdapat komponen yang menggaris bawahi terkait perwujudan aksi kolektif untuk mengatasi beragam ancaman maritim. Keseriusan ini tertuangkan dalam *Shared Vision of India-Indonesia Maritime Cooperation in the Indo Pacific* yang ditindak lanjuti melalui perkembangan konektivitas Aceh dan Andaman-Nicobar. Lebih lanjut, terdapat dua pertemuan yang menggambarkan interaksi strategis keduanya untuk melanjutkan diskusi hal tersebut yakni yang pertama ketika PM Narendra Modi melakukan kunjungan di Istana Merdeka tahun 2018. Yang kedua, lawatan Y.M. Dr. Subrahmanyam di Gedung Pancasila dan bertemu Menteri Luar Negeri tahun 2019⁷⁰. Dari kedua aktivitas, melahirkan kerja sama pertahanan dengan menerapkan latihan bersama secara berkala oleh angkatan laut, penjaga pantai, dan angkatan udara⁷¹. Terlebih, menyepakati penyelenggaraan *Joint Task Force Indonesia-India* hingga memproduksi kendaraan militer antara Tata Motors dan PT Pindad. Sebagaimana mengingat adanya komitmen di atas, Bakamla RI mengadakan kunjungan kerja alias melaksanakan *high level meeting* dengan Indian

⁶⁹ Irwan Sinaga et al., "Connecting the Connectivity in the Indo-Pacific: Indian Ocean and Rim Chapter," 2019, <https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9LYWppYW41MjBCUFBLl1AzSzlIMjBBU1BBU0FGLzIwX0Nvbm5lY3RpbmclMjB0aGUIMjBjb25uZW50aXZpdHklMjBpbiUyMHRoZSUyMEluZG8tUGFjaWZpYy5wZGY=>.

⁷⁰ "Indonesia India Dorong Kerja Sama Ekonomi Dan Maritim | Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia," accessed December 29, 2022, <https://kemlu.go.id/portal/id/read/579/berita/indonesia-india-dorong-kerja-sama-ekonomi-dan-maritim>.

⁷¹ Biren Nanda, "India and Indonesia Affirm a Shared Vision of Maritime Cooperation in the Indo-Pacific" III, no. 8 (2018): 1-4, https://www.delhipolicygroup.org/uploads_dpg/publication_file/india-and-indonesia-affirm-a-shared-vision-of-maritime-cooperation-in-the-indo-pacific-1100.pdf.

Coast Guard. Pada perkembangannya, interaksi semakin menguat yang dapat diisyaratkan melalui kegiatan kunjungan pelabuhan di tahun 2019 sekaligus terbentuknya nota kesepahaman kedua pihak tahun 2020.

Kelima, kerja sama antara Indonesia dan Korea Selatan di bidang kemaritiman. Kemitraan strategis keduanya semakin meningkat; sebagaimana adanya kesamaan kepentingan yaitu Korea Selatan dengan *New Southern Policy* (NSP) dan Indonesia dengan Poros Maritim Dunia. Rasionalisasi nya terletak pada tiga visi kebijakan NSP, terutama *a community of peace* yang artinya ditujukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan damai di kawasan. Dalam *Annex*, aspek *peace* menitikberatkan peningkatan kerja sama keamanan non tradisional maupun isu transnasional⁷². Lebih lanjut, kerja sama pertahanan-keamanan melalui interaksi strategis keduanya dapat ditunjukkan melalui sejumlah kunjungan penting diantaranya: kunjungan Presiden Joko Widodo ke Seoul tahun 2016, lalu Presiden Moon Jae In ke Indonesia tahun 2017, hingga kunjungan PM Lee Nak Yon bulan Agustus 2018, dan sebagainya. Proses interaksi tersebut menghasilkan pernyataan bersama yakni *Joint Vision Statement for Co-Prosperity and Peace*; dimana terdapat penegasan kerja sama maritim. Adapun hasil konkritnya, tidak hanya dalam kolaborasi industri pertahanan seperti transfer teknologi sekaligus pembuatan kapal selam antara PT PAL dan DMSE Korea Selatan⁷³. Akan tetapi

⁷² Min-Hua Chiang, "SOUTH KOREA'S NEW SOUTHERN POLICY: MOTIVATIONS, IMPLEMENTATIONS AND IMPLICATIONS," accessed January 9, 2023, <https://research.nus.edu.sg/eai/wp-content/uploads/sites/2/2020/12/EAIBB-No.-1525-South-Koreas-new-southern-policy-2.pdf>.

⁷³ Faris Al-Fadhat and Naufal Nur Aziz Effendi, "Kerjasama Pertahanan Indonesia-Korea Selatan: Kedaulatan Maritim Dan Transfer Teknologi Dalam Pengadaan Kapal Selam DSME 209/1400," *Jurnal Ketahanan Nasional* 25, no. 3 (December 30, 2019): 373–92, <https://jurnal.ugm.ac.id/jkn/article/view/48822>.

juga, memengaruhi eratnya interaksi antara Bakamla RI dan Korea Coast Guard yang ditandai dengan terbentuknya kesepahaman kedua instansi pada tahun 2018.

Keenam, kemitraan Indonesia-Tiongkok yang semakin erat. Rasionalisasinya terletak pada kesamaan kepentingannya yakni Tiongkok dengan jalur sutra maritim dan Indonesia dengan poros maritim. Sebagaimana yang diketahui, interaksi strategis kedua negara oleh pemangku kepentingan maupun pejabat tinggi menunjukkan hubungan kemitraan. Pada tahun 2015, Joko Widodo melaksanakan kunjungan ke Tiongkok sekaligus menyatakan adanya pernyataan bersama mengenai penguatan kemitraan strategis komprehensif kedua negara⁷⁴. Lalu, di tahun 2017 wakil PM Liu Yandong mengadakan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo; dan menegaskan bahwasanya presiden kedua negara telah melalui banyak konferensi serta kesepakatan. Salah satunya, yakni terkait keamanan maritim dimana Tiongkok menaruh minatnya pada *indonesian coast guard* selaku garda terdepan dan koordinator dalam pertahanan maritim⁷⁵. Seperti yang diketahui, Tiongkok dengan Indonesia membentuk nota kesepahaman terkait penguatan kerja sama maritim lagi di tahun 2021. Lebih lanjut, di tahun 2022 terjadi pertemuan antara Bakamla RI dan *China Coast Guard* guna menindaklanjuti kolaborasi ini.

⁷⁴ Evi Fitriani, "Linking the Impacts of Perception, Domestic Politics, Economic Engagements, and the International Environment on Bilateral Relations between Indonesia and China in the Onset of the 21st Century," *Journal of Contemporary East Asia Studies* 10, no. 2 (2021): 183–202, <https://doi.org/10.1080/24761028.2021.1955437>.

⁷⁵ Yuliannova Lestari et al., "Security Cooperation between China and Indonesia to Address Maritime Security Threats," *Open Journal of Political Science* 12, no. 04 (2022): 534–55, <https://doi.org/10.4236/ojps.2022.124030>.

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya dalam mewujudkan visi poros maritim dunia; upaya diplomasi maritim pemerintah Indonesia secara kooperatif ditunjukkan melalui kerja sama bilateral dengan sejumlah negara melalui proses interaksi strategis antar pemangku kebijakan atau bisa disebut juga *high level maritime strategic interactions* sehingga menghasilkan kesepakatan diantara keduanya untuk selanjutnya diimplementasikan. Terlebih lagi, posisi Bakamla RI sendiri sebagai aktor penting dalam aspek kerja sama maritim; dimana seiring dengan terbentuknya kesepakatan tersebut juga menguatkan interaksi dengan *coast guard* lainnya.

b) Ditinjau secara Persuasif

Melalui sudut pandang Le Miere, bentuk persuasif yang dimaksud ialah *showing the flag*; dimana negara akan menggunakan kekuatan maritimnya dalam rangka memberikan sinyal atas kemampuan maupun eksistensi mereka. Indonesia sebagai negara maritim yang memiliki visi poros maritim dunia menegaskan keberadaannya melalui bentuk ini, diantaranya mengadakan pelayaran internasional atau disebut Operasi Kartika Jala Krida oleh TNI AL, keikutsertaan dalam forum-forum internasional, hingga penegakan hukum di laut melalui kebijakan penenggelaman kapal ikan asing. Berikut adalah pemaparan dari ketiga aktivitasnya:

Pertama, Operasi Kartika Jala Krida atau yang lebih dikenal dengan pelayaran internasional oleh TNI AL teridentifikasi sebagai diplomasi maritim persuasif. Faktor yang melatarbelakangi ialah aktivitas ini menunjukkan adanya dorongan untuk mempromosikan budaya sekaligus citra Indonesia di panggung

internasional. Sebagaimana yang telah disebutkan, bahwa pelayaran kartika merupakan latihan penting bagi para taruna AAL dalam menumbuhkan semangat bahari dan kebanggaan Indonesia sebagai bangsa maritim yang kuat dan dihormati⁷⁶. Menurut data yang tercatat, aktivitas ini telah berlangsung sebanyak 2 kali di tahun 1964 dan 2012 dengan menggunakan KRI Dewa Ruci; sementara KRI Bima Suci di tahun 2022⁷⁷. Dalam acara tersebut, terdapat poin utama yang perlu di garis bawahi yaitu tahapan *open ship* yang merupakan kegiatan mengundang atau mempersilahkan tamu untuk mengunjungi/menaiki kapal sehingga adanya proses komunikasi dua arah yang melambangkan bentuk pendekatan untuk memperkenalkan/mem-branding kepada khalayak.

Kedua, keikutsertaan dalam forum internasional ialah salah satu bentuk diplomasi persuasif berdasarkan Le Miere. Rasionalisasi tersebut bertumpu pada, *pertama*, terindikasi adanya kehadiran Indonesia di arena internasional; *kedua*, aktivitas ini tergolong dalam kerja sama multilateral dengan tingkat kolaborasi di bawah kerja sama bilateral; sehingga tergolong bentuk persuasif. Sehubungan dengan itu, Indonesia menitikberatkan pada keterlibatannya dalam berbagai forum tentang isu kejahatan transnasional di laut. Tercatat bahwa, pemerintah berperan aktif di *International Maritime Organization (IMO)*, *United Nations Office on Drugs and Crime (UNDOC)*, dan *Bali Process*. Peran aktif yang dapat digambarkan diantaranya: terpilih menduduki posisi strategis dalam keanggotaan IMO sebagai

⁷⁶ “Info Historia Buletin Kesejarahan TNI AL-Edisi Khusus HUT Ke-73 TNI AL,” 2018, www.tnial.mil.id.

⁷⁷ “Bawa Misi Diplomasi Bangsa, KRI Bima Suci Berlabuh Di Kota Kinabalu,” accessed January 1, 2023, <https://kemlu.go.id/kotakinabalu/id/news/20258/bawa-misi-diplomasi-bangsa-kri-bima-suci-berlabuh-di-kota-kinabalu>.

Dewan C yang artinya menjadi perwakilan untuk negara-negara dengan geografis utama di dunia dalam kepentingan khusus untuk transportasi laut maupun navigasi⁷⁸. Mengingat kembali, kepentingan Indonesia dalam meningkatkan perlindungan atas kelamatan maritim untuk menentukan arah transportasi laut, sehingga Kementerian Perhubungan mengajukan proposal *Traffic Separation Scheme (TSS)* ke IMO pada Sidang *Maritime Safety Committee* tahun 2019; dan telah disetujui. Adapun proposal tersebut ditujukan untuk penetapan 2 Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) sehingga kapal-kapal dapat melintasi wilayah maritim Indonesia melalui Selat Sunda dan Selat Lombok⁷⁹. Peran aktif lainnya, yakni terlibat sebagai *observer* dalam *Commission on Crime Prevention and Criminal Justice (CCPCJ)* ke-25 di Vienna Tahun 2016 melalui pengiriman 22 delegasi yang diketuai Menteri Kelautan dan Perikanan⁸⁰. Dalam diskusi, Indonesia menegaskan lagi terkait IUU Fishing termasuk kejahatan transnasional yang mempunyai dampak internasional sehingga membutuhkan peran kerja sama global. Selain menjadi *observer*, Indonesia juga mengadakan *high level event transnational organized fisheries crime* bersama UNODC dan Norwegia. Dalam pertemuan itu, Menteri Kelautan dan Perikanan memaparkan sejumlah persoalan terkait tindak ilegal ini meliputi kerangka hukumnya, kasusnya, hingga penanganannya. Selain

⁷⁸ International Maritime Organization, "Council Members," accessed January 2, 2023, <https://www.imo.org/en/OurWork/ERO/Pages/Council-Members.aspx>.

⁷⁹ E Samangun, "Dampak Terpilihnya Kembali Indonesia Sebagai Anggota Dewan International Maritime Organization (IMO) Kategori-C Terhadap Sektor Keselamatan Maritim Di Indonesia," 2019, https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/1922/%0Ahttps://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/1922/13/Unikom_Emiliana_Samangun_Jurnal_Skripsi.pdf.

⁸⁰ Distr : Limited and Wolfgang Brandstetter, "Economic and Social Council Commission on Crime Prevention and Criminal Justice LIST OF PARTICIPANTS States Members of the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice AUSTRIA," 2016.

itu, pemerintah juga menyelenggarakan pertemuan tingkat menteri yaitu *Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime* tahun 2016 di Bali. Yang kemudian, dari interaksi bersama tersebut menghasilkan 2 dokumen: *Bali Declaration on People Smuggling, Human Trafficking and Related Transnational Crime* dan *Co-Chairs Statement*. Dengan begitu, pada praktiknya telah menandakan bahwa pemerintah Indonesia hadir di lingkup internasional.

Ketiga, penegakan hukum di laut melalui kebijakan penenggelaman kapal ikan asing, menjadi salah satu bentuk diplomasi persuasif. Rasionalisasinya terletak pada aktivitas ini yang menunjukkan bahwa untuk mewujudkan visi poros maritim dunia; tantangan yang dihadapi Indonesia adalah bagaimana menegakkan hukum di laut sebagaimana ancaman maritim yakni *IUU Fishing* kerap kali terjadi. Menurut data yang tercatat, kerugian akibat tindak ilegal tersebut setidaknya 300 triliun rupiah per tahun⁸¹. Sehubungan dengan itu, Menteri Susi Pudjiastuti mencetuskan kebijakan pembakaran, penenggelaman kapal ketika telah disita pengadilan sekaligus terbukti melakukan tindak pelanggaran tersebut. Berdasarkan notulensi Kemlu RI, terdapat 544 penangkapan nelayan asing yang terbukti melakukan illegal fishing pada 16 dan 17 November 2014 di perairan Kalimantan. Kemudian, pada Desember 2014 terjadi 3 kali penenggelaman kapal oleh TNI AL, Polair, ; yang pertama yakni 3 kapal Vietnam di perairan Natuna; 3 kapal Filipina

⁸¹ Hertria Maharani Putri, Radityo Pramoda, and Maulana Firdaus, "Kebijakan Penenggelaman Kapal Pencuri Ikan Di Wilayah Perairan Indonesia Dalam Perspektif Hukum," *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan* 7, no. 2 (2018): 91, <https://doi.org/10.15578/jksekp.v7i2.6095>.

di perairan Talaud; 2 kapal asal Thailand berbendera Papua Nugini di perairan Ambon. Kemudian, pada Maret 2015 terjadi 2 kali peledakan dan penenggelaman yakni 3 kapal Filipina di perairan Sorong dan 2 kapal Malaysia. Bahkan, tindakan keras diperlihatkan oleh Menteri KKP Susi Pudjiastuti pada Hari Kebangkitan Nasional melalui peledakan 41 kapal asing yang telah melalui proses pengadilan⁸². Beberapa aksi tersebut telah menyuratkan bahwa pemerintah Indonesia itu hadir di wilayah perairan maupun yurisdiksi untuk melindungi kepentingan nasionalnya. Sebagaimana, sikap tegas tersebut membuktikan atas kesungguhannya yang *concern* terhadap potensi ancaman keamanan maritim.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya aksi persuasif Indonesia yang dimaknai sebagai bentuk kehadirannya di panggung internasional teridentifikasi dilakukan oleh beberapa pihak seperti pemangku kebijakan salah satu kementerian dan juga TNI AL melalui beberapa aktivitas di atas. Adapun keikutsertaan aktor lainnya juga penting seperti halnya Bakamla RI yang telah dipaparkan pada sub bab Peran Bakamla RI.

c) Ditinjau secara Koersif

Dalam penelitian, tidak teridentifikasi adanya aksi koersif yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mewujudkan visi poros maritim dunia melalui kacamata Le Miere. Sebagaimana yang disebutkan oleh Le Miere, bahwa bentuk diplomasi maritim koersif merujuk pada kesamaan pola dengan *Gunboat*

⁸² Poltak Nainggolan Partogi, "KEBIJAKAN POROS MARITIM DUNIA JOKO WIDODO DAN IMPLIKASI INTERNASIONALNYA (Maritime Axis Policy and Its International Implications)," *Politica* 6, no. N0.2 Agustus 2015 (2015): 167–90.

Diplomacy. Diplomasi kapal perang yang didefinisikan oleh James Cable menekankan adanya ancaman yang dilakukan oleh angkatan laut dengan melanggar wilayah pihak sasaran di masa damai demi meraih kepentingan. Dan, TNI AL sebagai postur militer Indonesia tidak terdeteksi melakukan tindakan tersebut demi mencapai stabilitas keamanan di laut.

Begitu pun, untuk aksi pemerintahan yang menjalankan kebijakan penenggelaman kapal ikan asing melalui kementerian kelautan dan perikanan (KKP) tidak termasuk ke dalam aktivitas koersif. Penyebabnya adalah kualifikasi secara aktor sudah tidak terpenuhi, terlebih lagi secara tindakan yang melanggar wilayah pihak sasaran juga tidak dilaksanakan oleh KKP. Artinya, dengan aksi penenggelaman kapal ikan asing tidak termasuk kriteria karena tidak melewati zona perairan negara lain; dan justru dikategorikan sebagai tindak penegakan hukum. Adapun upaya tersebut sebagai bentuk melindungi kepentingan nasional yang merujuk atas maraknya aktivitas tindak pelanggaran IUU Fishing yang merugikan negara. Maka, dapat disimpulkan bahwasanya Indonesia tidak teridentifikasi melakukan aksi koersif berdasarkan sudut pandang Le Miere.

B. Visi Poros Maritim Dunia melalui Perspektif Bakamla RI

Pada umumnya, poros maritim diketahui dan dipahami oleh publik sebagai suatu perwujudan cita-cita mengingat Indonesia merupakan negara maritim. Dalam kacamata Rizal Sukma selaku Direktur CSIS saat itu, mengungkapkan bahwa keberadaan PMD diartikan: *pertama*, visi, yakni sebuah tujuan kembali pada jati diri yang memiliki kekuatan maritim yang bersatu, sejahtera, dan berwibawa; *kedua*, doktrin yang menyadarkan masyarakat akan posisinya sebagai PMD

“Kekuatan di Antara Dua Samudra”. Dengan berlandaskan kondisi geografis, geoekonomi hingga geostrategis Indonesia ikut serta memengaruhi dinamika di Samudra Hindia-Pasifik; *ketiga*, menjadi operasional ketika diterapkan dalam agenda membangun tol laut yang berguna untuk interkoneksi antarpulau, perbaikan sarana-prasarana transportasi laut, mengembangkan industri perikanan dan perkapalan, hingga membangun keamanan maritim⁸³. Berbagai aspek tersebut tercantumkan dalam visi pemerintah pada termin pertama, sebagaimana Rizal Sukma menjadi tim sukses calon presiden-wakil presiden tahun 2014.

Gagasan PMD diimplementasikan dalam prioritas kebijakan yang berada pada visi nawacita. Prioritas tersebut meliputi: *pertama*, menguatkan keamanan maritim; *kedua*, melaksanakan ekspansi dengan diplomasi regional untuk menaungi wilayah Indo-Pasifik; *ketiga*, memproyeksikan kekuatan TNI AL sebagai kekuatan maritim di kawasan Asia Timur⁸⁴. Garis haluan ini, merefleksikan bahwa pemerintah sedang menunjukkan keinginannya untuk memperkuat stabilitas keamanan perairan dan perbatasan, terutama melindungi sumber daya laut sampai ZEE. Kesungguhannya terus berlangsung, dengan hadirnya Kebijakan Kelautan Indonesia di tahun 2017 sebagai pedoman umum pelaksanaan pembangunan kelautan yang tertuang dalam RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2015-2019. Pedoman yang berisi 7 pilar dengan 76 kebijakan utama mencakup: *pertama*, pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan sumber daya manusia yang memiliki 21 strategi utama; *kedua*, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum dan

⁸³ Rizal Sukma, “Gagasan Poros Maritim,” 2014, <https://money.kompas.com/read/2014/08/21/080000726/Gagasan.Poros.Maritim?page=all>.

⁸⁴ I. Gede Wahyu Wicaksana, *Poros Maritim Dunia*.

keselamatan di laut yang memiliki 8 strategi; *ketiga*, tata kelola dan kelembagaan di laut yang mempunyai 3 strategi; *keempat*, ekonomi, infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan yang memiliki 20 strategi; *kelima*, pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut yang mempunyai 12 strategi; *keenam*, budaya bahari yang memiliki 5 strategi; *ketujuh*, diplomasi maritim yang memiliki 7 strategi utama⁸⁵.

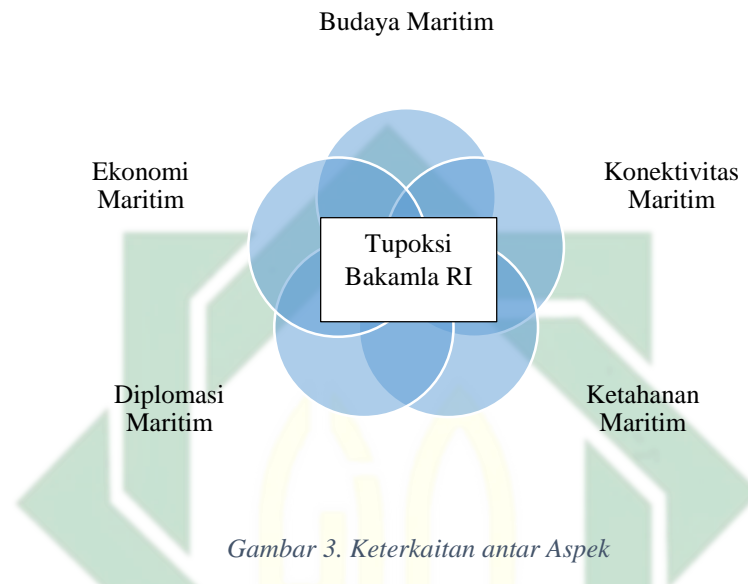
Selain adanya pedoman Kebijakan Kelautan Indonesia, pemerintah juga membentuk Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim) dan instansi Bakamla RI tahun 2014. Perlu diketahui, Bakamla RI sebagai sebuah lembaga yang berfokus pada penjagaan keamanan, kedaulatan, serta pelestarian laut dari ancaman eksternal ataupun internal. Sedangkan, komponen utamanya dalam mencapai poros maritim yakni membangun pertahanan, keamanan, dan keselamatan maritim. Oleh sebab itu, peneliti dapat merasionalisasikan antara keterkaitan variabel Bakamla RI dan visi poros maritim dunia. Faktanya hal ini, selaras dengan visi; misi; tujuan; dan sasaran strategis mereka dalam road map Bakamla RI 2020-2024 yang menyebutkan bahwa penetapan visi lembaga sesuai visi pembangunan nasional yang bertujuan untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia⁸⁶.

Dalam mengimplementasikan arah kebijakan, beberapa upaya ditujukan pada aspek budaya maritim, ekonomi maritim, konektivitas maritim, ketahanan

⁸⁵ Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman RI, "Kebijakan Kelautan Indonesia."

⁸⁶ Bakamla RI, Road Map Reformasi Birokrasi Badan Keamanan Laut Republik Indonesia 2020-2024.

maritim, hingga diplomasi maritim⁸⁷. Beberapa unsur tersebut sebenarnya saling berkaitan satu sama lain dengan apa yang menjadi tupoksi Bakamla RI.



Gambar 3. Keterkaitan antar Aspek

Sumber: Diolah oleh Peneliti Berdasarkan Road Map Bakamla RI 2020-2024

Tupoksi instansi yang menjadi titik sentral diantara beberapa unsur dilandasi pada keterkaitannya secara langsung dengan aspek keamanan dan keselamatan maritim. Sementara, untuk beberapa unsur saling beririsan didasari oleh kesimpulan; dimana dalam pelaksanaannya tertuju kepada “kerja sama antar aktor” sekaligus “menanggulangi ancaman keamanan demi visi poros maritim dunia”. Misalnya, pembentukan relawan penjaga laut nusantara (RAPALA) yang merupakan salah satu upaya instansi dalam menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan. Secara garis besar, agenda ini tergolong ketiga unsur di atas yakni budaya maritim, ketahanan maritim, dan ekonomi maritim. Sama halnya, jika diamati melalui pedoman Kebijakan Kelautan Indonesia yang

⁸⁷ Bakamla RI.

mencakup pilar pertama (pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan sumber daya manusia), pilar kedua (pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut), pilar keempat (ekonomi, infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan), pilar kelima (pengelolaan ruang laut dan perlindungan laut), pilar keenam (budaya bahari). Beberapa aspek di atas dapat diketahui bersama sebagai berikut.

Berdasarkan peraturan Bakamla RI Nomor 13 Tahun 2021 terbentuklah Relawan Penjaga Laut Nusantara (RAPALA) yang didefinisikan sebagai salah satu upaya instansi dalam menjaga keamanan, keselamatan, serta perlindungan lingkungan laut di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia melalui sekelompok masyarakat yang secara sukarela membantu. Jadi, masyarakat yang berminat menjadi relawan dan berada di area pesisir akan direkrut sesuai kriteria; lalu akan menerima pembekalan seperti latihan dan operasi SAR, seminar hukum laut, dan lain-lain hingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Menurut, hasil wawancara dengan Bapak Mayor Bakamla Riandi Yudha G., S.IP., M.Han selaku Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda menyampaikan bahwa⁸⁸,

“RAPALA membantu Bakamla RI dalam mendukung sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan laut yang bertugas membantu melaksanakan pengawasan terhadap keamanan laut dengan memberikan informasi kejadian disekitar daerahnya. Selain itu RAPALA bertugas membantu melaksanakan tugas keselamatan laut yang dilakukan Bakamla

⁸⁸ Riandi Yudha, “Wawancara Dengan Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Terkait Pembentukan RAPALA,” 2022.

RI bila berada didekat lokasi kejadian. Hal ini merupakan implementasi fungsi Bakamla RI dalam memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di laut. RAPALA dalam pembentukannya dibekali dengan pelatihan SAR Dasar (Pencarian dan Pertolongan) korban kecelakaan di atas laut.”

Adapun tugas pokok dan fungsinya meliputi: *pertama*, membantu mengumpulkan, mengidentifikasi, dan melaporkan informasi; *kedua*, membantu pengembangan sumber daya manusia terkait keamanan, keselamatan, dan perlindungan laut; *ketiga*, membantu pengelolaan, pemanfaatan serta pengembangan sumber daya kelautan; *keempat*, sinergitas antara kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah terkait di bawah koordinasi Bakamla RI⁸⁹. Dari keempat fungsi, instansi telah merealisasikan 10 kegiatan diantaranya giat bersih pantai, seminar hukum laut, operasi SAR Laka Laut Pantai Grajakan, Koordinasi bersama Dinas Perikanan Desa Bengkak Wongsorejo, dan lainnya dalam kurun waktu 2020-2021.

	Tahun 2020	Tahun 2021
a.	Giati Bersih Pantai	Rakor Silaturahmi Masyarakat Maritim
b.	Forum Silaturahmi Masyarakat Maritim	Koordinasi Dinas Perikanan Desa Bengkak Wongsorejo
c.	Seminar Hukum Laut	Latihan Hukum Laut Bakamla RI
d.	Operasi SAR Laka Laut Pantai Grajakan	Operasi SAR Korban KMP Yunicee
e.	Testimoni Capaian Kinerja Bakamla RI Tahun 2020	Memasyarakatkan Protokol Kesehatan di Pelabuhan Ikan, Pasar, Daerah Pesisir

Tabel 1. Laporan Kegiatan RAPALA Periode 2020-2021

⁸⁹ Riandi Yudha Gunawan, “Paparasi Pembekalan Rapala Bakamla RI” (Jakarta, n.d.).

Sumber: Paparan Pembekalan RAPALA

Beberapa kegiatan ini diikuti oleh masyarakat pesisir yang menjadi bagian Anggota Rapala, Jajaran Bakamla RI, sekaligus kerja sama sektor terkait. Keterlibatan beberapa aktor tersebut tentu mengingatkan kembali bahwasanya sinergitas antar pihak sangat diperlukan demi mengamankan wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia. Terlebih, acara seperti di atas membantu masyarakat pesisir memahami dan melestarikan budaya maritim sesuai kearifan lokalnya. Oleh karenanya, Anggota Rapala menjadi jembatan antara instansi dan masyarakat dalam mensosialisasikan pentingnya sektor laut; sehingga pemilihan calon sukarelawan menjadi esensial. Lantas, penentuannya berdasarkan tolak ukur dari pengalaman serta profesinya, seperti: Ketua Kelompok Nelayan, Karang Taruna, Tokoh Agama, Pengusaha Perikanan, Penggiat Lingkungan Hidup, Wartawan, dan lain-lain⁹⁰.

Keikutsertaan para aktor dari berbagai kalangan serta pengalamannya, tentu berpengaruh pada kinerja/koordinasi pengawasan keamanan ataupun keselamatan di laut. Selain dipertimbangkan dari segi pengalaman dan profesi itu, penentuan lokasi baik yang strategis dan yang rawan ancaman juga berpengaruh. Ketika lokasi telah ditetapkan, maka disitulah keberadaan Komunitas Rapala. Dalam kurun setahun, sebaran komunitasnya telah mencakup 6 wilayah yang meliputi: Lampung Selatan, Sambas, Banyuwangi, Natuna, Karimun, dan Bali. Berikut merupakan peta sebarannya,

⁹⁰ Yudha, "Wawancara Dengan Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Terkait Pembentukan RAPALA."



Gambar 4. Peta Sebaran Relawan Penjaga Laut Nusantara

Sumber: Power Point Pembekalan Rapala oleh Bapak Mayor Riandi

Dengan demikian, pembentukan RAPALA menjadi salah satu upaya instansi dalam mewujudkan visi poros maritim dunia. Dengan terbentuknya hal tersebut, mengartikan komitmen Bakamla RI selaku lembaga yang berwenang di laut membangun postur keamanan laut semakin baik melalui peningkatan kinerja secara terpadu.

C. **Dinamika Bakamla RI dalam Tata Kelola Keamanan Maritim**

Realitanya, keberadaan Bakamla RI bukan satu-satunya instansi yang berwenang di laut. Tata kelola keamanan laut Indonesia terdiri dari Dirjen PSDKP, Satgas 115, Dirjen Hubla, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Imigrasi, TNI AL, Polair, dan Bakamla RI. Dari 8 lembaga, 6 diantaranya memiliki armada patroli yakni TNI AL,

PSDKP, Bea Cukai, Polair, Hubla, dan Bakamla RI⁹¹. Tidak hanya itu, terdapat 24 UU tumpang tindih sebagai penindak hukum. Akibatnya, terjadi ambiguitas penanggung jawab keamanan maritim, ditambah adanya pemeriksaan berulang oleh kapal patroli yang berbeda, sekaligus belum ada kesatuan sistem yang mengkoordinir. Persoalan ini, tentu menjadi salah satu hambatan bagi tercapainya visi poros maritim dunia sehingga pemerintah meresponnya dengan penguatan peran dan fungsi Bakamla RI, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo dalam peringatan hari nusantara tahun 2014 di Kotabaru, “Telah dimulai era baru, efisien dengan komando tunggal yang didukung sistem peringatan dini dan unit penindakan hukum. Semua *stakeholder* keamanan laut, saya perintahkan mendukung aset awal kepada Bakamla berupa kapal, pesawat patroli dan personel”⁹². Penyampaian tersebut, menegaskan bagaimana presiden tertuju atas persoalan kelembagaan di laut yang akan dijadikan satu pintu pada Bakamla RI. Lalu, terjadi penegasan kembali terkait ‘landasan hukum’ yang dikemukakan ketika pelantikan Kepala Bakamla RI tahun 2020. Beliau menyatakan, “Saya berharap, dengan diangkatnya Pak Aan Kurnia, ke depan yang kita inginkan tadi juga bisa dikawal dan dipercepat sehingga betul-betul kita memiliki sebuah *coast guard* yang namanya Bakamla yang diberikan kewenangan di perairan kita”⁹³. Pernyataan tersebut menyuratkan bahwa adanya dorongan untuk

⁹¹ Wisnu Pramandita, “Keamanan Laut Indonesia Konsepsi Menghadapi Tantangan Kini Dan Masa Depan_Focus Group Discussion Universitas Pertahanan RI,” 2021.

⁹² Admin, “MLED Dari 5 Negara Kunjungi Mabes Bakamla/Indonesian Coast Guard Headquarters | WEBSITE TENTARA NASIONAL INDONESIA.”

⁹³ Humas Kemensetneg, “Presiden Jokowi Lantik Aan Kurnia Sebagai Kepala Bakamla | Sekretariat Negara,” February 2020, https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_jokowi_lantik_aan_kurnia_sebagai_kepala_bakamla.

kedepannya Bakamla RI menjadi *coast guard* yang secara *de jure* diberikan kewenangan penuh; karena selama ini, instansi tidak berwenang melakukan penyelidikan. Seperti yang disampaikan oleh Mayor Bakamla Muhamad Azhari, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Operasi Keamanan Laut dalam wawancara⁹⁴,

“Bakamla berwenang menindak semua tindak kejahatan maupun pelanggaran di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia. Namun dengan fungsi yang cukup luas tersebut Bakamla tidak berwenang melakukan penyidikan sehingga dipandang Bakamla kurang optimal sebagai instansi penegak hukum di laut hal tersebut dikarenakan dalam hal melaksanakan fungsi dan wewenang tidak tuntas atau sangat membutuhkan instansi terkait yang memiliki kewenangan penyidikan”

Yang digaris bawahi hanya tidak berwenang dalam penyelidikan saja, sedangkan proses pengamanan hingga pemeriksaannya dilaksanakan oleh instansi. Berdasarkan Pasal 63 Ayat 1 UU Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan mencantumkan kewenangan lembaga, meliputi⁹⁵: (1)Melakukan pengejaran seketika/*hot pursuit*; (2)Memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait untuk melaksanakan proses hukum; (3)Mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan. Pada akhirnya, situasi tata kelola keamanan laut yang seperti ini menjadi tugas bersama antara pemerintah dengan instansi terkait.

⁹⁴ Muhamad Azhari, “Wawancara Dengan Analis Hukum Ahli Muda Terkait Penguatan Regulasi Instansi,” 2022.

⁹⁵ JDIH BPK RI, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan” (2014), <https://jdih.kkp.go.id/peraturan/1-uu-32-2014.pdf>.

Sebagai birokrat pemerintahan, Bakamla RI merespon instruksi presiden untuk menata kemaritiman Indonesia melalui penyusunan rancangan peraturan pemerintah (RPP). Upaya penetapan RPP tentang Patroli Keamanan dan Keselamatan di Laut adalah tahapan awal dalam membangun sistem keamanan laut yang ideal. Pada konteks kelanjutannya, menurut Bapak Satrio Nurhuda Utomo, S.H., selaku Staf Seksi Peraturan Perundang-Undangan,

“RPP telah berjalan awal tahun (2021), tinggal finalisasi. Dalam rapat terakhir itu sudah, deputi tiga akan segera melaporkan untuk memohon agar Bapak Menteri bisa segera mengambil keputusan. Entah nantinya ingin bertemu/rapat elit lagi atukah langsung dilaporkan ke Presiden untuk ditandatangani (tinggal menunggu waktu)”⁹⁶.

Pernyataan tersebut merupakan hasil wawancara peneliti di tahun 2021. Sementara itu, perkembangan regulasi telah mencapai tahap pengesahan di bulan Maret Tahun 2022. Dengan mengesahkan produk hukum ini, mendefinisikan bahwa keberadaan Bakamla RI menguat secara *de jure*; yang meskipun secara *de facto* kehadirannya telah diakui di kalangan internasional. Artinya, secara *de jure* telah terbentuk sebuah komando atau satu pintu penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum. Sebagaimana, substansi Peraturan Pemerintah (PP) yang menerangkan instansi menjadi koordinator kementerian/lembaga di berbagai forum internasional dan secara khusus bekerja sama dengan *coast guard*⁹⁷. Dapat ditinjau

⁹⁶ Kurnia Finta Karisma, “Laporan Magang Badan Keamanan Laut Republik Indonesia ‘Optimalisasi Diplomasi Maritim Dalam Mewujudkan Visi PMD: Studi Kasus Diplomasi Maritim Badan Keamanan Laut RI Tahun 2019-2021’” (Surabaya, 2021).

⁹⁷ “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, Dan Penegakan Hukum Di Wilayah Perairan Indonesia Dan Wilayah

dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 pada halaman 19, sebagai berikut:



Penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia harus dilakukan secara terintegrasi dan terpadu agar efektivitas dan efisiensi pelaksanaan penjagaan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia dapat tercapai. Hal ini sejalan dengan tujuan reformasi birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di laut. Untuk itu, diperlukan upaya penataan pelaksanaan Patroli keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia yang efektif dan efisien.

Penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia yang efektif dan efisien perlu ditunjang dengan Sistem Informasi Keamanan dan Keselamatan Laut Nasional yang terintegrasi antar kementerian/lembaga. Integrasi sistem informasi bertujuan untuk memantau Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia secara komprehensif dan terpusat untuk mendukung tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga serta pengambilan keputusan terkait permasalahan lintas sektor.

Selain mengatur penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia, Peraturan Pemerintah ini juga menempatkan Badan bertindak sebagai koordinator kementerian/lembaga pada forum internasional guna terciptanya satu pintu distribusi informasi mengenai kondisi nasional di bidang keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di laut. Selain itu, secara khusus untuk kerja sama coast guard, Badan merupakan perwakilan pemerintah Indonesia.

Secara umum Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai kebijakan nasional keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia, Patroli, pencarian dan pertolongan, penegakan hukum, Sistem Informasi Keamanan dan Keselamatan Laut Nasional, dan pemantauan dan evaluasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3 ...



Gambar 4.1. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022

Sumber: jdih.bakamla.go.id

Pada hakikatnya, proses percepatan dalam menata kemaritiman ini dapat dikatakan sebagai langkah awal menuju tata kelola keamanan yang baik sehingga mampu menghadapi tantangan dan persoalan tindak pelanggaran/pidana di laut.

Yurisdiksi Indonesia” (2022), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/201622/pp-no-13-tahun-2022#:~:text=PP No. 13 Tahun 2022,Yurisdiksi Indonesia %5BJDIH BPK RI%5D>.

Seperti hasil wawancara bersama Bapak Mayor Bakamla Muhamad Azhari, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Operasi Keamanan Laut yang menyatakan,

“Adapun PP Nomor 13 Tahun 2022 saat ini menjadi solusi atas tumpang tindih kewenangan penindak di laut Indonesia khususnya pada aspek kebijakan, rencana operasi dan optimalisasi pelaksanaan patroli bersama serta penguatan diplomasi maritim baik nasional dan internasional. Namun PP tersebut merupakan target sementara, sehingga RUU tentang Kamla atau RUU terkait optimalisasi peran Bakamla dan pembangunan sistem kamla menjadi hal yang penting untuk diwujudkan.”⁹⁸”

Meskipun upaya ini dianggap sebagai target sementara, namun serangkaian tahapan yang dijalani merupakan bentuk kesadaran/*awareness* sekaligus kemauan/*willingness* instansi atas urgensi dalam membangun sistem pengelolaan keamanan laut. Dengan kata lain, sebelum mencapai tahapan tersebut berbagai usaha dilakukan secara berkelanjutan melalui strategi kolaborasi antar instansi. Strategi tersebut ditindaklanjuti secara berkelanjutan, yang mana bukan hanya pendekatan secara legal, seperti menyusun RPP, menyusun nota kesepahaman/MOU, dll. Melainkan juga, dengan pendekatan aktivitas yaitu mengadakan operasi bersama, latihan bersama, dan bertukar informasi. Hingga, pendekatan berbasis pengetahuan yang diterapkan pada diklat bersama, *forum group discussion*, dan sebagainya. Dengan demikian, Bakamla RI turut serta

⁹⁸ Azhari, “Wawancara Dengan Analis Hukum Ahli Muda Terkait Penguatan Regulasi Instansi.”

mendukung tercapainya poros maritim melalui upaya penguatan regulasi penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum.

D. Peran Bakamla RI dalam Diplomasi Maritim Indonesia untuk Mewujudkan Visi Poros Maritim Dunia Tahun 2017-2021 melalui Perspektif Le Miere

Dalam rangka mencapai visi poros maritim dunia, Bakamla RI melaksanakan perannya baik secara *inward looking* maupun *outward looking* melalui pedoman Kebijakan Kelautan Indonesia. Secara *inward looking*, instansi berperan dalam menata tata kelola keamanan maritim sekaligus membentuk ‘relawan penjaga laut nusantara (RAPALA)’. Berdasarkan *outward looking*, peran yang dilakukan berkaitan dengan *international scope*. Sehubungan dengan itu, berikut merupakan rangkaian peran Bakamla RI yang dapat ditinjau secara kooperatif, persuasif, maupun koersif.

a) Ditinjau secara Kooperatif

Ditinjau secara kooperatif mengartikan bahwa, aksi diplomasi ini menitikberatkan pada aspek kerja sama. Melalui kerangka tersebut, langkah awal instansi tentunya membuka komunikasi antar *coast guard* hingga menghasilkan kerja sama; dan akhirnya ditindaklanjuti melalui beberapa kegiatan yang meliputi:

1. *Humanitarian Assistance/Disaster Response*

Dalam bentuk diplomasi ini, peran Bakamla RI masih menjangkau skala nasional. Artinya, belum ditemukan adanya aktivitas bantuan/tanggap bencana di lingkup internasional. Sebagaimana diketahui, *humanitarian assistance* adalah tindakan kemanusiaan yang menyelamatkan nyawa, meringankan penderitaan

setelah terjadinya konflik hingga bencana alam⁹⁹. Sementara, *disaster response* ialah kemampuan tanggap darurat dalam menangani bencana¹⁰⁰. Adapun, aksi bantuan yang dilakukan instansi tercatat seperti pemberian bantuan logistik bagi para korban bencana di Posko Bersama Tsunami Selat Sunda ketika mengadakan operasi patroli dan SAR di wilayah Perairan Barat tahun 2018 dengan menggunakan KN Belut Laut 4806¹⁰¹. Lalu, di tahun yang sama juga memberikan bantuan sosial bersama penggiat literasi kepada korban banjir bandang di Posko Badan Nasional Penanggulangan Bencana Kalianda, Lampung Selatan. Selain itu, pada tahun 2021 pun menyalurkan bantuan sekaligus membantu percepatan vaksinasi tahap 2 kepada korban dampak erupsi Gunung Semeru¹⁰². Dan di tahun 2022, Bakamla RI memberikan bantuan medis ke anak buah kapal AS yang mengalami positif covid-19 di Perairan Natuna¹⁰³. Beragam tindakan tersebut menjadi salah satu bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan. Maka, instansi berupaya hadir pada aspek kemanusiaan; selain bergerak dalam bidang keamanan dan keselamatan di perairan ataupun yurisdiksi.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁹⁹ “Humanitarian Assistance - OECD,” accessed December 21, 2022, <https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-topics/humanitarian-assistance.htm>.

¹⁰⁰ Erik Auf Der Heide, “Disaster Response : Principles of Preparation & Coordination,” no. January 1989 (2021), <https://doi.org/10.2307/3380618>.

¹⁰¹ Herianto Batubara, “Komandan KN Belut Laut-4806 Serahkan Bantuan Untuk Korban Tsunami Selat Sunda,” accessed December 22, 2022, <https://news.detik.com/berita/d-4382151/komandan-kn-belut-laut-4806-serahkan-bantuan-untuk-korban-tsunami-selat-sunda>.

¹⁰² Admin, “Semarakkan HUT Ke-16, Bakamla RI Salurkan Bansos Korban Erupsi Semeru Dan Percepatan Vaksinasi,” accessed December 22, 2022, <https://tni.mil.id/view-208428-semarakkan-hut-ke-16-bakamla-ri-salurkan-bansos-korban-erupsi-semeru-dan-percepatan-vaksinasi.html>.

¹⁰³ Okezone Tim, “Bakamla RI Beri Bantuan Medis ABK Kapal AS Positif Covid-19 Di Perairan Natuna,” accessed December 22, 2022, <https://nasional.okezone.com/read/2022/01/15/337/2532749/bakamla-ri-beri-bantuan-medis-abk-kapal-as-positif-covid-19-di-perairan-natuna>.

2. *Goodwill Visit* melalui Aksi Kunjungan Pelabuhan

Melalui kacamata Le Miere, peran Bakamla RI dalam mewujudkan visi poros maritim dunia dapat ditunjukkan melalui kunjungan pelabuhan dengan capaian *confidence building measures*. Agenda kunjungan ini telah dilaksanakan pada tahun 2019 dengan KN Tanjung Datu 301 ke Port Blair, India. Seperti yang diketahui pelayaran perdana instansi ke India merupakan tindak lanjut dari pertemuan keduanya dalam High Level Meeting Tahun 2018¹⁰⁴. Sikap tersebut menandakan adanya rasa saling percaya sehingga terjadi mendorong terbentuknya pernyataan bersama dan nota kesepahaman yakni The Statement on Shared Vision of India-Indonesia Maritime Cooperation in The Indo-Pacific dan Establishing Comprehensive Strategic Partnership between Indonesia and India dan Memorandum of Understanding between Badan Keamanan Laut Republik Indonesia and Indian Coast Guard on Maritime Safety and Security Cooperation. Adapun rasa saling percaya ini dapat ditelaah melalui memorandum saling pengertian melalui penjelasan sebagai berikut:

Indikator *Confidence Building Measures (CBMs)*

No.	Indikator	Keterangan
1	Deklarasi Informasi (diatur dalam poin ditandatangani)	Indikator deklarasi informasinya menyatakan bahwa nota kesepahaman ini telah ditandatangani di Jakarta dan New Delhi pada 06 Juli 2020 oleh Kepala Bakamla RI dan Direktur Jenderal Penjaga Pantai India.

¹⁰⁴ Fajar Pratama, "Kepala Bakamla Bertemu Petinggi Indian Coast Guard, Apa Yang Dibahas?," December 2018, <https://news.detik.com/berita/d-4349699/kepala-bakamla-bertemu-petinggi-indian-coast-guard-apa-yang-dibahas>.

2	Prosedur Komunikasi (diatur dalam poin ketiga)	Indikator prosedur komunikasinya disepakati melalui pertemuan tahunan yang akan diadakan di Indonesia ataupun di India secara bergantian. Adapun pertemuannya terbagi menjadi dua kategori yakni forum teknis dan pejabat tinggi yang diketuai secara bersama oleh pejabat terpilih.
3	Observasi (diatur dalam poin sembilan)	Indikator observasi melalui pengevaluasian terkait implementasi kesepahaman ini setiap tahun.
4	Stabilisasi (diatur dalam poin kedua)	Indikator stabilisasinya terletak pada pasal 2 yang menyatakan terkait 7 poin kerja sama diantaranya: mengadakan pertukaran informasi atas pencegahan sekaligus menanggapi tindak kejahatan di laut; menyelenggarakan hingga mengoordinasikan operasi SAR apabila terdapat permintaan oleh salah satu pihak; menjalankan beberapa kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas seperti loka karya, magang, penelitian, pendidikan, maupun pelatihan; hingga menyelenggarakan pertemuan rutin antar pihak untuk mendiskusikan berbagai isu keamanan dan keselamatan maritim; memfasilitasi <i>port visit</i> ; dan sebagainya.

Tabel 2. Indikator Confidence Building Measures (CBMs) dalam Kerja Sama Maritim antara Bakamla RI-Indian Coast Guard

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Keempat indikator menjadi bukti sesungguhnya yang menggambarkan kerja sama tersebut mencapai CBMs. Indikasi tersebut memperlihatkan bahwa proses komunikasi keduanya berjalan dengan baik sehingga meningkatkan rasa percaya yang dimaknai sebagai pemeliharaan hubungan persahabatan.

Selain mencapai taraf tersebut, aksi kunjungan pelabuhan juga menunjukkan ketercapaian dalam pilar pertama (pengembangan sumber daya

manusia); pilar kedua (pertahanan, keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum); keenam (budaya bahari); dan ketujuh (diplomasi maritim) apabila merujuk pada pedoman kebijakan kelautan Indonesia. Ketiga pilar tersebut dapat diidentifikasi melalui serangkaian kegiatan, khususnya dapat terlihat langsung dari tujuan agenda ini yakni meningkatkan kerja sama dan kemampuan personel antar kedua instansi yang sekaligus menjalankan fungsi diplomasi maritim¹⁰⁵. Berikut adalah kompilasi keterangan antara beberapa pilar;

Bentuk Diplomasi Maritim	Pilar Kebijakan Kelautan Indonesia							Keterangan
	I	II	III	IV	V	VI	VII	
Goodwill Visit melalui Aksi Kunjungan Pelabuhan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Adapun agenda kunjungan pelabuhan termasuk dalam kategori pilar I, II, VI, dan VII. Berikut merupakan refleksi ketiga pilar tersebut. Pilar I: pilar pengembangan sumber daya manusia, dapat ditunjukkan melalui kegiatan kunjungan, diskusi, hingga latihan bersama yang dilakukan antara Bakamla RI dan ICG. Dengan begitu, para personel dapat memperoleh pemahaman bersama perihal ancaman di laut. Pilar II: Pertama, ketika sesi <i>table top exercise</i> atau disebut juga diskusi mendalam terkait perompakan di laut lepas. Kedua, ketika melaksanakan latihan bersama atau <i>passing exercise</i> sebagai simbol berakhirnya kegiatan.

¹⁰⁵ Bakamla RI, "(318) Muhibah Pertama Bakamla Ke Port Blair India (KN Tanjung Datu-301) - YouTube" (Indonesia, June 2019), <https://www.youtube.com/watch?v=ibZoIDvOwpI&t=182s>.

										<p>Pilar VI: Pada fase mengadakan open ship KN. Tanjung Datu yang memperkenalkan budaya Indonesia berupa sajian makanan yakni bakso sekaligus penampilan tarian poco-poco.</p> <p>Pilar VII: diplomasi maritim yang dimaknai sebagai peran aktif instansi di lingkup internasional dengan menjaga kekerabatannya melalui kegiatan kunjungan pelabuhan ini.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabel 2.1. Kompilasi Pilar Kebijakan Kelautan Indonesia dalam Goodwill Visit melalui Aksi Kunjungan Pelabuhan

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Pemaparan keterangan di atas, dapat dideskripsikan melalui serangkaian kegiatan ini. Kegiatan yang dilaksanakan melalui pengiriman delegasi sejumlah 59 personel terdiri atas 49 kru kapal dan 10 satgas operasi luar negeri. Lebih rincinya, keterlibatan delegasi dalam rangkaian aktivitas ini, meliputi:

- 1) Melakukan Open Ship KN Tanjung Datu 301¹⁰⁶,

Pada hari selasa (14/05/2019), sekelompok *officer* maupun *crew Indian Coast Guard* datang mengunjungi KN. Tanjung Datu. Para delegasi memasuki *lounge* kapal dengan dipandu dari personel Bakamla RI untuk menikmati sajian Indonesia yakni 'bakso'. Kemudian, rombongan mengarah ke bagian perpustakaan dan bertemu Letda Prabowo. Dalam penuturannya, dijelaskan bahwa perpustakaan kapal mempunyai akses

¹⁰⁶ Humas Bakamla RI, "Official Indonesia Coast Guard (IDNCG) on Twitter: "Selengkapnya Di: <https://t.co/ZhLO6gQxKV>," 2019, <https://twitter.com/humasbakamlari/status/1128527146698153984>.

pencarian buku secara online melalui komputer/gadget. Tidak sampai disitu saja, keunggulan lainnya terletak pada ketersediaan fasilitas yang meliputi ruangan kesehatan dengan peralatan medis lengkap, adanya kamar mayat, dan terdapat ruangan penjara. Ketiga sarana tersebut membuat delegasi sangat antusias, karena kelengkapannya tidak seperti yang mereka miliki. Lantas, antusiasme itu terekam ketika momen kebersamaan diabadikan melalui foto bersama di akhir tur kegiatan.



Gambar 5. Delegasi Bakamla RI dan Indian Coast Guard

Sumber: Official Coast Guard Twitter

2) Melaksanakan Table Top Exercise (TTX),

TTX didefinisikan sebagai sebuah pertemuan antar agensi penegak hukum laut dalam meningkatkan pertukaran informasi dan merespon tindak pidana di laut. Menurut UNODC Global Maritime Crime Programme, kegiatan ini memberikan keterampilan bagi lembaga penegak hukum

untuk menyelidiki kejahatan maritim¹⁰⁷. Jadi, TTX menjadi salah satu metode pelatihan yang bertujuan untuk menganalisa tindak pelanggarannya, rencana operasi penanganannya, sekaligus proses hukumnya. Pada sesi ini, persoalan yang dibahas adalah sikap bersama dalam menghadapi ancaman perompakan di laut lepas. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Mayor Bakamla Prabu Airlangga, S.Kom. selaku Kepala Seksi Operasi Keamanan Laut¹⁰⁸, ”Tindakan perompakan di laut lepas tentunya perlu koordinasi dan sharing informasi dengan negara terkait yang berada dalam kawasan tersebut sehingga dapat dilakukan penanganan dengan cepat.” Yang perlu digaris bawahi dalam menyikapi ancaman tersebut ialah koordinasi dan bertukar informasi dengan negara terkait. Respon ini menjadi metode agar penanganannya bisa dilakukan segera. Adapun diskusi mendalam mengenai skenario persoalan tersebut

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹⁰⁷ UNDOC, “Maritime Law Enforcement Tabletop Exercise Catalogue,” 10, accessed September 18, 2022, https://www.unodc.org/documents/Maritime_crime/UNODC_GMCP_Tabletop_Exercise_Training_Catalogue.pdf.

¹⁰⁸ Prabu Airlangga, “Wawancara Dengan Kepala Seksi Operasi Keamanan Laut Terkait Pelaksanaan Port Visit Ke Port Blair, India,” 2022.

dilakukan oleh divisi operasi Bakamla RI dan ICG di Ruang Rapat Lt.2 Headquarters Indian Coast Guard, Port Blair.



Gambar 5.1. Diskusi Mendalam antara Bakamla RI dan Indian Coast Guard

Sumber: official Coast Guard Twitter

3) Mengunjungi ROC/Regional Operating Centre dan MRCC/*Maritime Rescue Coordination Centre,*



Gambar 5.2. Kunjungan Bakamla RI ke ROC dan MRCC

Sumber: Official Coast Guard Twitter

Para delegasi mendatangi ROC dan MRCC dan disambut oleh DIG DR Sharma PD (IC7SAR) dan DIG Ashsih Mehrotra CSO (Ops). Pada saat itu, Kolonel A. Muharam menginformasikan terkait kunjungan ini untuk meninjau kecanggihan alat-alat yang dimiliki oleh ICG; seperti sistematika respon panggilan darurat jika terjadi insiden di laut. Sehingga, apabila hal tersebut berlangsung akan terdeteksi oleh radar yang berada pada ROC secara *real time* terkoneksi *long range camera* hingga visual kapal muncul di layar¹⁰⁹. Jadi bisa disebutkan bahwa, ROC sebagai alat pemantau keamanan laut bagi mereka. Kemudian, dilanjutkan dengan perjalanan ke MRCC; yang ruangnya diperuntukkan sebagai pusat koordinasi penyelamatan. Aksi penyelamatan akan dilakukan ketika adanya panggilan darurat oleh kapal; yang nantinya informasi tersebut disebarkan kepada beberapa stakeholder laut untuk tindakan pencarian dan pertolongan (SAR).

4) Melaksanakan *Passing Exercise*

Latihan bersama (*passing exercise*) antara Bakamla RI dan India Coast Guard (ICG) dilaksanakan pada hari terakhir sebagai simbol berakhirnya agenda *port visit*. Sebelum dimulainya kegiatan, KN. Tanjung Datu 301 dan Vijit ICG melakukan uji komunikasi terlebih dahulu. Setelahnya, dilakukan pendeteksian atas dugaan pembajakan kapal oleh pesawat

¹⁰⁹ Yuanto, "Delegasi Bakamla Berkunjung Ke ROC Dan MRCC Indian Coast Guard," 2019, <https://www.lensaindonesia.com/2019/05/16/delegasi-bakamla-berkunjung-ke-roc-dan-mrcc-indian-coast-guard.html>.

CGDO ICG dan helikopter CG 813; dan dilanjutkan dengan berkumpul di titik rendezvous (RV) yang telah disepakati.

Latihan diawali dengan operasi penerbangan helikopter CG 813 dalam evakuasi sekaligus pertolongan medis atas korban yang melarikan diri dari pembajakan lalu korban tersebut diturunkan ke helideck Kapal Vijit seraya terjadinya insiden manuver helikopter ICG¹¹⁰. Tragedi manuver tersebut membuat Kapal Vijit selaku Officer Conducting Serial (OCS) memberitahukan KN. Tanjung Datu 301 untuk berkerja sama dalam mengirimkan pasukan VBSS agar kapal yang dibajak dapat dilumpuhkan. Kemudian, tim URCL KN. Tanjung Datu 301 bersama tim VBSS Kapal Vijit melakukan pelumpuhan pelaku pembajak dengan menurunkan *speedboat*. Dari bentuk kerja sama itu telah memperlihatkan bahwasanya teknik VBSS dilakukan dengan baik.

Keempat rangkain di atas, telah merefleksikan dengan jelas bagaimana peran Bakamla RI dalam mewujudkan visi PMD melalui kunjungan pelabuhan yang diselenggarakan berdasarkan hubungan kerja sama keduanya. Interaksi yang menggambarkan adanya pertukaran budaya melalui sajian makanan berupa bakso, dan menampilkan tarian tradisional poco-poco. Kemudian, adanya pertukaran informasi sekaligus latihan bersama terkait merespon tindak perompakan, mempelajari kemajuan teknologi radar dan sebagainya dan mendapatkan latihan

¹¹⁰ Admin, "Passing Exercise KN Tanjung Datu 301 Dengan Kapal Indian Coast Guard | WEBSITE TENTARA NASIONAL INDONESIA," May 2019, <https://tni.mil.id/view-151174-passing-exercise-kn-tanjung-datu-301-dengan-kapal-indian-coast-guard.html>.

(SAR), hingga melaksanakan *passing exercise*. Beberapa aktivitas tersebut, tentu memberikan pengaruh positif dari segi sumber daya manusia (para personel) yang dapat meningkatkan kemampuan menghadapi persoalan di laut serta segi komunikasi yang dapat meningkatkan rasa saling percaya sehingga relasi kedua pihak tetap terjaga.

3. *Training and Joint Exercise* melalui,

3.1. Penyelenggaraan Forum Maritime Security Dekstop Exercise (MSDE) bersama Australian Border Force

Peran Bakamla RI dalam mewujudkan visi PMD dapat ditinjau melalui pelaksanaan forum MSDE dengan mencapai *confidence building measures*. Aktivitas ini telah dilangsungkan antara Bakamla RI dengan Australian Border Force (ABF) sejak 2009. Pada awal penyelenggaraan, forum hanya ditujukan kepada kedua instansi saja; akan tetapi seiring perkembangannya turut mengundang beberapa partisipan yang terdiri dari 11 negara pada tahun 2010. Hal tersebut diakibatkan oleh adanya atensi lebih dalam dimensi keamanan laut di lingkup nasional maupun internasional. Adapun, tujuan dari keterlibatan mereka yakni mempermudah mencari solusi maupun cara pandang terhadap isu-isu di laut yang menjadi prioritas. Terlebih, dalam memperluas hingga melanggengkan hubungan antar para personel untuk berbagi informasi; tentu membutuhkan rasa saling percaya. Dengan begitu, upaya kolektif mereka mengarah pada membangun rasa saling percaya. Dan, justifikasi ini dapat dikaji melalui indikator dalam konsep CBMs yang ditemukan pada nota kesepahaman antar keduanya yakni Plan of Action for the Implementation of the Joint Declaration on Maritime Cooperation

between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Australia.

Indikator Confidence Building Measures (CBMs)

No.	Indikator	Keterangan
1	Deklarasi Informasi (diatur dalam poin pertama dan kedelapan)	Indikator deklarasi informasinya menyatakan bahwa Menteri Luar Negeri Indonesia bersama Menteri Luar Negeri Australia menandatangani perjanjian kerja sama maritim pada 26 Februari 2017 di Sydney. Kemudian, poin kedelapan menyebutkan lampiran pertama berisi matriks yang menerangkan terkait tawaran kegiatan baru, kegiatan yang tertunda, hingga kegiatan spesifik yang sedang berlangsung yakni 9 prioritas kerja sama. Matriks akan digunakan untuk meninjau progres dan melengkapi laporan tahunan. Dan akan diperbarui secara berkala.
2	Prosedur Komunikasi (diatur dalam poin keenam)	Indikator prosedur komunikasinya disepakati melalui Kementerian Luar Negeri Indonesia dan Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia
3	Observasi (diatur dalam poin kelima)	Indikator observasi melalui laporan tahunan yang dilaksanakan oleh pejabat senior, dan nantinya akan diserahkan kepada menteri luar negeri pada pertemuan tingkat menteri.
4	Stabilisasi (diatur dalam poin Annex)	Indikator stabilisasinya terletak dalam Annex-Matrix of Specific Activities yang menyebutkan rincian aktivitas MSDE dilakukan setiap tahunnya dengan pihak yang bertanggung jawab yakni Bakamla RI dan ABF

Tabel 2.2. Indikator Confidence Building Measures (CBMs) dalam Kerja Sama Maritim antara Indonesia-Australia

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Keempat indikator di atas telah merefleksikan, bahwa kerja sama keduanya lebih mengarah pada membangun rasa saling percaya. Jadi, membangun kepercayaan menjadi bagian dalam peran Bakamla RI untuk meningkatkan kerja sama antar

pihak. Dengan meningkatkan kerja sama, maka kasus pelanggaran di laut dapat diminimalisir sehingga dapat mencapai poros maritim dunia.

Selain mencapai taraf CBMs, penyelenggaraan forum merefleksikan ketercapaian dalam pilar pertama (pengembangan sumber daya manusia); kedua (pertahanan, keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum); dan ketujuh (diplomasi maritim) apabila merujuk pada pedoman kebijakan kelautan Indonesia. Terutama, dalam pilar kedua yang menegaskan keterkaitan secara langsung dengan tupoksi instansi. Pilar-pilar tersebut dapat teridentifikasi melalui serangkaian kegiatan, berikut adalah kompilasi keterangan antar beberapa pilar;

Bentuk Diplomasi Maritim	Pilar Kebijakan Kelautan Indonesia							Keterangan	
	I	II	III	IV	V	VI	VII		
Training and Joint Exercises melalui Penyelenggaraan Forum Maritime Security Dekstop Exercise (MSDE) bersama Australian Border Force	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>	Adapun, pilar yang terpenuhi yakni I, II, dan VII. Berikut merupakan refleksi ketiga pilar tersebut. Pilar I: Dalam pilar pengembangan sumber daya manusia yang ditunjukkan melalui peningkatan pemahaman para personel terkait isu di laut. Pada rentang waktu 2017-2021, penyelundupan narkoba menjadi topik pembahasan sebanyak 2 kali. Pilar II: Terlihat melalui sesi <i>table top exercise</i> atau diskusi

								<p>mendalam terkait isu yang diangkat. Pilar VII: unsur diplomasi maritim tergambaran melalui penyelenggaraan forum ini yang melibatkan perwakilan dari berbagai negara, bahkan terdapat 16 negara yang turut berpartisipasi.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabel 2.3. Kompilasi Pilar Kebijakan Kelautan Indonesia dalam Training and Joint Exercise melalui Penyelenggaraan MSDE

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Jika dirasionalisasikan, pemaparan di atas dapat ditemukan dalam rangkaian kegiatan selama tahun 2017-2021.

Pada tahun 2017, MSDE ke-8 diadakan selama tiga hari di Manado bersama dengan 16 perwakilan berbagai negara¹¹¹.



Gambar 5.3. Penyelenggaraan MSDE Ke-8

Sumber: RRI Website

¹¹¹ Tim Redaksi MaritimeNews, “MSDE 2017 Resmi Ditutup, Hasilkan Sejuta Harapan Untuk Keamanan Laut | MaritimNews.Com,” 2017, <http://maritimnews.com/2017/05/msde-2017-resmi-ditutup-hasilkan-sejuta-harapan-untuk-keamanan-laut/>.

Sesi diskusi dan pelatihan kali ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas para personel penegak hukum laut di kawasan Asia Pasifik. Lebih rincinya, membahas persoalan mengenai penanganan isu kejahatan transnasional sesuai hukum laut internasional. Prioritas isu yang diangkat yakni tindak pelanggaran penyelundupan narkoba. Penyelundupan narkoba sendiri merupakan kejahatan yang berdimensi internasional dan terorganisir melalui proses peredaran dengan dengan teknologi yang canggih¹¹². Selama tiga hari acara, para instansi melakukan presentasi dan diskusi terkait isu yang telah ditentukan sebelumnya, lalu dilanjutkan dengan kegiatan latihan bersama. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Mayor Bakamla Kustriyani, S.T., M.Eng.Sc selaku Analis Kebijakan Ahli Muda Direktorat Kerja Sama¹¹³,”Ada agenda latihan dalam bentuk Table Top Exercise (TTX)”. Jadi rangkaian kegiatan tersebut tidak hanya seputar mendiskusikan isu yang ditentukan yakni penyelundupan narkoba. Akan tetapi, terjadi diskusi mendalam terkait bagaimana analisa tindak pelanggarannya; rencana operasinya; hingga proses hukumnya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹¹² Denico Doly, “Penegakkan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Narkoba Di Perairan Indonesia” Vol. XIV, (2022): 6, https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-XIV-9-I-P3DI-Mei-2022-208.pdf.

¹¹³ Kustriyani, “Wawancara Dengan Analis Kebijakan Ahli Muda Direktorat Kerja Sama Terkait Maritime Security Dekstop Exercise (MSDE), Asean Coast Guard Forum (ACF), Indian Ocean Rim Association (IORA), Asean Regional Forum (ARF), Kehadiran Bakamla RI Dan TNI AL Di Peraira,” 2022.

Sementara itu, di tahun 2019 MSDE ke-9 diselenggarakan di Jakarta oleh Bakamla RI dan ABF.



Gambar 5.4. Penyelenggaraan MSDE Ke-9

Sumber: TNI Website

Agenda ini, diikuti oleh 16 negara partisipan meliputi: Australia, Jepang, Kamboja, Korea Selatan, Turki, Filipina, Sri Lanka, Timor Leste, Singapura, Laos, Myanmar, Papua Nugini, Maladewa, Bangladesh, dan Indonesia¹¹⁴. Dalam sesinya, isu yang menjadi perhatian juga mengenai tindak penyelundupan narkoba; seperti yang ditegaskan oleh Mayor Bakamla Kustriyani, S.T., M.Eng.Sc selaku Analis Kebijakan Ahli Muda Direktorat Kerja Sama¹¹⁵, “Pada MSDE ke-9 tahun 2019, yang menjadi perhatian adalah penyelundupan narkoba, yang menjadi isu utama.

¹¹⁴ Dion, “Bakamla Dan ABF Hadirkan 16 Negara Di MSDE Ke-9 Berita Terkini Medan Sumut - Utama News,” June 2019, https://www.utamanews.com/ragam/Bakamla-dan-ABF-Hadirkan-16-Negara-di-MSDE-Ke-9?utm_source=dldr.it&utm_medium=twitter.

¹¹⁵ Kustriyani, “Wawancara Dengan Analis Kebijakan Ahli Muda Direktorat Kerja Sama Terkait Maritime Security Dekstop Exercise (MSDE), Asean Coast Guard Forum (ACF), Indian Ocean Rim Association (IORA), Asean Regional Forum (ARF), Kehadiran Bakamla RI Dan TNI AL Di Peraira.”

Yang disepakati tidak ada karena MSDE hanya mengenai pelatihan hukum laut dan latihannya. Tidak ada hal yang disepakati.” Artinya, pertemuan tahun ini sama seperti tahun sebelumnya yaitu mendiskusikan penyelundupan narkoba. Sebagaimana yang diketahui, isu penyelundupan narkoba menjadi salah satu problematika di Asia Pasifik; menurut UNDOC estimasi pasar *methamphetamine* terus berkembang di Asia Tenggara (25.7 USD), Australia dan New Zealand (11.1 USD), China termasuk Hong Kong, Macau, Taiwan (10.3 USD), Asia Timur kecuali China (8.9 USD), dan Bangladesh (5.5 USD)¹¹⁶. Lantas, persoalan tersebut dibahas sekaligus didiskusikan secara mendalam termasuk pelatihan hukum lautnya hingga mengadakan latihan yang berbentuk *table top exercise*. Dan poin yang perlu diingat adalah MSDE bukanlah forum yang menghasilkan suatu kesepakatan diantara partisipan; namun menjadi wadah bagi mereka dalam mendialogkan skenario-skenario untuk menghadapi tindak pelanggaran di laut sesuai UNCLOS. Sehingga, bisa memberikan pemahaman regional atas penerapan hukum internasional.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹¹⁶ UNODC, “Transnational Organized Crime in Southeast Asia: Evolution, Growth and Impact,” *United Nations Office on Drugs and Crime*, 2019, 194, https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/Publications/2019/SEA_TOCTA_2019_web.pdf%0A%0A.

Adapun, di tahun 2020 terjadi wabah pandemi sehingga MSDE ke-10 tidak dapat terselenggara. Penundaan ini dinilai tepat karena Indonesia bersama sejumlah negara mengalami lonjakan kasus Covid-19. Akhirnya, dapat dilaksanakan pada tahun 2021 melalui metode *hybrid* atau dikenal dengan pertemuan kombinasi secara luring dan daring yang diikuti 36 negara diantaranya berasal dari anggota HACGAM dan IORA.



Gambar 5.5. Penyelenggaraan MSDE Ke-10

Sumber: Bakamla RI Facebook

Untuk isu yang diangkat dalam sesi ini pembahasan di sesi berhubungan dengan persoalan keamanan dan keselamatan di laut ketika pandemi, dimana skenario tidak hanya merujuk pada aspek hukum yang berlaku namun juga aspek pencegahan penularan Covid-19 untuk tindak operasi lautnya. Dengan adanya penyesuaian tersebut, mendorong kegiatan pengawasan dan penjagaan akan tetap berjalan meski dalam situasi wabah.

Seperti yang telah dipaparkan di atas, Bakamla RI bersama ABF telah mengadakan agenda ini sebanyak 3 kali dalam kurun waktu 2017-2021. Keduanya berperan agar negara-negara mampu memahami penerapan hukum kemaritiman internasional. Dengan mempelajari UNCLOS sebagai instrumen hukum internasional di bidang kelautan dapat memberikan solusi atas berbagai persoalan di laut. Selain memperoleh manfaat dari segi penyelesaiannya, tidak terkecuali juga memberikan manfaat kepada para personel instansi penegak hukum laut dalam meningkatkan kompetensinya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Mayor Bakamla Kustriyani, S.T., M.Eng.Sc selaku Analis Kebijakan Ahli Muda Direktorat Kerja Sama¹¹⁷, “Melalui TTX para personil dapat mengembangkan kemampuannya dalam menangani isu keamanan dan keselamatan laut, memperluas *networking* para personil antar CG/MLEA dalam rangka meningkatkan pertukaran data & informasi.” Artinya, melalui latihan *table top exercise* (TTX) menjadi wadah bagi partisipan untuk mencegah maupun menanggulangi ancaman keamanan di laut. Jadi, seiring memperoleh manfaat ketika melaksanakan kegiatan; hal ini pula yang mendasari terwujudnya poros maritim dunia melalui ketercapaian indikator pilar-pilar kebijakan kelautan Indonesia.

3.2. Pelaksanaan Pertukaran Personel sekaligus Program Pendidikan

Dalam rangka meraih visi PMD, salah satu peran Bakamla RI yakni menjalankan program pendidikan ataupun diklat dengan mencapai *confidence*

¹¹⁷ Kustriyani, “Wawancara Dengan Analis Kebijakan Ahli Muda Direktorat Kerja Sama Terkait Maritime Security Dekstop Exercise (MSDE), Asean Coast Guard Forum (ACF), Indian Ocean Rim Association (IORA), Asean Regional Forum (ARF), Kehadiran Bakamla RI Dan TNI AL Di Peraira.”

building measures melalui sudut pandang Le Miere. Sementara itu, bentuk aktivitas lainnya yakni pertukaran personel belum pernah dilaksanakan; sebagaimana yang disampaikan oleh Lettu Bakamla Agis Anshari Faila, S.E. selaku Analis SDM Aparatur Ahli Muda¹¹⁸, “Sampai dengan saat ini pertukaran personel belum pernah dilaksanakan, yang ada hanya pelaksanaan diklat yang diselenggarakan oleh mitra Bakamla.” Jadi, sejauh ini dapat diketahui bahwa instansi belum pernah melangsungkan pertukaran; akan tetapi hanya pelaksanaan diklat. Pelaksanaan diklat maupun penyelenggaraan program pendidikan adalah upaya kolektif yang menjadi bagian tindak lanjut dari pelaksanaan poin-poin yang tercantum dalam nota kesepahaman. Kondisi tersebut merujuk pada membangun rasa saling percaya yang dapat diuji dalam indikator CBMs pada perjanjian, salah satunya yakni: *Memorandum of Cooperation between the Japan Coast Guard and Badan Keamanan Laut Republik Indonesia on Maritime Security and Safety*¹¹⁹. Pemaparannya sebagai berikut:

Indikator Confidence Building Measures (CBMs)

No.	Indikator	Keterangan
1	Deklarasi Informasi (diatur dalam poin penandatanganan dan poin kesepuluh)	Indikator deklarasi informasinya menyatakan bahwa pada 26 Juni 2019 telah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman dalam bentuk tiga bahasa meliputi Indonesia, Inggris, dan Jepang. Kemudian, poin kesepuluh menyebutkan terkait masa berlakunya perjanjian hingga perihal kerahasiaan data dan informasi oleh pihak yang bersangkutan.
2	Prosedur Komunikasi	Indikator prosedur komunikasinya disepakati melalui narakontak masing-masing yakni direktorat

¹¹⁸ Agis Anshari, “Wawancara Dengan Analis SDM Aparatur Ahli Muda Terkait Dengan Pertukaran Personel Sekaligus Program Pendidikan,” 2022.

¹¹⁹ “Memorandum of Cooperation between the Japan Coast Guard and Badan Keamanan Laut Republik Indonesia on Maritime Security and Safety” (2019), <https://treaty.kemlu.go.id/search>.

	(diatur dalam poin ketiga)	kerja sama Bakamla RI dan Divisi Manajemen Krisis dan Urusan Internasional JCG.
3	Observasi (diatur dalam poin kesembilan)	Indikator observasi melalui pertemuan tahunan yang telah disepakati
4	Stabilisasi (diatur dalam poin kedua)	Indikator stabilisasinya terletak pada ruang lingkup kerja sama antar pihak yang mencakup empat poin diantaranya: pertama, melalui pelaksanaan latihan gabungan, pendidikan, pelatihan, lokakarya, hingga seminar dalam rangka peningkatan kapasitas, dan sebagainya.

Tabel 2.4. Indikator Confidence Building Measures (CBMs) dalam Kerja Sama Maritim antara Bakamla RI-Japan Coast Guard

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Keempat indikator di atas merupakan pemaparan tentang indikator rasa saling percaya yang terdapat dalam kerja sama keduanya; yang mana diaplikasikan dalam berbagai kegiatan salah satunya melalui pelatihan dan pendidikan. Maka, hal tersebut memenuhi bentuk diplomasi kooperatif yang memiliki tujuan dalam meningkatkan rasa saling percaya.

Selain mencapai taraf rasa saling percaya, agenda ini juga mengarah pada ketercapaian dalam pilar pertama (pengembangan sumber daya manusia); kedua (pertahanan, keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum); dan ketujuh (diplomasi maritim). Sehubungan dengan ketiga pilar tersebut, dapat teridentifikasi melalui keikutsertaan Bakamla RI dalam program pendidikan hingga diklat¹²⁰. Dan, berikut adalah kompilasi antar pilarnya;

Bentuk Diplomasi Maritim	Pilar Kebijakan Kelautan Indonesia							Keterangan
	I	II	III	IV	V	VI	VII	

¹²⁰ Salah satu bentuk diplomasi maritim yang dikategorikan kooperatif menurut Le Miere

Pelaksanaan Pertukaran Personel sekaligus Program Pendidikan	☑	☑					☑	<p>Adapun aktivitas diklat maupun pendidikan termasuk dalam kategori pilar I, II, dan VII. Berikut merupakan refleksi ketiganya.</p> <p>Pilar I: Unsur pengembangan sumber daya manusia teridentifikasi dalam pelaksanaan agenda ini; dimana dengan mengikuti kegiatan akan menambah wawasan maupun kompetensi para personel. Terlebih, instansi telah melaksanakan 10 kali selama rentang waktu 2017-2021.</p> <p>Pilar II: Unsur pertahanan, keamanan pun terlihat melalui penyelenggaraan pendidikan maupun diklat ini yang mempelajari teori bahkan praktiknya tentang keamanan dan keselamatan maritim, hingga kebijakan keamanan.</p> <p>Pilar VII: Ditunjukkan melalui kolaborasi antara Bakamla RI dengan beberapa coast guard dalam bidang pendidikan ataupun diklat. Misalnya: antara instansi dengan Japan Coast Guard (JCG) yang mengadakan program pendidikan. Program yang ditawarkan oleh JCG kepada personel Bakamla RI tentu saja memiliki kriteria sekaligus kuota yang telah ditetapkan oleh mereka.</p>
---	---	---	--	--	--	--	---	---

Tabel 2.5. Kompilasi Pilar Kebijakan Kelautan Indonesia dalam Training and Joint Exercise melalui Pelaksanaan Pertukaran Personel sekaligus Program Pendidikan

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Apabila dirasionalisasikan, pemaparan keterangan tersebut dapat dideskripsikan melalui serangkaian kegiatan ini. Dalam melaksanakan diklat atau

yang bisa disebut juga pelatihan menjadi esensial untuk meningkatkan wawasan para personel dalam mengimplementasikan hukum laut internasional ketika menghadapi persoalan di laut. Selain menjalankan diklat, program pendidikan juga telah dilakukan bersama dengan beberapa mitra kerja sama, seperti yang jelaskan oleh Lettu Bakamla Agis Anshari Faila, S.E. selaku Analis SDM Aparatur Ahli Muda¹²¹, “Bakamla RI melaksanakan kerja sama bidang pendidikan dan pelatihan tidak hanya dengan USCG namun juga dengan ABF (Australian Border Force), JICA Jepang, Japan Coast Guard, dan Korean Coast Guard.” Dalam aspek pendidikan maupun pelatihan, instansi telah melangsungkan kerja sama bersama lima mitranya meliputi: U.S. Coast Guard (USCG), Japan Coast Guard (JCG), Australian Border Force (ABF), The Japan International Cooperation Agency (JICA), Korea Coast Guard (KCG). Berikut adalah rangkaian kegiatan di bidang pendidikan maupun pelatihan selama kurun waktu 2017-2021:

Tahun 2017

- a. Mengadakan pelatihan hukum laut “Law of The Sea and Maritime Enforcement Training” dalam rangka Capacity Building bagi negara anggota HACGAM¹²². Adapun kegiatan ini dilaksanakan selama lima hari dengan materi hukum laut yang diikuti oleh 13 negara diantaranya: Jepang, Korea, Pakistan, Thailand, dan sebagainya.

¹²¹ Anshari, “Wawancara Dengan Analis SDM Aparatur Ahli Muda Terkait Dengan Pertukaran Personel Sekaligus Program Pendidikan.”

¹²² Dian, “Bakamla RI Gelar Pelatihan Hukum Laut Bersama 13 Negara Anggota HACGAM Berita Terkini Medan Sumut - Utama News,” October 2017, <https://www.utamanews.com/ragam/Bakamla-RI-Gelar-Pelatihan-Hukum-Laut-bersama-13-Negara-Anggota-HACGAM>.

Tahun 2018

- a. Mengadakan pelatihan yakni *basic training* untuk ABK KN 1101 dan personel zona maritim, serta pelatihan manajerial di Amerika. Adapun pelatihan, seperti *diving skill, health service technician, basic safety training, damage control, navigation, boarding officer, law of the sea, SAR, boarding team, basic radio and communication, food service specialist, boatswain mate 'A'* (kebaharian), dan *small boat operation*. Sedangkan, untuk personel zona maritim mencakup pelatihan SAR, *small boat operation*, dan *station management course*.
- b. Ikut serta dalam agenda *public affairs practitioners workshop* yang diadakan USCG Distric 14 Hawaii. Untuk partisipan tidak hanya Bakamla RI, akan tetapi terdapat perwakilan dari Phillipine Coast Guard, Vietnam Coast Guard, dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Sebagaimana yang diketahui, acara ini menjadi wadah untuk pertukaran informasi antara para personel kehumasan *coast guard* terutama di kawasan Asia Tenggara.
- c. Bakamla RI mengirimkan para personel untuk menjalani pelatihan dasar maupun lanjutan di pusat pelatihan US Coast Guard (USCG)¹²³. Implementasi ini merujuk pada nota perjanjian yang telah ditandatangani tahun 2016. Kegiatan pelatihan tersebut meliputi: spesialis penegakan hukum di laut, spesialis kesehatan, penyelam, sistem informasi, Teknik mesin, dan sebagainya.

Tahun 2019

¹²³ Admin, "Kepala Bakamla RI Terima Kunjungan Kehormatan Charge D Affaires Dubes Amerika Serikat," May 2020, <https://tni.mil.id/view-176905-kepala-bakamla-ri-terima-kunjungan-kehormatan-charge-d-affaires-dubes-amerika-serikat.html>.

- a. Bakamla RI dan U.S. Coast Guard (USCG) mengadakan latihan bersama yang menjadi bagian dari kegiatan Technical Expert Workshop (TEW) di South East Asia Maritime Law Enforcement (SEAMLEI)¹²⁴.
- b. Bakamla RI telah mengirimkan personelnya yang memenuhi kualifikasi untuk menempuh pendidikan S2 bidang *Maritime Security and Safety Policy* di Japan Coast Guard Academy, National Graduate Institute for Policy Studies, Tokyo Center JICA, Chugoku Center JICA¹²⁵. Program pendidikan ini merupakan implementasi kerja sama kedua belah pihak; dengan tujuan membantu para personel *coast guard* dalam meningkatkan kemampuannya untuk merumuskan kebijakan keamanan dan keselamatan maritim sekaligus mengatasi tantangan maritim. Program setahun belajar tersebut meliputi teori dan praktik seperti mengkaji hubungan internasional, hukum internasional, kajian keamanan, penegakan hukum di laut, hingga manajemen kapal, dan sebagainya.

Tahun 2020

- a. Bakamla RI dan Japan Coast Guard (JCG) mengadakan latihan jarak jauh "*Training for Maritime Law Enforcement*" secara virtual¹²⁶. Kegiatan ini diikuti oleh anggota kedua instansi dan berlangsung selama 4 hari dengan materi penegakan hukum di laut. Penyelenggaraan ini merupakan bentuk kesadaran

¹²⁴ Rindra Devita, "AS Dan Bakamla Inisiasi Workshop Penegakan Hukum Wilayah Maritim," June 2019, <https://www.balipost.com/news/2019/06/29/79561/AS-dan-Bakamla-Inisiasi-Workshop...html>.

¹²⁵ Admin, "Kepala Bakamla RI Temu Daring Dengan Dubes Jepang," 2021, https://bakamla.go.id/publication/detail_news/kepala-bakamla-ri-temu-daring-dengan-dubes-jepang.

¹²⁶ Edy, "Tingkatkan Kapabilitas Personel Di Tengah Pandemi Covid-19, Bakamla RI Dan JCG Gelar Latihan Jarak Jauh," July 2020, <https://www.inanews.co.id/2020/07/tingkatkan-kapabilitas-personel-di-tengah-pandemi-covid-19-bakamla-ri-dan-jcg-gelar-latihan-jarak-jauh/>.

kedua belah pihak bahwasanya ditengah kondisi pandemi masih berlangsung, aspek keamanan dan keselamatan di laut tetap harus diperhatikan.

Tahun 2021

- a. Bakamla RI, Japan Coast Guard (JCG), dan Japan International Cooperation Agency (JICA) mengadakan pelatihan bersama secara daring¹²⁷. Selama tiga hari, aktivitas ini berfokus pada hukum laut, dengan rincian seperti pemahaman kembali terkait UNCLOS 1982, teknik melaksanakan pencarian dan pertolongan (SAR), hingga teknik melakukan penangkapan.
- b. Bakamla RI dan Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation (JCLEC) mengadakan pelatihan hukum laut “*Maritime Regulation and Enforcement Training*” secara virtual¹²⁸. Agenda ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman sekaligus implementasi hukum laut internasional. Kesempatan tersebut digunakan oleh para personel untuk saling berbagi pengalaman dan pemahamannya terkait topik di atas. Mengingat bahwa, urgensi instansi yang berwenang sebagai garda terdepan dalam mencegah, menindak, dan menegakkan hukum terhadap tindak pelanggaran di laut.
- c. Bakamla RI mengadakan pelatihan peningkatan kapasitas/*capacity building* untuk negara anggota HACGAM “*Law of The Sea and Maritime Enforcement Training*” secara daring¹²⁹. Kegiatan ini diikuti oleh beberapa negara

¹²⁷ “Bakamla RI (@bakamla_ri) • Instagram Photos and Videos,” January 2021, <https://www.instagram.com/p/CKf0oGcB2nc/>.

¹²⁸ Admin, “Tingkatkan Pemahaman Hukum Laut Bakamla RI Gelar Maritime Regulation and Enforcement Training,” February 2021, https://bakamla.go.id/publication/detail_news/tingkatkan-pemahaman-hukum-laut-bakamla-ri-gelar-maritime-regulation-and-enforcement-training.

¹²⁹ Yudi Rahmat, “Bakamla RI Pimpin Pelatihan Bersama Gakkum Coast Guard 19 Negara,” October 2021, <https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/569891/bakamla-ri-pimpin-pelatihan-bersama-gakkum-coast-guard-19-negara?video=>.

diantaranya: Brunei Darussalam, Hong Kong, India, Singapura, Tiongkok, Turki, Filipina, Thailand, Australia, dan lain-lain. 18 partisipan antusias dalam mempelajari penegakan hukum di laut sesuai dengan tren keamanan laut yang sedang berlangsung.

Dalam rentang waktu lima tahun, partisipasi antar pihak telah melangsungkan program pendidikan maupun pelatihan sebanyak 10 kali. Penyelenggaraan kegiatan ini merupakan bukti bahwasanya partisipan menyadari pentingnya kolaborasi dalam menghadapi ancaman maupun tantangan di laut.

4. *Joint Maritime Security Operations* melalui Latihan dan Operasi Bersama dengan *Coast Guard* lain

Peran Bakamla RI dalam mewujudkan visi PMD melalui penyelenggaraan aktivitas latihan dan operasi bersama dengan mencapai *confidence building measures*. Selama kurun waktu lima tahun, instansi telah melangsungkan 12 aksi latihan bersama maupun patroli terkoordinasi dengan beberapa *coast guard* diantaranya *India Coast Guard, Australian Border Force, Maritime Border Command, Japan Coast Guard, dan U.S. Coast Guard*. Partisipasi kelima pihak dengan Bakamla RI menyiratkan adanya upaya kolektif dalam meningkatkan kapabilitas para personel untuk menghadapi isu keamanan dan keselamatan di laut. Artinya, upaya tersebut merupakan sebuah komitmen bersama. Komitmen sendiri menginterpretasikan adanya saling percaya antar pihak sehingga program latihan dan operasi bersama dapat dilaksanakan. Justifikasi ini, dapat ditelaah melalui indikator yang terdapat dalam konsep CBMs.

Mengambil salah satu contoh yakni pelaksanaan latihan bersama antara Bakamla RI dan U.S. Coast Guard. Terlaksananya program operasi, merupakan bentuk implementasi dari rencana kerja kedua belah pihak yakni *Work Plan Between the Maritime Security Agency of the Republic of Indonesia and the United States Coast Guard for the Implementation of the Memorandum of Understanding on Maritime Cooperation between the Republic of Indonesia and the United States of America*. Rencana kerja tersebut mengandung penerapan CBMs; yang dimaknai bahwa hubungan kerja sama mereka mengindikasikan adanya upaya membangun kepercayaan. Penjelasannya, sebagai berikut:

Indikator Confidence Building Measures (CBMs)

No.	Indikator	Keterangan
1	Deklarasi Informasi (diatur setelah paragraf ketigabelas)	Indikator deklarasi informasinya menyatakan bahwa Komandan Pengawal Penjaga Pantai Amerika Serikat bersama Kepala Bakamla RI menandatangani rencana kerja keduanya pada 04 Desember 2017 dan 23 Oktober 2017.
2	Prosedur Komunikasi (diatur dalam paragraf kesebelas)	Indikator prosedur komunikasi terkait perkembangan kerja sama ditetapkan kepada senior dari Departemen Luar Negeri AS dan Kemenlu RI
3	Observasi (diatur dalam paragraf keduabelas)	Indikator observasi melalui peninjauan secara berkala atas raker sekaligus meneliti bidang kerja sama yang baru sesuai dengan kesepakatan kedua pihak.
4	Stabilisasi (diatur dalam poin pertama, kedua, dan ketiga)	Indikator stabilisasinya terletak pada beberapa kegiatan diantaranya: memberikan kesempatan pendidikan seperti akademi penjaga pantai AS, sekolah calon perwira, dan sebagainya; menjalin kerja sama instansi pendidikan bidang keamanan maritim kedua negara; adanya pertukaran ahli dalam bidang tertentu seperti seminar, loka karya, dan lain-lain; mengadakan konsultasi maupun dialog

		berkala antar pihak terkait tingkatan teknis sampai strategisnya isu-isu keamanan keselamatan maritim sebagaimana disepakati bersama.
--	--	---

Tabel 2.6. Indikator Confidence Building Measures (CBMs) dalam Kerja Sama Maritim antara Bakamla RI-U.S. Coast Guard

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Keempat indikator adalah petunjuk yang menandakan jalinan kerja sama mereka tergolong *confidence building measures*. Ditambahkan pula, validasi ini ditunjang dengan pernyataan Bapak Mayor Bakamla Angga Heriyana, S.T., terkait “indikasi yang terlihat dalam berlangsungnya latihan dan operasi bersama coast guard lain hingga meningkatkan rasa saling percaya”¹³⁰,

“Sebelum dilaksanakan Latihan, akan ada rapat persiapan dan jika diperlukan akan dilaksanakan geladi/skenario terhadap Latihan. Dalam rapat persiapan juga dibahas dan disepakati jenis komunikasi yang akan digunakan dalam Latihan untuk mendukung kelancaran Latihan.

Dengan adanya rapat persiapan yang baik, Latihan yang berjalan lancar dan tidak ada kerugian materil maupun personil maka akan meningkatkan kepercayaan diantara *coast guard* lain serta secara tidak langsung mengetahui kemampuan coast guard negara lain. Hal ini tentu saja menguntungkan para pihak yang terlibat dalam Latihan.

¹³⁰ Angga Heriyana, “Hasil Wawancara Dengan Mayor Bakamla Angga Heriyana, S.T. Terkait Penyelenggaraan Latihan Dan Operasi Bersama Dengan Coast Guard Lain,” 2022.

Latihan juga dapat dijadikan pintu masuk bagi *coast guard* negara-negara lain untuk menjalin kerja sama yang lebih mendalam seperti operasi bersama, bantuan pengadaan sarana dan prasarana dan *sharing* informasi.”

Sederhananya, serangkaian proses menuju pelaksanaan aktivitas ini sesungguhnya telah menunjukkan adanya CBMs. Tolak ukur rasa saling percaya dinilai berlandaskan ketercapaian indikator CBMs; frekuensi penyelenggaraannya; sekaligus pernyataan dari personel instansi. Maka, rangkaian ini menunjukkan komitmen antar *coast guard* dalam menghadapi persoalan di laut.

Selain mencapai taraf CBMs, latihan dan operasi bersama juga menunjukkan ketercapaian dalam pilar pertama (pengembangan sumber daya manusia); pilar kedua (pertahanan, keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum); dan ketujuh (diplomasi maritim) apabila merujuk pada pedoman kebijakan kelautan Indonesia. Ketiga pilar tersebut dapat dideskripsikan melalui agenda ini, terlebih dalam pilar kedua yang erat kaitannya dengan tugas dan fungsi Bakamla RI sebagai instansi yang berwenang di laut. Pilar kedua (pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum di laut) yang bertujuan untuk menegakkan kedaulatan-hukum, memertahankan NKRI seutuhnya, hingga melindungi segenap masyarakat dari adanya hambatan, ancaman, bahkan tantangan di laut¹³¹. Korelasi antara tujuan tersebut dengan tupoksi Bakamla RI; sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2014. Tercantumkan bahwa instansi memiliki tugas yakni menjalankan

¹³¹ Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman RI, “Kebijakan Kelautan Indonesia.”

patroli keamanan serta keselamatan di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia.

Berikut adalah kompilasi antar pilarnya;

Bentuk Diplomasi Maritim	Pilar Kebijakan Kelautan Indonesia							Keterangan
	I	II	III	IV	V	VI	VII	
Latihan dan Operasi Bersama dengan Coast Guard Lain	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>	Adapun pilar yang terpenuhi, meliputi: Pilar I, II, dan VII. Berikut merupakan refleksi ketiga pilar. Pilar I: Dalam pilar pengembangan sumber daya manusia yang ditunjukkan melalui peningkatan pemahaman bersama antar personel <i>coast guard</i> untuk menangani insiden pelanggaran di laut, seperti pendeteksian, penghalauan, dan responsif terhadap aktivitas maritim ilegal. Pilar II: Tergambarkan jelas dalam kegiatan latihan dan operasi bersama antar penjaga pantai ini yang memperlihatkan adanya upaya kolaborasi menjaga stabilitas keamanan. Pilar VII: unsur diplomasi maritim, ditunjukkan melalui keterlibatan antara Bakamla RI dengan beberapa <i>coast guard</i> lain yang mencakup diantaranya 6 lembaga; bahkan terdapat beberapa instansi dalam negeri.

Tabel 2.7. Kompilasi Pilar Kebijakan Kelautan Indonesia dalam Joint Maritime Security Operations melalui Latihan dan Operasi Bersama dengan Coast Guard Lain

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Penjelasan keterangan di atas memiliki keterkaitan dalam rangka mengimplementasikan tugas dan fungsinya yang berkaitan dengan ketiga pilar di atas, untuk itu diselenggarakanlah latihan dan operasi bersama. Menurut PP Nomor 13 Tahun 2022 Pasal 20 ayat (1) menyebutkan latihan bersama dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan interoperabilitas¹³² sekaligus kapabilitas para personel ketika patroli¹³³. Sedangkan, patroli terkoordinasi adalah patroli yang dilakukan secara bersama dengan instansi negara lain terkait di kawasan berdasarkan perjanjian kerja sama. Adapun serangkaian kegiatan yang telah terlaksana selama kurun waktu lima tahun, sebagai berikut:

Tahun 2017

- a. Pada tahun ini, tidak ada pelaksanaan latihan bersama dengan *coast guard* lain. Sebagaimana yang diinformasikan oleh Mayor Bakamla Angga Heriyana, S.T. selaku Kepala Seksi Perencanaan Latihan Operasi Laut¹³⁴,

“Pada tahun 2017 tidak ada pelaksanaan Latihan dengan coast guard negara lain akan tetapi ada Latihan bersama Penanganan/ Pencegahan Penyelundupan Narkoba di wilayah perairan Indonesia dengan instansi lain di Indonesia di Sulawesi Utara dan disaksikan oleh peserta Maritime Security Desktop Exercise (MSDE) yang terdiri dari 21 Negara Asia dan Australia.

¹³² Interopabilitas diartikan sebagai kemampuan dalam pertukaran informasi yang ditandai dengan pemahaman yang sama terkait informasi yang ditukarkan.

¹³³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.

¹³⁴ Heriyana, “Hasil Wawancara Dengan Mayor Bakamla Angga Heriyana, S.T. Terkait Penyelenggaraan Latihan Dan Operasi Bersama Dengan Coast Guard Lain.”

Adapun Latihan yang dilaksanakan dengan tujuan

- a. Peserta dapat pengetahuan dasar dalam bentuk teori maupun praktek pendeteksian narkoba yang melalui jalur laut;
- b. Meningkatkan kemampuan peserta dalam penanganan penyelundupan narkoba saat melakukan pemeriksaan di kapal; dan
- c. Para peserta dapat mempraktekkan beberapa prosedur peran-peran umum yang ada di kapal secara langsung dengan *driil* kering dalam penanganan narkoba.”

Tahun 2018

- a. Penyelenggaraan latihan bilateral antara Bakamla RI dan Japan Coast Guard bersama empat instansi kewenangan laut, meliputi Polair, KPLP, Basarnas, dan KKP di Perairan Utara Jakarta. Dalam rangka menjaga keamanan dan keselamatan di laut, partisipasi beberapa pihak melaksanakan serangkaian formasi latihan diantaranya formasi komunikasi Tsugaru PLH-02 (*Flash, Whistle, dan Flag*). Lalu, dilanjutkan dengan formasi pencarian *suspect ship search training* oleh KN. Tanjung Datu 1101 terhadap kapal yang diduga melakukan penyelundupan narkoba.
- b. Penyelenggaraan patroli terkoordinasi (Patkor Optima Malindo) seri 27B/18 oleh Bakamla RI bersama *stakeholder* penegak hukum dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia di sepanjang Selat Malaka. Dalam rangka kerja sama yang telah terjalin diantara kedua belah pihak di bawah naungan Tim Perancang Operasi Maritim (TPOM), Malaysia memobilisasi sebanyak sebelas kapal patroli beserta tiga pesawat patroli udara. Sedangkan Indonesia

mengerahkan tujuh kapal patroli. Tujuh kapal patroli terdiri dari KP Hiu Macan Tutul 02 dari PSDKP; BC 7004 dari Ditjen Bea Cukai; KN Bintang Laut 4801 dari Bakamla RI; KP Taka 3010 dari Polair; KRI Silea 858 dan Sigurot 864 dari TNI AL.

- c. Penyelenggaraan patroli terkoordinasi oleh Bakamla RI bersama Australian Border Force dan Maritime Border Command di wilayah perbatasan Indonesia-Australia. Dalam rangka meningkatkan keamanan laut di kawasan, operasi ini dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun. Pada tahun 2018, terhitung telah mencapai delapan kali aktivitas.

Diplomasi Kooperatif	Aktor	Tujuan
i. Latihan bilateral	Bakamla RI; Polair; KPLP; Basarnas; dan KKP. Japan Coast Guard	Dalam rangka menjaga keamanan dan keselamatan di laut.
ii. Patroli terkoordinasi (Patkor Optima Malindo) seri 27B/18	Bakamla RI; TNI AL; PSDKP; Ditjen Bea Cukai; Polair Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia	Dalam rangka kerja sama yang telah terjalin diantara kedua belah pihak.
iii. Patroli terkoordinasi	Bakamla RI; Australian Border Force; Maritime Border Command	Dalam rangka meningkatkan keamanan laut di kawasan.

Tabel 2.8. Rangkuman Aktivitas Latihan dan Operasi Bersama antara Bakamla RI dengan Beberapa Pihak Tahun 2018

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Tahun 2019

- a. Penyelenggaraan latihan bersama oleh Bakamla RI dan Indian Coast Guard dalam rangka memperingati 70 tahun hubungan diplomatik keduanya. Latihan Mock Drill dilaksanakan oleh sejumlah personel Special Response Team (SRT)

Bakamla RI bersama VBSS Indian Coast Guard Ship (ICGS) supaya kemampuannya meningkat kuat dan terampil dalam menghadapi dinamika tindak kejahatan di laut. Mulanya, aktivitas ini berlangsung selama beberapa hari di Indonesia; kemudian berlanjut menuju Darwin Australia dengan melepas keberangkatan kapal Shaurya 16 sebagai kunjungan diplomatik di Dermaga Jakarta Internasional Container Terminal (JICT) 2 Pelabuhan Tanjung Priok oleh Bapak Kolonel Salim, S.E. selaku Plt. Direktur Kerja Sama. Sebelum keberangkatan, Deputy Inspector General Jyotindra Singh menyampaikan pernyataan rasa terima kasih atas penyambutannya dari kedatangan hingga akhir keberangkatan oleh Bakamla RI.

- b. Penyelenggaraan patroli terkoordinasi (Operasi Gannet 19-2) selama enam hari oleh Bakamla RI bersama KKP dan Maritime Border Command (MBC) sekaligus Australian Border Force (ABF) di wilayah perbatasan Indonesia-Australia, terutama Laut Timor. Dalam rangka meningkatkan kerja sama dan kolaborasi kedua pihak untuk melaksanakan pendeteksian, penghalauan, dan responsif terhadap aktivitas maritim ilegal; serta menguatkan hubungan baik.
- c. Penyelenggaraan patroli terkoordinasi oleh Timsus Trisula dan Agensi Penguatkuasaan. Dalam rangka pengamanan tindak ilegal di Perairan Indonesia, Timsus Trisula yang terdiri dari Bakamla RI, TNI AL, Bea Cukai, dan Polair beserta Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) berhasil menangkap kapal yang diduga memuat miras dari Singapura. Insiden tersebut, bermula pada kapal pemuat miras mengetahui keberadaan Kapal Patroli RI di Perairan Kepri; sehingga putar haluan demi menghindar dan masuk ke Perairan Malaysia. Akan

tetapi, aksinya berhasil diketahui; dan tertangkap berkat kerja sama dan koordinasi yang dilakukan Bakamla RI dengan APMM.

- d. Penyelenggaraan latihan bersama *South East Asia Cooperation and Training* (SEACAT) diikuti oleh sejumlah personel Bakamla RI zona maritim barat di Perairan Asia Tenggara, Singapura, dan Filipina. Agenda ini meliputi latihan bersama Command Post Exercise (CPE) dan Field Training Exercise (FTX) dengan instruktur dari Amerika. Para peserta mempelajari materi latihan hukum laut, mengasah kemampuan *boarding party*, serta peran pemeriksaan terhadap kapal target. Adapun kegiatan ini dilaksanakan oleh Direktorat Latihan sebagai Latihan Multilateral yang diprakarsai oleh US di bidang keamanan maritim (MARSEC) dan *information sharing* di Asia Tenggara.

Diplomasi Kooperatif	Aktor	Tujuan
i. latihan bersama (Mock Drill)	Bakamla RI Indian Coast Guard	Dalam rangka memperingati 70 tahun hubungan diplomatik keduanya.
ii. Patroli terkoordinasi (Operasi Gannet 19-2)	Bakamla RI; KKP Maritime Border Command (MBC); Australian Border Force (ABF)	Dalam rangka meningkatkan kerja sama dan kolaborasi kedua pihak
iii. Patroli terkoordinasi	Timsus Trisula (Bakamla RI, TNI AL, Bea Cukai, dan Polair) Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia	Dalam rangka pengamanan tindak ilegal di Perairan Indonesia
iv. Latihan bersama multilateral (SEACAT) yang diprakarsai US	Indonesia: Bakamla RI; TNI AL Singapura; Malaysia, Thailand, Brunei Darusalam; Filipina; Sri Lanka, Vietnam; Kamboja; Amerika	Meningkatkan kerja sama antar negara dalam komunikasi maupun berkoordinasi terhadap tindak pidana di laut

Tabel 2.9. Rangkuman Aktivitas Latihan dan Operasi Bersama antara Bakamla RI dengan Beberapa Pihak Tahun 2019

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Tahun 2020

- a. Bakamla RI dan Japan Coast Guard menggelar Latihan Jarak Jauh (*Long Distance Learning*) yang difokuskan terhadap materi penegakan hukum di laut. Kegiatan ini berlangsung selama empat hari secara daring; dimana sebanyak 70 peserta mengikuti termasuk perwakilan dari Tiga Zona Maritim, Tiga Pangkalan Armada, dan Awak Kapal Negara. Setelah sesi pembukaan acara oleh Kepala Bakamla RI Bapak Laksdya TNI Aan Kurnia, S.Sos., M.M. dan Komandan JCG Admiral Okushima Takahiro; selanjutnya terdapat pertemuan bilateral diantara keduanya.
- b. Operasi Gannet yang merupakan patroli terkoordinasi untuk menjaga keamanan dan keselamatan di wilayah perbatasan termasuk memberantas praktik ilegal mencakup *illegal fishing*. Adapun operasi ini adalah implementasi dari Indonesia-Australia Joint Declaration on Maritime Cooperation yang telah ditandatangani tahun 2017 dan Arrangement Bakamla RI–Australian Border Force tentang Maritime Security Cooperation tahun 2017.

Diplomasi Kooperatif	Aktor	Tujuan
i. Latihan Jarak Jauh (Long Distance Learning)	Bakamla RI Japan Coast Guard	Meningkatkan kerja sama dalam keamanan dan keselamatan maritim melalui pengembangan kemampuan personel
ii. Patroli terkoordinasi (Operasi Gannet)	Bakamla RI Australian Border Force	Meningkatkan kerja sama dalam keamanan dan keselamatan

		maritim terutama IUU Fishing
--	--	------------------------------

Tabel 2.10. Rangkuman Aktivitas Latihan dan Operasi Bersama antara Bakamla RI dengan Beberapa Pihak Tahun 2020

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Tahun 2021

- a. USCGC Munro (kapal milik U.S. Coast Guard) melakukan rangkaian operasi dan latihan bersama KN. Pulau Dana 323 (kapal milik Bakamla RI) di Selat Singapura. Adapun latihan tersebut meliputi: latihan komunikasi antar kapal, manuver multi-unit, dan kesadaran maritim.
- b. Australian Border Force (ABF), Bakamla RI, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP), dan Australian Fisheries Management Authority (AFMA) melaksanakan Operasi Gannet yang kelima kalinya pada wilayah perbatasan maritim Indonesia-Australia.
- c. Bakamla RI menggelar latihan bersama U.S. Coast Guard yang bertajuk Maritime Operational Threat Response (MOTR) secara daring. Adapun kegiatan ini merupakan upaya dalam menyiapkan personel untuk memahami konsep kejadian keamanan di laut dengan baik seraya penanganan yang tepat dan optimal. Jadi, MOTR akan memaparkan penanganan kasus-kasus di laut melalui pertukaran pengalaman selama bertugas; dimana USCG Senior Maritime Advisor Jim Duval bertindak sebagai instruktur dan Deputy Director Global Maritime Operational Threat Response Coordination Center (GMCC) Brian Wilson yang memberikan panduan dan penanganan terbaik atas beberapa insiden laut. Dan aktivitas turut didukung oleh *International Narcotics and Law Enforcement* (INL), Kedutaan Besar AS untuk Indonesia.

Diplomasi Kooperatif	Aktor	Tujuan
i. Latihan bersama	Bakamla RI U.S. Coast Guard	Mengingat eratnya hubungan kerja sama, sehingga diadakan <i>passing exercise</i> bersama meskipun pertemuan kedua kapal tidak sengaja sebab masing-masing memiliki agenda ketika itu.
ii. Patroli terkoordinasi (Operasi Gannet)	Bakamla RI; Ditjen PSDKP Australian Border Force; Australian Fisheries Management Authority	Bentuk komitmen bersama dalam menguatkan keamanan. Atau bisa disebut juga implementasi dari kerja sama maritim antara Indonesia-Australia yakni Joint Declaration on Maritime Cooperation
iii. Latihan bersama	Bakamla RI U.S. Coast Guard	Dalam rangka meningkatkan kemampuan personel untuk memahami konsep insiden di laut dan cara menanganinya.

Tabel 2.11. Rangkuman Aktivitas Latihan dan Operasi Bersama antara Bakamla RI dengan Beberapa Pihak Tahun 2021

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Selama lima tahun berselang, keterlibatan beberapa personel *coast guard* negara lain memperlihatkan adanya upaya koletif dalam meningkatkan kapabilitas para personel untuk menghadapi isu keamanan dan keselamatan di laut. Tidak sampai di situ saja, aktivitas ini merujuk pada meningkatkan rasa saling percaya yang sekaligus mencapai beberapa pilar kebijakan kelautan Indonesia dalam mewujudkan visi PMD.

b) Ditinjau secara Persuasif

Ditinjau secara persuasif mengartikan bahwa, aksi diplomasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengakuan atas kekuatan maritim atau nasional sebuah negara yang sekaligus dapat membangun reputasi di kancah internasional. Melalui peran

membangun marwah sekaligus menjalin sinergitas antar instansi, Bakamla RI melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya:

1. *Showing the Flag* melalui,

1.1. Kontribusi dalam Membentuk Asean Coast Guard Forum (ACF)

Mengacu pada Le Miere, peran Bakamla RI dalam mewujudkan poros maritim dunia melalui pembentukan ACF termasuk menghadirkan eksistensinya di panggung internasional. Menunjukkan kehadiran disini, dimaknai dengan kontribusinya dalam mendorong gagasan lewat penyelenggaraan forum-forum yang mendiskusikan urgensi Asean Coast Guard Forum, dan sebagainya. Tidak sampai di situ saja, untuk meninjau keterkaitan aksi dengan visi PMD dibutuhkan kaca mata indikator yakni tujuh pilar kebijakan kelautan Indonesia. Apabila merujuk pedoman tersebut, aktivitas ini terkait dengan pilar kedua (pertahanan, keamanan, keselamatan, ataupun penegakan hukum) dan ketujuh (diplomasi maritim). Berikut merupakan kompilasi pilar-pilarnya;

Bentuk Diplomasi Maritim	Pilar Kebijakan Kelautan Indonesia							Keterangan	
	I	II	III	IV	V	VI	VII		
Kontribusi dalam Membentuk Asean Coast Guard Forum (ACF)		<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>	Adapun agenda pembentukan termasuk dalam kategori pilar II dan VII. Berikut merupakan refleksi keduanya. Pilar II: Unsur pilar pertahanan dan keamanan ditunjukkan melalui pertimbangan instansi dalam mendukung persoalan ini; yang tentu saja berkaitan dengan menjadikan forum

									<p>sebagai mekanisme dialog antar coast guard sekaligus lembaga penegak hukum kemaritiman.</p> <p>Pilar VII: Untuk diplomasi maritimnya, tercerminkan pada keikutsertaan 15 partisipan dari berbagai negara diantaranya Thailand, Filipina, Kamboja, hingga Vietnam.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabel 3. Kompilasi Pilar Kebijakan Kelautan Indonesia dalam Showing the Flag melalui Kontribusi Membentuk Asean Coast Guard Forum (ACF)

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Adapun, pemaparan di atas dapat dijabarkan melalui serangkaian aktivitas pembentukan ACF berikut ini. ACF adalah forum yang diinisiasi oleh Filipina sejak tahun 2014. Pada waktu itu, terdapat dua pertemuan yang mendiskusikan pembentukan forum ini yakni Asean Maritime Forum (EAMF) ke-5 dan ASEAN Regional Forum (ARF)¹³⁵. Dalam EAMF ke-5, para partisipan mendialogkan terkait pendiriannya sebagai sebuah *platform* untuk berkoordinasi dan bekerja sama bagi para *coast guard* ASEAN dan badan penegak hukum laut. Sederhananya, ACF diproyeksikan untuk mengatasi berbagai ancaman di laut secara kolektif di kawasan; sebagaimana yang dijelaskan oleh Mayor Bakamla Kustriyani, S.T., M.Eng.Sc selaku Analis Kebijakan Ahli Muda Direktorat Kerja Sama¹³⁶, “Untuk mendorong sentralitas ASEAN, khususnya dalam mengatasi ancaman-ancaman

¹³⁵ James D. Llewelyn, “Preventive Diplomacy and the Role of Civil Maritime Security Cooperation in Southeast Asia,” *Strategic Analysis* 41, no. 1 (2017): 49–60, <https://doi.org/10.1080/09700161.2016.1249178>.

¹³⁶ Kustriyani, “Wawancara Dengan Analis Kebijakan Ahli Muda Direktorat Kerja Sama Terkait Maritime Security Dekstop Exercise (MSDE), Asean Coast Guard Forum (ACF), Indian Ocean Rim Association (IORA), Asean Regional Forum (ARF), Kehadiran Bakamla RI Dan TNI AL Di Peraira.”

maritim nontradisional yang merupakan kepentingan bersama negara di Kawasan.” Kesadaran akan pentingnya forum ini juga dinyatakan oleh Lettu Vida Gessy Zerlina, S.Hum selaku Analis Kerja Sama, Seksi Kerja Sama Multilateral dan Organisasi Internasional yang menyandarkan dua pertimbangan¹³⁷, “Yang pertama, memang belum ada perkumpulan khusus penjaga pantai/*coast guard* di lingkup ASEAN; yang kedua, wilayah-wilayah Indonesia berbatasan dengan negara-negara tetangga sehingga tidak terlepas dari insiden pergesekan.” Adanya potensi terhadap ancaman keamanan sekaligus ketiadaan forum khusus *coast guard* akhirnya mendorong gagasan pembentukan forum. Oleh karenanya dalam rangka percepatan pembentukan forum, Bakamla RI menjadi tuan rumah dalam dua agenda demi



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹³⁷ Karisma, “Laporan Magang Badan Keamanan Laut Republik Indonesia ‘Optimalisasi Diplomasi Maritim Dalam Mewujudkan Visi PMD: Studi Kasus Diplomasi Maritim Badan Keamanan Laut RI Tahun 2019-2021.’”

mendialogkan persoalan tersebut yaitu 3rd Expert Group Meeting of Establishment ACF tahun 2019; dan Joint Commander Coast Guard Meeting di tahun 2022.



Gambar 6. 3rd Expert Group Meeting on the Establishment of Asean Coast Guard Forum (EGF on ACF)

Sumber: Official Website Tentara Nasional Indonesia

Pada tahun 2019, pertemuan yang diikuti 15 peserta ini membahas terkait ACF dan menghasilkan kesimpulan bahwa sebagian besar peserta mendukung, sedangkan sebagian kecilnya masih kurang setuju. Sebagian kecil yang tidak sependapat menganggap bahwa ACF adalah bentuk duplikasi HACGAM. Merespon perbedaan, Bakamla RI turut mengajak untuk memusyawarahkan kembali urgensi pembentukan forum melalui penyelenggaraan Joint Commander Coast Guard Meeting di Tahun 2022. Kedua pertemuan itu, akan dilanjutkan lagi dengan pertemuan HACGAM yang diikuti oleh para *coast guard* dan lembaga penegak hukum di laut pada November 2022. Seperti yang dinyatakan

oleh Mayor Bakamla Kustriyani, S.T., M.Eng.Sc selaku Analis Kebijakan Ahli Muda Direktorat Kerja Sama¹³⁸, “Pada November 2022 akan dilaksanakan pertemuan yang akan dihadiri oleh para kepala Coast Guard dan Maritime Law Enforcement AMS dengan tujuan untuk mendapatkan kesepakatan seluruh AMS untuk membentuk ACF.” Jadi, secara garis besar yang dapat dipahami ialah serangkaian proses tersebut tidak serta merta mendapatkan persetujuan dari seluruh partisipan. Adanya perbedaan pendapat tidak menyurutkan upaya Bakamla RI untuk mendorong pembentukan forum yang dinilai sebagai kepentingan bersama. Kontribusi yang dilakukan dengan menindaklanjuti rencana pembentukan forum hingga menjadi tuan rumah sebanyak tiga kali telah merefleksikan kehadirannya di kawasan.

1.2. Kehadiran Bakamla RI dan TNI AL di Perairan Natuna



Gambar 6.1. Rapat Terbatas di Atas Kapal KRI Imam Bonjol 383

Sumber: Liputan6.com

¹³⁸ Kustriyani, “Wawancara Dengan Analis Kebijakan Ahli Muda Direktorat Kerja Sama Terkait Maritime Security Dekstop Exercise (MSDE), Asean Coast Guard Forum (ACF), Indian Ocean Rim Association (IORA), Asean Regional Forum (ARF), Kehadiran Bakamla RI Dan TNI AL Di Peraira.”

Agenda rapat terbatas (Ratas) yang diselenggarakan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2016 merupakan sinyal kemampuan sekaligus kehadiran Indonesia di wilayah perairan maupun yurisdiksi Indonesia. Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Le Miere, bahwa bentuk diplomasi maritim persuasif bertujuan untuk memberikan sinyal atas kemampuan maupun eksistensi. Kemudian, kategori ini memiliki keterkaitan dengan pedoman kebijakan kelautan Indonesia ketika menelaah hubungan aktivitas dengan mencapai visi PMD. Apabila merujuk pedoman tersebut, aksi ini termasuk dalam pilar kedua (pertahanan, keamanan, keselamatan, maupun penegakan hukum) dan ketujuh (diplomasi maritim). Berikut adalah kompilasi pilar-pilarnya;

Bentuk Diplomasi Maritim	Pilar Kebijakan Kelautan Indonesia							Keterangan	
	I	II	III	IV	V	VI	VII		
Kehadiran Bakamla RI dan TNI AL di Perairan Natuna		<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>	Beberapa insiden pelanggaran di Perairan Natuna merupakan persoalan yang masih dihadapi oleh Indonesia. Dalam konteksnya, sesuai hukum UNCLOS perairan ini termasuk zona ekonomi eksklusif yang artinya negara memiliki hak berdaulat. Dengan begitu, keberadaan kedua instansi di wilayah tersebut menandakan bahwa eksistensi negara hadir di laut nya sendiri. Pola ini sesuai dengan kategori persuasif (bukan koersif) dikarenakan tidak adanya bentuk pelanggaran wilayah yang dilakukan para instansi sebagai bentuk ancaman. Melainkan tindakan latihan bersama yang diadakan oleh

								<p>keduanya memperlihatkan sinergitas para aktor di laut. Adapun sikap ini termasuk dalam kategori pilar II dan VII. Berikut merupakan refleksi keduanya.</p> <p>Pilar II: pilar pertahanan dan keamanan sangat jelas digambarkan dalam aktivitas latihan bersama (kehadiran kedua instansi di Perairan Natuna) sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden.</p> <p>Pilar VII: unsur diplomasi maritim disini, tampak pada aksi yang dilakukan demi melindungi kepentingan nasional Indonesia.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

Tabel 3.1. Kompilasi Pilar Kebijakan Kelautan Indonesia dalam Showing the Flag melalui Kehadiran Bakamla RI dan TNI AL di Perairan Natuna

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Pemaparan dari kompilasi tersebut, dapat ditelisik melalui uraian kegiatan berikut ini. Dalam kesempatan Ratas, terdapat beberapa poin penting yang bisa digaris bawahi; terutama instruksi agar menyegerakan pembangunan di Natuna kepada menteri terkait. Seperti yang diketahui, wilayah Natuna adalah pulau terdepan; sehingga untuk meningkatkan konektivitas dan sektor ekonomi yang meliputi industri pariwisata, gas, ataupun perikanan membutuhkan pembangunan infrastruktur. Terlebih lagi, perihal sektor pertahanan yang diarahkan oleh presiden untuk meningkatkan frekuensi patroli sekaligus penjagaan di kawasan Natuna bagi TNI khususnya TNI AL dan Bakamla RI¹³⁹.

¹³⁹ Sekretariat Presiden Biro Pers Media dan Informasi, "Pengantar Presiden - Ratas Kabinet Kerja Tentang Natuna, Jakarta, 29 Juni 2016 | Sekretariat Negara," 2016, https://www.setneg.go.id/baca/index/pengantar_presiden_-_ratas_kabinet_kerja_tentang_natuna_jakarta_29_juni_2016.

Sebagaimana diketahui, permasalahan klaim wilayah secara historis oleh Tiongkok memicu perdebatan di kalangan internasional yang hakikatnya merujuk pada ketentuan hukum laut internasional (UNCLOS 1982). Pada akhirnya, klaim tersebut menjadi dalih mereka ketika melakukan aktivitas di laut dengan menggunakan kapal ikan, hingga kapal *coast guard* yang pernah memasuki ZEE. Di tahun 2016, setidaknya 3 kali insiden pelanggaran sampai terjadi tindak pengejaran dramatis; bahkan pemerintah mereka melayangkan protes kepada Indonesia¹⁴⁰. Padahal, Perairan Natuna adalah wilayah ZEE yang termasuk yurisdiksi negara; artinya Indonesia memiliki hak berdaulat untuk mengelola, mengkonservasi, eksplorasi sumber daya hayati-non hayati. Fakta tersebut sejalan berdasarkan hukum laut internasional (UNCLOS 1982), pada Pasal 56 yang telah mengatur mengenai hak, yurisdiksi, serta kewajiban negara pantai dalam ZEE¹⁴¹.

Dengan keberlangsungan insiden pelanggaran hingga terjadi penangkapan dan berujung pada rasa keberatan oleh pemerintah Tiongkok. Tidak berselang lama dari hal tersebut, presiden mengadakan rapat terbatas di atas kapal KRI Imam Bonjol. Dalam ratas ini, diketahui terdapat beberapa arahan yang dimaknai sebagai pertama ‘instruksi’ bahwasanya membutuhkan keterlibatan antar aktor di atas terhadap sektor keamanan. Lantas, TNI AL bersama Bakamla RI berupaya hadir untuk mengamankan perairan maupun wilayah yurisdiksi negara. Dapat diketahui keduanya melaksanakan latihan bersama di tahun 2021, setelah menghalau kapal

¹⁴⁰ “Kemelut Indonesia-China Di Natuna Sepanjang 2016,” June 2016, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160621100151-20-139694/kemelut-indonesia-china-di-natuna-sepanjang-2016>.

¹⁴¹ “UNCLOS 1982_Terjemahan” (n.d.), [https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pondukung/djprl/P4K/Pencemaran Laut/unclos_terjemahan\(1\).doc](https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pondukung/djprl/P4K/Pencemaran%20Laut/unclos_terjemahan(1).doc).

Kiem Ngu 215 milik Vietnam yang sering masuk Natuna Utara. Latihan antara KN Tanjung Datu 301 dan KRI Usman Harun 359 menunjukkan adanya sinergitas antar keduanya yang diperlihatkan dalam latihan manuver taktis, formasi, sekaligus komunikasinya. Hal itu menjadi indikasi eksistensi kedua Instansi sebagai postur keamanan Indonesia yang hadir di Kawasan, yang mampu menjaga wilayahnya. Argumentasi tersebut diperkuat melalui pernyataan dari Mayor Bakamla Kustriyani, S.T., M.Eng.Sc selaku Analis Kebijakan Ahli Muda Direktorat Kerja Sama¹⁴²,

“Betul. Kehadiran Bakamla RI dan TNI AL adalah sebuah bentuk kehadiran negara yang dapat menimbulkan efek *deterrence* untuk melindungi kepentingan nasional yaitu kedaulatan dan stabilitas Kawasan. *Deterrence* ini menjadi sangat penting untuk mencapai target kepentingan nasional serta bentuk peran aktif Indonesia di Kawasan tanpa menimbulkan potensi konflik.”

Efek penggentar secara langsung yang ditampilkan melalui aksi rapat terbatas sekaligus jadwal latihan bersama di Perairan Natuna tentu menjadi langkah strategis.

1.3. Turut Andil ke dalam Forum Internasional, diantaranya:

Keikutsertaan Bakamla RI dalam forum-forum internasional menjadi bagian dari peran diplomasi maritim di sektor keamanan, keselamatan, maupun

¹⁴² Kustriyani, “Wawancara Dengan Analis Kebijakan Ahli Muda Direktorat Kerja Sama Terkait Maritime Security Dekstop Exercise (MSDE), Asean Coast Guard Forum (ACF), Indian Ocean Rim Association (IORA), Asean Regional Forum (ARF), Kehadiran Bakamla RI Dan TNI AL Di Perairan.”

penegakan hukum. Pada dasarnya, eksistensi ini memang sejalan dengan pilar-pilar kebijakan kelautan Indonesia; dimana terdapat unsur partisipasi antar aktor lintas batas hingga bidang yang dikerjakan mengarah kepada pilar kedua (pertahanan, keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum) dan ketujuh (diplomasi maritim). Lebih rincinya, berikut adalah kompilasi pilar-pilar nya;

Bentuk Diplomasi Maritim	Pilar Kebijakan Kelautan Indonesia							Keterangan	
	I	II	III	IV	V	VI	VII		
Turut Andil ke dalam Forum Internasional (HACGAM, IORA, ARF)		<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>	Adapun agenda ini termasuk dalam kategori pilar II dan VII. Berikut merupakan refleksi keduanya. Pilar II: Tentu saja, keikutsertaan instansi dalam forum-forum internasional berkaitan dengan bidang keamanan dan keselamatan maritim. Dalam HACGAM, instansi menjadi perwakilan sebagaimana Indonesia sebagai negara anggota forum ini. Adapun, kontribusi yang dilaksanakan oleh Bakamla RI meliputi mengadakan pelatihan hukum laut dalam rangka meningkatkan kapasitas para personel hingga menjadi ketua dalam Working Group sebagaimana instansi menjadi <i>lead pillar capacity building</i> . Sedangkan, dalam IORA kedudukan instansi sebagai peserta yang diundang pada forum, mengingat tupoksinya terkait dengan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di laut. Pada kesempatannya,

										<p>kontribusi yang diberikan yaitu mengikuti diskusi hingga memberikan masukan mengenai berbagai persoalan diantaranya membangun pemahaman bersama tentang peluang dan ancaman; hingga menetapkan pendekatan kebijakan terpadu tentang Keselamatan dan Keamanan Maritim termasuk melalui peningkatan kapabilitas maupun kapasitas. Begitu pula dengan forum ARF, instansi berkedudukan sebagai partisipan yang diundang oleh forum ini. Adapun kontribusi yang dilakukan oleh Bakamla RI ialah menjadi co-chair penyelenggaraan <i>workshop</i>.</p> <p>Pilar VII: unsur diplomasi maritim telah tergambarkan dengan jelas melalui paparan dalam pilar II.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabel 3.2. Kompilasi Pilar Kebijakan Kelautan Indonesia dalam Showing the Flag melalui Keikutsertaan dalam Forum Internasional seperti HACGAM, IORA, ARF

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Adapun pemaparan di atas dapat diamati melalui serangkaian aktivitas HACGAM, IORA, maupun ARF sebagai berikut;

1.3.1. HACGAM/Heads of Asian Coast Guard Agencies Meeting

Heads of Asian Coast Guard Agencies Meeting (HACGAM) ialah sebuah pertemuan tahunan dari berbagai instansi yang berfungsi sebagai *coast guard*; dimana forum ini diinisiasi oleh Japan Association of Maritime Security (JAMS)

dan Nippon Foundation¹⁴³. Pada tahun 2004, keberadaan HACGAM terbentuk hanya untuk bertukar informasi mengenai persoalan keamanan maritim khususnya *Piracy and Armed Robbery* dengan fokus *Capacity Building*. Seiring perkembangannya, forum ini ditujukan untuk menciptakan dan mengembangkan kapasitas para *coast guard* di Asia seraya membangun kerja sama sekaligus mengamankan kawasan perairan agar terbebas dari perompakan dan perompakan bersenjata yang insiden tersebut masih tergolong cukup tinggi terutama di Selat Malaka¹⁴⁴. Kerja sama dalam penanganan tersebut pun juga akan membawa beberapa manfaat meliputi: peningkatan efektivitas misi yang akan dicapai hingga berkenaan dengan perluasan bidang kerja sama baru, mendapatkan praktik terbaik melalui pertukaran informasi serta pelatihan, dan sebagainya¹⁴⁵. Maka, eksistensi *coast guard* sangat diperlukan dengan adanya penanganan bersama oleh negara-negara kawasan.

Adapun keterlibatan Bakamla RI sebagai lembaga yang melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia; telah aktif ke dalam HACGAM yang menjadi salah satu peran diplomasi maritim oleh instansi. Dengan kontribusi aktifnya, akhirnya menjadikan Bakamla RI terpilih menjadi Chair Capacity Building. Selanjutnya di tahun 2020, lembaga mengadakan program latihan yang bertemakan “*Law of The Sea and Maritime Enforcement Training*” secara daring bersama 17 negara anggota HACGAM yang resmi dibuka

¹⁴³ Cassidy et al., “Diplomasi Poros Maritim: Keamanan Maritim Dalam Perspektif Politik Luar Negeri.”

¹⁴⁴ Ramadhanti, “Diplomasi Maritim Indonesia Terhadap Hacgam (Head Of Asian Coast Guard Agency Meeting) Dalam Mewujudkan Indonesia Poros Maritim Dunia Tahun 2016-2017.”

¹⁴⁵ Turkish Coast Guard Command, “Heads of Asian Coast Guard Agencies Meeting (HACGAM),” October 2017, <https://en.sg.gov.tr/hacgam>.

oleh Direktur Kerja Sama Bakamla RI Bapak Laksma Retiono Kunto H., S.E., dan Direktur Eksekutif Program Jakarta Center for Law Enforcement Center (JCLEC) Federal Agent Greg Davis. Pelatihan ini, telah diselenggarakan secara rutin sejak 2017; mengingat bahwa instansi Bakamla RI adalah salah satu *lead pillar* dalam sektor *Capacity Building*.

Dalam aktivitas terbarunya, telah diselenggarakan acara Working Level Meeting for the 17th HACGAM pada 30 September 2021. Adapun agenda ini diadakan secara virtual oleh Vietnam Coast Guard dan Japan Coast Guard bersama partisipan serta *observer*/pengamat sebanyak 20 delegasi dan satu region meliputi: Australia, Bahrain, Bangladesh, Brunei, Thailand, Myanmar, Kamboja, Maladewa, Tiongkok, India, Indonesia, Turki, Jepang, Korea, Malaysia, Pakistan, Filipina, Singapura, Sri Lanka, Vietnam, dan Hong kong. Sementara itu, ReCAAP-ISC berpartisipasi sebagai anggota asosiasi dan Perancis. Untuk Bali Process dan GMCP-UNODC sebagai pengamat. Kemudian, pada sesi diskusi Working Group (WG) dipimpin oleh India, Filipina, Australia, dan Indonesia sebagai Ketua WG on *Search and Rescue*/Pencarian dan Penyelamatan, *Environment Protection*/Perlindungan Lingkungan, *Preventing and Controlling Unlawful Acts at Sea*/Pengendalian Tindakan Melanggar Hukum di Laut, dan *Capacity Building*. Lantas, secara garis besar dalam pembahasan saat itu ialah terkait dengan website HACGAM, kehadiran dari partisipasi Perancis, Laporan Kerja untuk Kelompok Kerja/Pokja, dan lain-lain. Dengan demikian, melalui forum HACGAM; dapat diketahui bahwasanya eksistensi Bakamla RI di panggung internasional termasuk aktif bahkan terpilih menjadi ketua *Capacity Building*.

1.3.2. IORA/Indian Ocean Rim Association

IORA adalah organisasi regional yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian bagi seluruh negara anggota melalui kerja sama; terutama menghilangkan hambatan perdagangan hingga memfasilitasi perdagangan di kawasan Samudera Hindia dengan 23 negara anggota dan 10 mitra dialog. Adapun prioritas dalam kerjanya, meliputi: pertama, keamanan dan keselamatan maritim; kedua, manajemen risiko bencana; ketiga, pertukaran kebudayaan dan pariwisata; keempat, fasilitasi perdagangan dan investasi; kelima, kerja sama akademis dan ilmu pengetahuan-teknologi; keenam, manajemen perikanan¹⁴⁶.

Dalam kaitannya dengan pembahasan ini, isu keselamatan dan keamanan maritim menjadi salah satu prioritas. Seperti yang diketahui, bahwa wilayah Samudera Hindia menjumpai berbagai tantangan keamanan tradisional maupun non tradisional meliputi perampokan bersenjata di laut, perdagangan narkoba, perdagangan senjata, perdagangan gelap satwa liar, penangkapan ikan secara ilegal, eksploitasi sumber daya laut, terorisme, pembajakan, dan lain sebagainya. Menyadari akan hal itu, IORA menetapkan MMS di tahun 2011 selaku prioritas isu dimana area Samudra Hindia adalah daerah transit utama bagi perdagangan internasional. Aktivitas peningkatan kerja sama di bidang keamanan dan keselamatan telah mengimplementasikan beberapa diantaranya: “IORA Working Group on MSS” yang saat ini lagi mengembangkan rencana aksi IORA (2017-21) bersamaan atas agenda rencana kerja MMS.

¹⁴⁶ Kementerian Luar Negeri Indonesia, “Indian Ocean Rim Association | Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia,” 2019, https://kemlu.go.id/portal/id/read/167/halaman_list_lainnya/indian-ocean-rim-association.

Pada tahun 2019, Indonesia turut berpartisipasi dalam Initial Workshop on the Establishment of the IORA Maritime Safety and Security Working Group di



Gambar 6.2. Bakamla RI sebagai Delegasi Indonesia dalam IORA Maritime Safety and Security Working Group

Sumber: Utamanews

Colombo, Sri Lanka. Bakamla RI selaku delegasi Indonesia menghadiri agenda ini selama dua hari bersama perwakilan 20 negara lainnya yakni India, Thailand, Australia, Bangladesh, Singapura, Afrika Selatan, Saudi Arabia, Kenya, Somalia, Iran, Yaman, Tanzania, Comoros, Pakistan, Malaysia, Seychells, Madagaskar, Marisia, dan Mozambik. Sebagaimana pula, yang diinformasikan oleh Mayor Bakamla Kustriyani, S.T., M.Eng.Sc selaku Analis Kebijakan Ahli Muda Direktorat Kerja Sama¹⁴⁷, “Bakamla RI diundang dalam forum ini mengingat tupoksinya terkait kemanan, keselamatan dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan yurisdiksi Indonesia.”

¹⁴⁷ Kustriyani, “Wawancara Dengan Analis Kebijakan Ahli Muda Direktorat Kerja Sama Terkait Maritime Security Dekstop Exercise (MSDE), Asean Coast Guard Forum (ACF), Indian Ocean Rim Association (IORA), Asean Regional Forum (ARF), Kehadiran Bakamla RI Dan TNI AL Di Peraira.”

Artinya, Indonesia hanya sebagai peserta yang menghadiri kegiatan IORA; dimana Bakamla RI terlibat sebagai partisipan yang turut diundang karena terdapat kesesuaian dengan pengangkatan isunya. Adapun, diskusi ini dipimpin oleh Sri Lanka yang membahas mengenai perumusan *Term of Reference* (TOR) Kelompok Kerja IORA di bidang keamanan dan keselamatan maritim; terutama yakni bagaimana membangun cara pandang bersama terkait risiko, ancaman, hingga peluang dalam aspek keamanan dan keselamatan maritim. Seperti yang disampaikan oleh Mayor Bakamla Kustriyani, S.T., M.Eng.Sc selaku Analis Kebijakan Ahli Muda Direktorat Kerja Sama¹⁴⁸,

“Membangun pemahaman bersama antara Negara-negara Anggota IORA tentang risiko, ancaman dan peluang Keselamatan dan Keamanan Maritim; menetapkan pendekatan kebijakan terpadu tentang Keselamatan dan Keamanan Maritim termasuk melalui peningkatan kapabilitas dan peningkatan kapasitas; membangun kemitraan dalam kerangka IORA untuk penguatan kapasitas dan kapabilitas serta pembinaan kelembagaan di bidang Keselamatan dan Keamanan Laut; dan meningkatkan Maritime Domain Awareness (MDA) di antara Negara Anggota IORA.”

Beberapa pembahasan di atas merupakan upaya bersama yang dilakukan oleh para partisipan demi menghadap keberadaan ancaman sekaligus peluang keamanan maritim di kawasan Samudera Hindia. Terlebih, ada *choke points* seperti Selat Hormuz, Selat Malaka, dan Selat Bab el Mandeb yang menjadi jalur pelayaran

¹⁴⁸ Kustriyani.

strategis untuk perdagangan; sebagaimana pelabuhan Samudera Hindia memegang 30% perdagangan dunia dan setengah dari lalu lintas di laut¹⁴⁹. Oleh sebab itu, keterlibatan delegasi pada forum IORA diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam menguatkan kerja sama regional.

1.3.3. ARF/Asean Regional Forum

Asean Regional Forum (ARF) ialah sebuah forum yang didirikan tahun 1994 sebagai wadah diskusi terkait persoalan politik-keamanan di kawasan; dimana dialog tersebut juga menyangkut tentang bagaimana menyatukan cara pandang antar negara para peserta dalam meminimalisir ancaman atas stabilitas keamanan. Adapun tujuan utama dari pendirian ini yakni: *yang pertama*, mampu berkontribusi positif untuk mengimplementasikan *preventif diplomacy* ataupun *confidence building* di kawasan Asia-Pasifik; *yang kedua*, merundingkan suatu isu politik-keamanan yang menjadi perhatian bersama¹⁵⁰. Forum ini juga diikuti sebanyak 27 negara, dengan 10 anggota ASEAN dan 17 negara lainnya. Pada tahun 2018, Bakamla RI selaku Co-Chair bersama Kemenlu dan Pemerintahan AS mengadakan

¹⁴⁹ Thean Potgieter, "Maritime Security in the Indian Ocean: Strategic Setting and Features," August 2012, 24, <https://www.africaportal.org/publications/maritime-security-in-the-indian-ocean-strategic-setting-and-features/>.

¹⁵⁰ Indonesia, "Forum Regional Asean Arf | Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia."

Asean Regional Forum Best Practices in Maritime Data Analysis to Strengthen Regional Maritime Security¹⁵¹.



Gambar 6.3. Bakamla RI bersama Kemenlu dan Pemerintah Amerika Serikat mengadakan Best Practice in Maritime Data Analysis to Strengthen Regional Maritime Security

Sumber: Detiknews Twitter

Pertemuan ini melibatkan partisipasi dari 10 negara diantaranya: Amerika, Kanada, Thailand, Vietnam, Kamboja, Tiongkok, Jepang, Sri Lanka, Indonesia, Australia. Adapun tujuan penyelenggaraannya, yakni saling bertukar informasi dan pengalaman terkait peningkatan analisis data maritim untuk mendukung penegakan hukum. Lebih lanjut, diskusi forum meliputi *fusion of maritime data to combat IUU Fishing, vessel traffic information, platform for displaying and analyzing maritime data, and information sharing.*

¹⁵¹ Detiknews.id, "Bakamla RI Gandeng Kemlu RI Dan Amerika Serikat, Gelar ARF | Detik News Indonesia," July 2017, <https://detiknews.id/detiknews/bakamla-ri-gandeng-kemlu-ri-dan-amerika-serikat-gelar-arf/>.

Dari tiga hari pelaksanaan agenda ini, melalui penyamaan persepsi atas ancaman yang dilanjutkan dengan pertukaran informasi menjadi bagian penting dalam diskusi ini. Urgensitas tersebut dapat ditunjukkan melalui penjelasan oleh Mayor Bakamla Kustriyani, S.T., M.Eng.Sc selaku Analis Kebijakan Ahli Muda Direktorat Kerja Sama¹⁵², “Pertimbangan untuk membagikan informasi adalah bentuk upaya peningkatan keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan Yurisdiksi Indonesia dapat dilakukan dalam mengantisipasi/sebagai *early warning* terhadap kegiatan kegiatan ilegal.” Dengan begitu, informasi tersebut dapat menjadi bekal/persiapan dalam merancang strategi yang akan ditindaklanjuti. Terlebih, Bakamla RI sendiri telah memiliki Indonesia Maritime Information Center (IMIC) yang bisa mengintegrasikan pemantauan di perairan Indonesia; sekaligus bisa berbagi informasi terkait keamanan dan keselamatan dengan Badan Informasi Maritim Regional. Maka, hal ini akan memudahkan pengkoordinasian dalam penegakan hukum di laut.

c) Ditinjau secara Koersif

Berdasarkan Le Miere, diplomasi maritim koersif mengartikan bahwa, aksi ini mempunyai pola seperti Gunboat Diplomacy. Seperti yang telah di definisikan oleh James Cable terkait Diplomasi Kapal Perang, namun kembali lagi dalam menganalisisnya dibutuhkan pertimbangan terkait aktivitas itu sendiri/*the activity*

¹⁵² Kustriyani, “Wawancara Dengan Analis Kebijakan Ahli Muda Direktorat Kerja Sama Terkait Maritime Security Dekstop Exercise (MSDE), Asean Coast Guard Forum (ACF), Indian Ocean Rim Association (IORA), Asean Regional Forum (ARF), Kehadiran Bakamla RI Dan TNI AL Di Peraira.”

itself, lalu aktor yang terlibat/*the actor involved*, tujuannya/*the goals*, hingga korban diplomasinya/*victim of the diplomacy*.

1. Resembles to Gunboat Diplomacy

Selama peneliti meninjau aktivitas Bakamla RI dari tahun 2017-2021, tidak menemukan adanya indikasi kegiatan yang mengarah pada bentuk/pola mengancam baik secara nyata maupun laten. Seperti yang diketahui definisi koersif menurut Le Miere mempunyai pola/tingkat kesamaan yang tinggi dengan diplomasi kapal perang/*gunboat diplomacy*¹⁵³. Dimana, aksi instansi tidak mencapai unsur mengancam dengan melanggar wilayah pihak yang dituju. Terlebih lagi, sebagaimana yang ditegaskan oleh Lettu Vida Gessy Zerlina, S.Hum selaku Analis Kerja Sama, Seksi Kerja Sama Multilateral dan Organisasi Internasional¹⁵⁴, “Secara koersif Bakamla RI tidak pernah melaksanakan tindakan tersebut, karena tindak tanduk nya meminta ijin kementerian luar negeri.” Artinya, segala aktivitas/urusan pemerintahan yang berhubungan dengan sektor luar negeri tentu saja tetap dikomunikasikan bersama kementerian luar negeri. Maka, dapat disimpulkan bahwasanya kategori ini tidak pernah dilakukan oleh Bakamla RI selaku lembaga yang berfungsi melakukan pencegahan, pengawasan, penjagaan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan sekaligus yurisdiksi Indonesia.

¹⁵³ Prabowo, “Diplomasi Maritim Indonesia-Australia Di Era Pandemi Covid-19: Studi Kasus Kerjasama Bakamla-Australian Border Force.”

¹⁵⁴ Karisma, “Laporan Magang Badan Keamanan Laut Republik Indonesia ‘Optimalisasi Diplomasi Maritim Dalam Mewujudkan Visi PMD: Studi Kasus Diplomasi Maritim Badan Keamanan Laut RI Tahun 2019-2021.’”

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penyajian sekaligus analisa data yang terdapat pada Bab IV, dapat disimpulkan bahwa Bakamla RI selaku aktor paramiliter memiliki keinginan (*willingness*) sekaligus kemampuan (*capability*) untuk mewujudkan visi poros maritim dunia. Hal tersebut dapat ditinjau melalui kacamata Le Miere yang mengklasifikasikan diplomasi maritim menjadi tiga bentuk yakni kooperatif, persuasif, hingga koersif.

Sehubungan dengan itu, instansi hanya menjalankan secara kooperatif dan persuasif. Secara kooperatif, meliputi: *goodwill visit* melalui aksi kunjungan pelabuhan ke Port Blair, India; *training and joint exercise* melalui penyelenggaraan forum MSDE dan pelaksanaan program pendidikan dan diklat; *joint maritime security operations* melalui latihan dan operasi bersama dengan *coast guard* lain. Kolaborasi tersebut dilaksanakan bersama beberapa pihak seperti U.S. Coast Guard, Australian Border Force, Japan Coast Guard, Indian Coast Guard, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Maritime Border Command, dan lainnya yang mencapai *confidence building measures*. Sementara itu secara persuasif, meliputi: *showing the flag* melalui kontribusi dalam membentuk Asean Coast Guard Forum (ACF); kehadiran Bakamla RI dan TNI AL di Perairan Natuna; hingga turut andil ke dalam forum-forum internasional seperti HACGAM, IORA, dan ARF yang mengindikasikan kehadirannya di panggung internasional.

Adapun rasa saling percaya sekaligus menciptakan marwah tersebut, ditunjukkan melalui serangkaian aktivitas di atas sehingga terpenuhinya 4 pilar dari 7 pilar kebijakan kelautan Indonesia yakni pengembangan sumber daya manusia; pertahanan, keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di laut; budaya bahari; hingga diplomasi maritim. Sebagaimana yang diketahui, kebijakan kelautan Indonesia adalah pedoman menuju poros maritim dunia; artinya melalui rujukan ini dapat memahami kadar pencapaian. Dengan demikian, poros maritim dunia belum sepenuhnya terlaksanakan.

B. Saran

Peneliti berharap keseriusan pemerintah dalam domain kemaritiman terus dilanjutkan, meskipun orientasi poros maritim dunia bukan lagi menjadi prioritas kebijakan di masa pemerintahan saat ini. Terlebih lagi, persoalan mengenai tata kelola keamanan maritim Indonesia yang masih memerlukan perhatian lagi; sebagaimana pentingnya kesinergian *stakeholder*. Dengan begitu, peran secara *inward looking* maupun *outward looking* dapat terpenuhi sehingga visi Indonesia bisa segera tercapai walaupun proses yang dilalui tentu saja cukup membutuhkan waktu.

Disamping itu, peneliti juga berharap bahwa penelitian bisa menambah wawasan ataupun informasi terkait kondisi kemaritiman Indonesia, terutama eksistensi Bakamla RI sendiri hingga kontribusinya dalam mencapai visi poros maritim dunia. Walaupun secara sadar, peneliti menyadari kekurangan dari penelitian seperti minimnya referensi seperti

jurnal tentang instansi, metode wawancara yang dirasa sebaiknya dilakukan langsung.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Wawancara

- Airlangga, Prabu. "Wawancara Dengan Kepala Seksi Operasi Keamanan Laut Terkait Pelaksanaan Port Visit Ke Port Blair, India," 2022.
- Anshari, Agis. "Wawancara Dengan Analis SDM Aparatur Ahli Muda Terkait Dengan Pertukaran Personel Sekaligus Program Pendidikan," 2022.
- Azhari, Muhamad. "Wawancara Dengan Analis Hukum Ahli Muda Terkait Penguatan Regulasi Instansi," 2022.
- Heriyana, Angga. "Hasil Wawancara Dengan Mayor Bakamla Angga Heriyana, S.T. Terkait Penyelenggaraan Latihan Dan Operasi Bersama Dengan Coast Guard Lain," 2022.
- Kustriyani. "Wawancara Dengan Analis Kebijakan Ahli Muda Direktorat Kerja Sama Terkait Maritime Security Dekstop Exercise (MSDE), Asean Coast Guard Forum (ACF), Indian Ocean Rim Association (IORA), Asean Regional Forum (ARF), Kehadiran Bakamla RI Dan TNI AL Di Peraira," 2022.
- Yudha, Riandi. "Wawancara Dengan Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Terkait Pembentukan RAPALA," 2022.

Dokumentasi

- Bakamla RI. "(318) Muhibah Pertama Bakamla Ke Port Blair India (KN Tanjung Datu-301) - YouTube." Indonesia, June 2019. <https://www.youtube.com/watch?v=ibZoIDvOwpl&t=182s>.
- "Bakamla RI (@bakamla_ri) • Instagram Photos and Videos," January 2021. <https://www.instagram.com/p/CKf0oGcB2nc/>.
- Bakamla RI, Humas. "Official Indonesia Coast Guard (IDNCG) on Twitter: "Selengkapnya Di: <https://t.co/ZhLO6gQxKV>," 2019. <https://twitter.com/humasbakamlari/status/1128527146698153984>.
- BPK RI, JDIH. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan (2014). <https://jdih.kkp.go.id/peraturan/1-uu-32-2014.pdf>.
- Exchange of Note between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United States of America (Diplomatic Note from USA No.001906 dated 14 October 2016 and Diplomatik Note from Indonesia No.D/02915/10/2016/36 dated 18 October 201 (n.d.). <https://treaty.kemlu.go.id/apisearch/pdf?filename=USA-2016-0352.pdf>.
- Gunawan, Riandi Yudha. "Paparan Pembekalan Rapala Bakamla RI." Jakarta, n.d.
- "Info Historia Buletin Kesejarahan TNI AL-Edisi Khusus HUT Ke-73 TNI AL," 2018. www.tnial.mil.id.

- International, The ICC Maritime Bureau. "ICC INTERNATIONAL MARITIME BUREAU PIRACY AND ARMED ROBBERY AGAINST SHIPS." London, 2019. https://www.icc-ccs.org/reports/2019_Annual_Piracy_Report.pdf.
- Karisma, Kurnia Finta. "Laporan Magang Badan Keamanan Laut Republik Indonesia 'Optimalisasi Diplomasi Maritim Dalam Mewujudkan Visi PMD: Studi Kasus Diplomasi Maritim Badan Keamanan Laut RI Tahun 2019-2021.'" Surabaya, 2021.
- Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman RI. "Kebijakan Kelautan Indonesia." *Maritim.Go.Id*, 2017, 70. https://maritim.go.id/konten/unggahahan/2017/07/Kebijakan_Kelautan_Indonesia_-_Indo_vers.pdf.
- Memorandum of Cooperation between the Japan Coast Guard and Badan Keamanan Laut Republik Indonesia on Maritime Security and Safety (2019). <https://treaty.kemlu.go.id/search>.
- Memorandum of Understanding on Maritime Cooperation between Government of the Republic of Indonesia and Government of the United States of America. Accessed January 1, 2023. <https://treaty.kemlu.go.id/apisearch/pdf?filename=USA-2015-0345.pdf>.
- Nurika, Rizki Rahmadini. "Future of Diplomacy, Presentasi Perkuliahan," n.d.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia (2022). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/201622/pp-no-13-tahun-2022#:~:text=PP No. 13 Tahun 2022,Yurisdiksi Indonesia %5BJDIH BPK RI%5D>.
- Pramandita, Wisnu. "Keamanan Laut Indonesia Konsepsi Menghadapi Tantangan Kini Dan Masa Depan_Focus Group Discussion Universitas Pertahanan RI," 2021.
- Sampono, Nono. "Urgensi Penguatan Penegakan Hukum Dalam Undang-Undang Kelautan." In *Penataan Sistem Keamanan Laut Indonesia Melalui Revisi Terbatas UU No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan*, 32. DPD RI - Universitas Pertahanan RI, 2022.
- Sudaryanto, Arie. "Visi Misi Program Aksi Ir. H. Joko Widodo-Drs. H.M. Jusuf Kalla Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014," n.d. https://www.academia.edu/8325321/VISI_MISI_PROGRAM_AKSI.
- UNCLOS 1982_Terjemahan (n.d.). [https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/djprl/P4K/Pencemaran Laut/unclos_terjemahan\(1\).doc](https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/djprl/P4K/Pencemaran Laut/unclos_terjemahan(1).doc)
- UNDOC. "Maritime Law Enforcement Tabletop Exercise Catalogue," 10. Accessed September 18, 2022. https://www.unodc.org/documents/Maritime_crime/UNODC_GMCP_Tablet

op_Exercise_Training_Catalogue.pdf.

UNODC. "Transnational Organized Crime in Southeast Asia: Evolution, Growth and Impact." *United Nations Office on Drugs and Crime*, 2019, 194. https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/Publications/2019/SEA_TOCTA_2019_web.pdf%0A%0A.

Buku

Berry, David. *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Accessed December 23, 2022. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=33651#>.

Bueger, Christian. "What Is Maritime Security?" *Forthcoming in Marine Policy, Cardiff University*, 2015. <http://bueger.info/wp-content/uploads/2014/12/Bueger-2014-What-is-Maritime-Security-final.pdf>.

I. Gede Wahyu Wicaksana, Probo Darono Yakti. *Poros Maritim Dunia*. Cetakan Pe. Malang: InTrans Publishing, 2021.

Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial : Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif Edisi Kedua*. Edited by Yayat Sri Hayati. Edisi Kedu. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009. <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=12814>.

Mière, Christian Le. *Maritime Diplomacy in the 21st Century. Maritime Diplomacy in the 21st Century*. Routledge Taylor and Francis Group, 2014. <https://doi.org/10.4324/9780203555590>.

Nye, Jr. *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. PublicAffairs Books, 2005.

Østhagen, Andreas. *Coast Guards and Ocean Politics in the Arctic. Coast Guards and Ocean Politics in the Arctic*. Springer Nature Singapore Pte Ltd, 2019. <https://doi.org/10.1007/978-981-15-0754-0>.

S.Susanto, Phil Astrid. *Pengantar Sosiologi Dan Perubahan Sosial*. binacipta, 1983.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=uUIIujUAAAAJ&citation_for_view=uUIIujUAAAAJ:9yKSN-GCB0IC.

Sukmadinata. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosdakarya, 2011. https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=+Sukmadinata.+Metode+Penelitian+Kualitatif.+&btnG=.

Widi, Endang. *Teori Dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R & D*. Jakarta: Bumi Aksara, 2018. <https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=Fx0mEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA152&dq=teori+dan+praktik+penelitian+kuantitatif+kualitatif+prof+>

endang+widi+winarni&ots=XRI39z350N&sig=qYKso_ZzJIBBpteKvD3cySkXX64&redir_esc=y#v=onepage&q=teori dan praktik penelitian.

Artikel Jurnal, Skripsi

Afiyanti, Yati. "Lembar Metodologi Focus Group Discussion (Diskusi Kelompok Terfokus) Sebagai Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif," n.d.

Al-Fadhat, Faris, and Naufal Nur Aziz Effendi. "Kerjasama Pertahanan Indonesia-Korea Selatan: Kedaulatan Maritim Dan Transfer Teknologi Dalam Pengadaan Kapal Selam DSME 209/1400." *Jurnal Ketahanan Nasional* 25, no. 3 (December 30, 2019): 373–92. <https://jurnal.ugm.ac.id/jkn/article/view/48822>.

Bertram Shrine Jr. "School of Naval Command and Staff: Mahan in The Nuclear Age" 19, no. 2 (1966). <https://digital-commons.usnwc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=6903&context=nwc-review>.

Buntoro, Kresno. "Enhancing Safety and Security in Indonesian Waters: Cooperations Within Diplomacy Framework." *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 4, no. 2 (August 6, 2018): 53–70. <https://doi.org/10.33172/JPBH.V4I2.331>.

Cassidy, Fikry, Partogi J.P Samosir, Debbi Oktarossa, Erry Wahyu Prasetyo, Faiz Ahmad Nugroho, Widya Fitri, and Robertus Aji Putro. "Diplomasi Poros Maritim: Keamanan Maritim Dalam Perspektif Politik Luar Negeri," 2016, 120. <https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9LYWppYW4lMjBCUFBLl1AzSyUyME9JLU1VTFRJTGFURVJBTC8xNF9EaXBSb21hc2lfUG9yb3NfTWfyaXRpbS5wZGY=>.

Chiang, Min-Hua. "SOUTH KOREA'S NEW SOUTHERN POLICY: MOTIVATIONS, IMPLEMENTATIONS AND IMPLICATIONS." Accessed January 9, 2023. <https://research.nus.edu.sg/eai/wp-content/uploads/sites/2/2020/12/EAIBB-No.-1525-South-Koreas-new-southern-policy-2.pdf>.

Colline, Cicilia Safaatul. "Strategi Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Dalam Penanganan Kejahatan Perampokan Bersenjata Di Kawasan Alur Laut Kepulauan Indonesia Tahun 2017-2020," 2021, 116. [http://digilib.uinsby.ac.id/52122/2/Cicilia Safaatul Colline_I72217033.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/52122/2/Cicilia%20Safaatul%20Colline_I72217033.pdf).

Doly, Denico. "Penegakkan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Narkoba Di Perairan Indonesia" Vol. XIV, (2022): 6. [https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info Singkat-XIV-9-I-P3DI-Mei-2022-208.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIV-9-I-P3DI-Mei-2022-208.pdf).

Fitriani, Evi. "Linking the Impacts of Perception, Domestic Politics, Economic Engagements, and the International Environment on Bilateral Relations

- between Indonesia and China in the Onset of the 21st Century.” *Journal of Contemporary East Asia Studies* 10, no. 2 (2021): 183–202. <https://doi.org/10.1080/24761028.2021.1955437>.
- Hadiningrat, June K. “Diplomasi Maritim: Meletakkan Fondasi Poros Maritim Dunia.” *Jurnal Maritim Indonesia* | Juni 8, no. 1 (2020): 98–109.
- Heide, Erik Auf Der. “Disaster Response: Principles of Preparation & Coordination,” no. January 1989 (2021). <https://doi.org/10.2307/3380618>.
- Holst, Johan Jørgen. “Confidence Building Measures a Conceptual Framework.” *Survival: Global Politics and Strategy* 25, no. 1 (1983): 2–15. <https://doi.org/10.1080/00396338308442072>.
- Kwan, Toh Boon. “Brinkmanship and Deterrence Success during The Anglo-Indonesian Sunda Straits Crisis, 1964–1966.” *Journal of Southeast Asian Studies* 36, no. 3 (October 2005): 399–417. <https://doi.org/10.1017/S0022463405000226>.
- Laksmiana, Evan A, Iis Gindarsih, and Andrew W Mantong. “Menerjemahkan Visi Poros Maritim Global Ke Dalam Kerangka Diplomasi Pertahanan Maritim Dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia Di Era Jokowi.” *CSIS Working Paper Series*. WPSINT – 01/2018. Jakarta, 2018. <https://www.csis.or.id/publications/menerjemahkan-visi-poros-maritim-global-ke-dalam-kerangka-diplomasi-pertahanan-maritim-dalam-kebijakan-luar-negeri-indonesia-di-era-jokowi>.
- Landau, Daryl, and Sy Landau. “Confidence Building Measures in Mediation.” *Mediation Quarterly* 15, no. 2 (1997): 97–103. <https://doi.org/10.1002/crq.3900150204>.
- Lestari, Yuliannova, Georges Olemanu Lohalo, Nicole Kajir Diur, Betao Ngoma Mushinda, Vital Mbumba Mbumba, Scheel Mutombo Kianga, and Peter Ngolo Minga. “Security Cooperation between China and Indonesia to Address Maritime Security Threats.” *Open Journal of Political Science* 12, no. 04 (2022): 534–55. <https://doi.org/10.4236/ojps.2022.124030>.
- Limited, Distr :, and Wolfgang Brandstetter. “Economic and Social Council Commission on Crime Prevention and Criminal Justice LIST OF PARTICIPANTS States Members of the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice AUSTRIA,” 2016.
- Llewelyn, James D. “Preventive Diplomacy and the Role of Civil Maritime Security Cooperation in Southeast Asia.” *Strategic Analysis* 41, no. 1 (2017): 49–60. <https://doi.org/10.1080/09700161.2016.1249178>.
- Marsetio, Marsetio. “Indonesian Sea Power and Regional Maritime Security Challenges.” *Journal of Maritime Studies and National Integration* 1, no. 1 (July 23, 2017): 34–46. <https://doi.org/10.14710/JMSNI.V1I1.1369>.
- Mière, Christian Le. “Policing The Waves: Maritime Paramilitaries in The Asia-

- Pacific.” *Survival* 53, no. 1 (2011): 133–46.
<https://doi.org/10.1080/00396338.2011.555607>.
- Nainggolan, Poltak Partogi. “Indonesia Dan Ancaman Keamanan Di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) Security Threats To Indonesia ’ S Sea Lanes.” *Kajian: Menjembatani Teori Dan Persoalan Masyarakat Dalam Peraturan Kebijakan* 20 (3) Sep (2015): 183–200.
<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/624>.
- Nanda, Biren. “India and Indonesia Affirm a Shared Vision of Maritime Cooperation in the Indo-Pacific” III, no. 8 (2018): 1–4.
https://www.delhipolicygroup.org/uploads_dpg/publication_file/india-and-indonesia-affirm-a-shared-vision-of-maritime-cooperation-in-the-indo-pacific-1100.pdf.
- O’Connor, Raymond G. “Gunboat Diplomacy: Political Applications of Limited Naval Force. Pp. 251. New York: Praeger, 1971.” *Http://Dx.Doi.Org/10.1177/000271627240300115* 403, no. 1 (September 8, 2016): 163–64. <https://doi.org/10.1177/000271627240300115>.
- Østhagen, Andreas. *Coast Guards and Ocean Politics in the Arctic*. *Coast Guards and Ocean Politics in the Arctic*. Springer Nature Singapore Pte Ltd, 2019.
<https://doi.org/10.1007/978-981-15-0754-0>.
- Pamalina, Amanca. “Analisis Kebijakan Luar Negeri Arab Saudi Dalam Merespon Perang Harga Minyak Terhadap Rusia Pada Tahun 2020.” UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.
- Partogi, Poltak Nainggolan. “KEBIJAKAN POROS MARITIM DUNIA JOKO WIDODO DAN IMPLIKASI INTERNASIONALNYA (Maritime Axis Policy and Its International Implications).” *Politica* 6, no. NO.2Agustus 2015 (2015): 167–90.
- Parulian, Yoshua, Hari Utomo, and Yusnaldi Yusnaldi. “Analisis Confidence Building Measures (CBMs) Terhadap Kerja Sama Bilateral Pertahanan Antara Indonesia Dengan Singapura.” *Jurnal Keamanan Maritim Program Studi Keamanan Maritim Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan RI*, 2019. <https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/KM/article/view/382>.
- Penelitian Hukum De Jure, Jurnal, and Muhar HR Junef Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Badan penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Jalan Rasuna. “Implementasi Poros Maritim Dalam Prespektif Kebijakan.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 3 (September 30, 2019): 303–22. <https://doi.org/10.30641/DEJURE.2019.V19.303-322>.
- Potgieter, Thean. “Maritime Security in the Indian Ocean: Strategic Setting and Features,” August 2012, 24.
<https://www.africaportal.org/publications/maritime-security-in-the-indian-ocean-strategic-setting-and-features/>.

- Prabowo, Angga Reza. "Diplomasi Maritim Indonesia-Australia Di Era Pandemi Covid-19: Studi Kasus Kerjasama Bakamla-Australian Border Force." *Bappenas Working Papers* 5, no. 2 (July 31, 2022): 176–95. <https://doi.org/10.47266/BWP.V5I2.169>.
- Putri, Hertria Maharani, Radityo Pramoda, and Maulana Firdaus. "Kebijakan Penenggelaman Kapal Pencuri Ikan Di Wilayah Perairan Indonesia Dalam Perspektif Hukum." *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan* 7, no. 2 (2018): 91. <https://doi.org/10.15578/jksekp.v7i2.6095>.
- Ramadhan, Khusairi. "Strategi Gastrodiplomasi Indonesia Di Perancis Tahun 2018-2019." *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*, 2020.
- Ramadhanti, Maudy Dwi. "Diplomasi Maritim Indonesia Terhadap Hacgam (Head Of Asian Coast Guard Agency Meeting) Dalam Mewujudkan Indonesia Poros Maritim Dunia Tahun 2016-2017." *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (JOM FISIP Vol.6)* 6 (2017): 14. https://digilib.unri.ac.id/index.php?p=show_detail&id=80907&keywords=.
- Rijal, Najamuddin Khairur. "Smart Maritime Diplomacy: Diplomasi Maritim Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia." *Jurnal Global & Strategis* 13, no. 1 (2019): 63. <https://doi.org/10.20473/jgs.13.1.2019.63-78>.
- Samangun, E. "Dampak Terpilihnya Kembali Indonesia Sebagai Anggota Dewan International Maritime Organization (IMO) Kategori-C Terhadap Sektor Keselamatan Maritim Di Indonesia," 2019. https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/1922/%0Ahttps://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/1922/13/Unikom_Emiliana_Samangun_Jurnal_Skripsi.pdf.
- Samy, Muhammad, and Jayanti Aarnee Kusumadewi. "Diplomasi Pertahanan Maritim Indonesia Dalam Menghadapi Ancaman Keamanan Non-Tradisional Upaya Mewujudkan Visi Poros Maritim Dunia." *Jurnal Hubungan Internasional* 14, no. 1 (June 25, 2021): 45–62. <https://doi.org/10.20473/JHI.V14I1.25547>.
- Sinaga, Irwan, Iwa Mulyana, Nelson Simorangkir, Adi Priyanto, Ahmad Gunawan Wicaksono, Prakoso Wicaksono, Bayu Rahmat Novita, et al. "Connecting the Connectivity in the Indo-Pacific: Indian Ocean and Rim Chapter," 2019. <https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9LYWppYW4lMjBCUFBLl1AzSzlMjBBU1BBU0FGLzIwX0NvbM5lY3RpbmclMjB0aGUIMjBjb25uZWNoaXZpdHklMjBpbiUyMHRoZSUyMEluZG8tUGFjaWZpYy5wZGY=>.

Website Online

- Admin. "Bakamla RI - Japan Coast Guard Tingkatkan Kerja Sama Bilateral Keamanan Maritim | WEBSITE TENTARA NASIONAL INDONESIA." Accessed January 3, 2023. <https://tni.mil.id/view-147872-bakamla-ri-japan-coast-guard-tingkatkan-kerja-sama-bilateral-keamanan-maritim.html>.

- . “Bilateral Meeting Bakamla Dan ABF Di Australia | WEBSITE TENTARA NASIONAL INDONESIA.” Accessed January 5, 2023. <https://tni.mil.id/view-112124-bilateral-meeting-bakamla-dan-abf-di-australia.html>.
- . “Kepala Bakamla RI Temu Daring Dengan Dubes Jepang,” 2021. https://bakamla.go.id/publication/detail_news/kepala-bakamla-ri-temu-daring-dengan-dubes-jepang.
- . “Kepala Bakamla RI Terima Kunjungan Kehormatan Charge D Affaires Dubes Amerika Serikat,” May 2020. <https://tni.mil.id/view-176905-kepala-bakamla-ri-terima-kunjungan-kehormatan-charge-d-affaires-dubes-amerika-serikat.html>.
- . “MLED Dari 5 Negara Kunjungi Mabes Bakamla/Indonesian Coast Guard Headquarters | WEBSITE TENTARA NASIONAL INDONESIA,” July 2019. <https://tni.mil.id/view-154737-mled-dari-5-negara-kunjungi-mabes-bakamlaindonesian-coast-guard-headquarters.html>.
- . “Passing Exercise KN Tanjung Datu 301 Dengan Kapal Indian Coast Guard | WEBSITE TENTARA NASIONAL INDONESIA,” May 2019. <https://tni.mil.id/view-151174-passing-exercise-kn-tanjung-datu-301-dengan-kapal-indian-coast-guard.html>.
- . “Semarakkan HUT Ke-16, Bakamla RI Salurkan Bansos Korban Erupsi Semeru Dan Percepatan Vaksinasi.” Accessed December 22, 2022. <https://tni.mil.id/view-208428-semarakkan-hut-ke-16-bakamla-ri-salurkankan-bansos-korban-erupsi-semeru-dan-percepatan-vaksinasi.html>.
- . “Tingkatkan Pemahaman Hukum Laut Bakamla RI Gelar Maritime Regulation and Enforcement Training,” February 2021. https://bakamla.go.id/publication/detail_news/tingkatkan-pemahaman-hukum-laut-bakamla-ri-gelar-maritime-regulation-and-enforcement-training.
- . Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor 7 Tahun Tentang Rencana Strategis Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Tahun 2020-2024 (2020). <https://bakamla.go.id/>.
- . Road Map Reformasi Birokrasi Badan Keamanan Laut Republik Indonesia 2020-2024 (2020). <https://bakamla.go.id/>.
- Batubara, Herianto. “Komandan KN Belut Laut-4806 Serahkan Bantuan Untuk Korban Tsunami Selat Sunda.” Accessed December 22, 2022. <https://news.detik.com/berita/d-4382151/komandan-kn-belut-laut-4806-serahkan-bantuan-untuk-korban-tsunami-selat-sunda>.
- “Bawa Misi Diplomasi Bangsa, KRI Bima Suci Berlabuh Di Kota Kinabalu.” Accessed January 1, 2023. <https://kemlu.go.id/kotakinabalu/id/news/20258/bawa-misi-diplomasi-bangsa-kri-bima-suci-berlabuh-di-kota-kinabalu>.

- Biro Pers Media dan Informasi, Sekretariat Presiden. "Pengantar Presiden - Ratas Kabinet Kerja Tentang Natuna, Jakarta, 29 Juni 2016 | Sekretariat Negara," 2016. https://www.setneg.go.id/baca/index/pengantar_presiden_-_ratas_kabinet_kerja_tentang_natuna_jakarta_29_juni_2016.
- Coast Guard Command, Turkish. "Heads of Asian Coast Guard Agencies Meeting (HACGAM)," October 2017. <https://en.sg.gov.tr/hacgam>.
- Detiknews.id. "Bakamla RI Gandeng Kemlu RI Dan Amerika Serikat, Gelar ARF | Detik News Indonesia," July 2017. <https://detiknews.id/detiknews/bakamla-ri-gandeng-kemlu-ri-dan-amerika-serikat-gelar-arf/>.
- Devita, Rindra. "AS Dan Bakamla Inisiasi Workshop Penegakan Hukum Wilayah Maritim," June 2019. <https://www.balipost.com/news/2019/06/29/79561/AS-dan-Bakamla-Inisiasi-Workshop...html>.
- Diah, Sakina. "Indonesia-Australia Sepakati Kerja Sama Maritim." Accessed January 4, 2023. <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/16/171711526/indonesia-australia-sepakati-kerja-sama-maritim>.
- Dian. "Bakamla RI Gelar Pelatihan Hukum Laut Bersama 13 Negara Anggota HACGAM Berita Terkini Medan Sumut - Utama News," October 2017. <https://www.utamanews.com/ragam/Bakamla-RI-Gelar-Pelatihan-Hukum-Laut-bersama-13-Negara-Anggota-HACGAM>.
- Dion. "Bakamla Dan ABF Hadirkan 16 Negara Di MSDE Ke-9 Berita Terkini Medan Sumut - Utama News," June 2019. https://www.utamanews.com/ragam/Bakamla-dan-ABF-Hadirkan-16-Negara-di-MSDE-Ke-9?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter.
- Edy. "Tingkatkan Kapabilitas Personel Di Tengah Pandemi Covid-19, Bakamla RI Dan JCG Gelar Latihan Jarak Jauh," July 2020. <https://www.inanews.co.id/2020/07/tingkatkan-kapabilitas-personel-di-tengah-pandemi-covid-19-bakamla-ri-dan-jcg-gelar-latihan-jarak-jauh/>.
- "Humanitarian Assistance - OECD." Accessed December 21, 2022. <https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-topics/humanitarian-assistance.htm>.
- Humas. "Sekretariat Kabinet Republik Indonesia | Disambut Udara Dingin, Presiden Jokowi Tiba Di Tokyo Untuk Kunjungan Kenegaraan." Accessed January 3, 2023. <https://setkab.go.id/disambut-udara-dingin-presiden-jokowi-tiba-di-tokyo-untuk-kunjungan-kenegaraan/>.
- Humas Kemensetneg. "Presiden Jokowi Lantik Aan Kurnia Sebagai Kepala Bakamla | Sekretariat Negara," February 2020. https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_jokowi_lantik_aan_kurnia_sebagai_kepala_bakamla.
- Humas Seskab RI, Nia. "Rapat Di Natuna, Presiden Jokowi Minta Penjagaan

- Ditingkatkan - BBC News Indonesia,” June 2016. https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/06/160623_indonesia_n_jokowi_natuna_hasil.
- “Indonesia India Dorong Kerja Sama Ekonomi Dan Maritim | Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.” Accessed December 29, 2022. <https://kemlu.go.id/portal/id/read/579/berita/indonesia-india-dorong-kerja-sama-ekonomi-dan-maritim>.
- Indonesia, Kementerian Luar Negeri. “Forum Regional Asean Arf | Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia,” 2019. https://kemlu.go.id/portal/id/read/126/halaman_list_lainnya/forum-regional-asean-arf.
- . “Indian Ocean Rim Association | Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia,” 2019. https://kemlu.go.id/portal/id/read/167/halaman_list_lainnya/indian-ocean-rim-association.
- International Maritime Organization. “Council Members.” Accessed January 2, 2023. <https://www.imo.org/en/OurWork/ERO/Pages/Council-Members.aspx>.
- “Kemelut Indonesia-China Di Natuna Sepanjang 2016,” June 2016. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160621100151-20-139694/kemelut-indonesia-china-di-natuna-sepanjang-2016>.
- “Kemungkinan Seluas Lautan-Kanasugi Kenji, Duta Besar Jepang Untuk Indonesia.” Accessed December 29, 2022. https://www.id.emb-japan.go.jp/about_id_amb_kompas2021_3.html.
- MaritimeNews, Tim Redaksi. “MSDE 2017 Resmi Ditutup, Hasilkan Sejuta Harapan Untuk Keamanan Laut | MaritimNews.Com,” 2017. <http://maritimnews.com/2017/05/msde-2017-resmi-ditutup-hasilkan-sejuta-harapan-untuk-keamanan-laut/>.
- Parameswaran, Prashanth. “Exclusive: US, Indonesia to Strengthen Partnership During Jokowi Visit – The Diplomat,” 2015. <https://thediplomat.com/2015/10/exclusive-what-to-expect-in-us-indonesia-relations-during-jokowis-visit/>.
- Pratama, Fajar. “Kepala Bakamla Bertemu Petinggi Indian Coast Guard, Apa Yang Dibahas?,” December 2018. <https://news.detik.com/berita/d-4349699/kepala-bakamla-bertemu-petinggi-indian-coast-guard-apa-yang-dibahas>.
- Rahmat, Yudi. “Bakamla RI Pimpin Pelatihan Bersama Gakkum Coast Guard 19 Negara,” October 2021. <https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/569891/bakamla-ri-pimpin-pelatihan-bersama-gakkum-coast-guard-19-negara?video=>.
- Sukma, Rizal. “Gagasan Poros Maritim,” 2014. <https://money.kompas.com/read/2014/08/21/080000726/Gagasan.Poros.Mari>

tim?page=all.

Tim, Okezone. "Bakamla RI Beri Bantuan Medis ABK Kapal AS Positif Covid-19 Di Perairan Natuna." Accessed December 22, 2022. <https://nasional.okezone.com/read/2022/01/15/337/2532749/bakamla-ri-beri-bantuan-medis-abk-kapal-as-positif-covid-19-di-perairan-natuna>.

Yuanto. "Delegasi Bakamla Berkunjung Ke ROC Dan MRCC Indian Coast Guard," 2019. <https://www.lensaindonesia.com/2019/05/16/delegasi-bakamla-berkunjung-ke-roc-dan-mrcc-indian-coast-guard.html>.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A